



SALINAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 - 2029, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024, perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu disusun kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 937);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra IPDN adalah dokumen perencanaan jangka menengah Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan dipimpin oleh rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra IPDN terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi institusi;
- c. arah kebijakan dan strategi;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- e. monitoring; dan
- f. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra IPDN digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan IPDN dalam menyusun rencana strategis unit kerja dan penyusunan kerja tahunan.
- (2) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra IPDN.
- (3) Renstra IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan

informasi kinerja anggaran serta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Desember 2025

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

HALILUL KHAIRI



Dr. Agus Toyib, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808271990031003

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Sejarah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki sejarah yang panjang dan berakar dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). APDN resmi dibuka pada 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur, oleh Presiden Soekarno, dengan tujuan untuk menjadi pusat pengembangan keterampilan dan manajerial dalam pemerintahan. Lulusan pertama APDN direkrut dari lulusan Kursus Dinas C dengan gelar Sarjana Muda.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kader pemerintahan yang berkualitas semakin mendesak. Pada tahun 1967, Kementerian Dalam Negeri mendirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Malang untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi lulusan APDN. IIP kemudian dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1972 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dalam fase ini, Kementerian Dalam Negeri juga membentuk APDN di 20 provinsi untuk memperluas akses pendidikan pemerintahan.

Pada tahun 1988, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 20 APDN yang tersebar di berbagai provinsi disatukan menjadi satu lembaga di Jatinangor, Jawa Barat. Ini diikuti dengan peningkatan status APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 1992, yang menawarkan program Diploma Empat (D-IV) Pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri merencanakan integrasi STPDN dan IIP menjadi satu institusi.

Integrasi tersebut resmi dilakukan pada tahun 2004 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan, yang mengubah nama IIP menjadi IPDN. IPDN memiliki dua kampus di Jatinangor dan Jakarta, dan bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas pendidikan kader pamong praja. Sejak saat itu, IPDN telah mengembangkan berbagai program studi, termasuk program Diploma Empat (D-IV) dan Strata Satu (S-1).

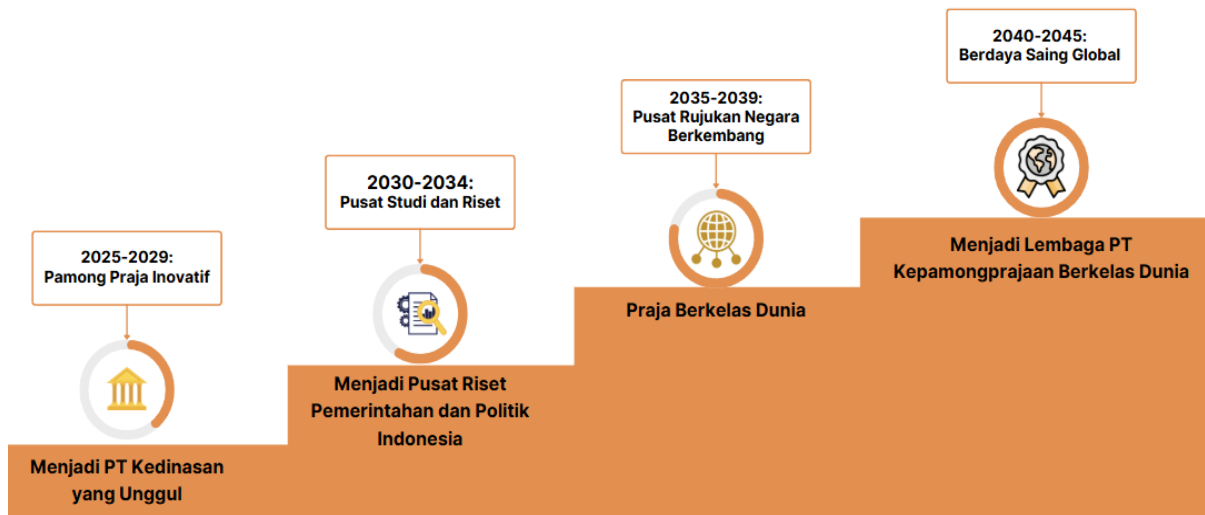
Pada tahun 2000, IPDN mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program akademik Strata Dua (S-2) dan tahun 2013 izin Strata Tiga (S-3) dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) diluncurkan, diikuti dengan program profesi kepomongprajaan. Hingga saat ini, IPDN telah meluluskan ribuan magister dan doktor dalam bidang pemerintahan.

Perubahan struktur organisasi IPDN diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan. IPDN kini memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Dengan sejarah yang panjang dan kontribusi yang signifikan, IPDN telah berhasil mendidik kader-kader Pamong Praja yang berkomitmen untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara, serta berperan dalam pembangunan nasional.

1.2. Rencana Pemikiran

Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, IPDN menetapkan visi jangka panjang untuk menjadi pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing sampai dengan tahun 2045. Visi ini dibangun atas dasar komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan agar mampu bersaing di tingkat internasional serta berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Sebagai landasan pencapaian visi tersebut, IPDN menyusun Rencana Strategis Pengembangan dalam 4 (empat) tahapan utama yang selaras dengan *milestone* institusi hingga tahun 2045. Rencana ini mempertimbangkan berbagai aspek kritis, termasuk transformasi akademik, penguatan riset, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi jejaring dan kolaborasi internasional.



Gambar 1. *Milestone* IPDN 2025-2045

Pada periode awal ini, fokus utama IPDN adalah meningkatkan standar pendidikan kepamongprajaan melalui pengembangan kurikulum berbasis inovasi dan teknologi. Sistem pembelajaran akan diarahkan pada pendekatan *problem-solving* dan *evidence-based policy* guna mencetak lulusan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan di era digital. IPDN juga memperkuat kapasitas penelitian dengan mendorong kajian strategis yang relevan dengan kebijakan publik serta pemerintahan daerah.

Memasuki dekade kedua, IPDN bertransformasi menjadi pusat studi dan riset unggulan dalam bidang kepamongprajaan dan kebijakan pemerintahan. Pada periode ini, IPDN akan memperluas kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian internasional guna menghasilkan riset yang berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan modern. Upaya peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penguatan kompetensi dosen, serta pengembangan sistem manajemen informasi pemerintahan menjadi prioritas utama.

Sebagai bagian dari komitmen dalam membangun pemerintahan yang adaptif, IPDN menargetkan posisi sebagai pusat studi pemerintahan bagi negara berkembang. Institusi ini akan menyediakan berbagai program pelatihan internasional bagi aparatur pemerintahan dari berbagai negara serta memperluas jejaring kerja sama dengan organisasi pemerintahan dunia. Di samping itu, IPDN akan menjadi tuan rumah bagi forum akademik global guna memperkaya diskursus tentang administrasi negara dan kebijakan publik.

Pada fase terakhir, IPDN berkomitmen untuk mengukuhkan diri sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kelas dunia. Fokus utama dalam periode ini adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan berstandar internasional, optimalisasi teknologi pembelajaran berbasis *artificial intelligence*, serta integrasi sistem administrasi

pemerintahan berbasis data dan *digital governance*. Selain itu, IPDN akan terus memperluas jejaring dengan berbagai universitas global serta lembaga pemerintahan internasional.

Sebagai bagian dari implementasi rencana ini, IPDN akan menerapkan pendekatan yang adaptif dan dinamis, memungkinkan evaluasi berkala terhadap strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, IPDN tidak hanya berperan dalam membangun sistem pendidikan kepomongprajaan yang unggul, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berdaya saing global.

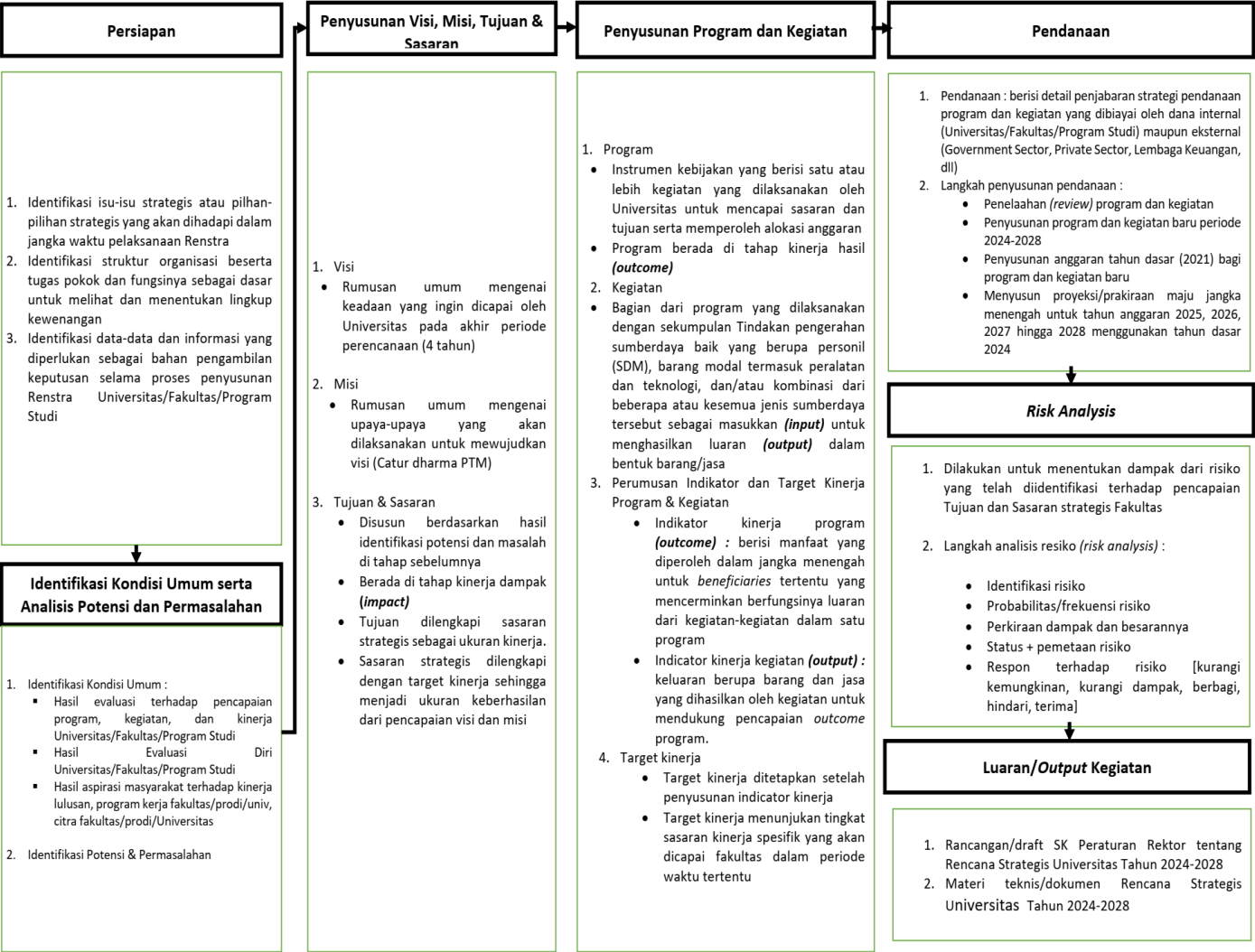
1.3. Kerangka Kerja Penyusunan

Kerangka kerja merupakan dasar berpikir dan bertindak dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi IPDN untuk periode 2025-2029. Dengan memahami kerangka kerja ini, IPDN dapat merumuskan Renstra yang terarah, komprehensif, dan selaras dengan visi pengembangan kelembagaan dalam mencetak kader pemerintahan berkualitas.

Penyusunan Renstra IPDN dimulai dengan penegasan kondisi ideal yang diharapkan pada masa depan, yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Visi dan misi ini harus selaras dengan Rencana Induk Pengembangan IPDN serta kebijakan nasional terkait pendidikan dan pemerintahan.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi diri, yang mencakup analisis aspek internal dan eksternal untuk mengidentifikasi pencapaian terkini dan posisi IPDN dalam peta kompetisi pendidikan pemerintahan nasional. Evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan *gap analysis*, yang bertujuan untuk mengukur selisih antara kondisi saat ini dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil *gap analysis*, IPDN akan merumuskan arah kebijakan dan strategi, yang mencakup peningkatan kualitas akademik, penguatan tata kelola kelembagaan, serta optimalisasi kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan nasional. Selain itu, IPDN menetapkan standar mutu, indikator kinerja strategis, serta target tahunan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Renstra.



Gambar 2. Kerangka Kerja Penyusunan

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis IPDN 2025-2029 didasarkan atas landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal; dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.5. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis

1) Visi

IPDN memiliki visi “Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Sampai Dengan Tahun 2045”, dengan komitmen untuk menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi global, berkarakter kuat, dan berkepribadian unggul, serta mampu beradaptasi dengan dinamika pemerintahan modern dan teknologi berbasis digital.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, IPDN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional, dan berakar pada kearifan lokal.
3. Mengembangkan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoretis dan ilmu pemerintahan terapan.

3) Tujuan Strategis

Sejalan dengan visi dan misi, IPDN menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing global dalam sektor pemerintahan dan kebijakan publik.
2. Mengembangkan model pendidikan kepomongprajaan yang inovatif dan berbasis teknologi guna menjawab tantangan pemerintahan digital dan perubahan sosial-ekonomi.
3. Menjadi pusat riset dan kebijakan pemerintahan yang memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem administrasi publik, baik nasional maupun internasional.

- 4. Mewujudkan institusi pendidikan kepamongprajaan yang memiliki reputasi global, dengan kurikulum, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran yang setara dengan lembaga pendidikan kelas dunia.

4) Sasaran Strategis

Merujuk pada visi dan tujuan strategis, sasaran strategis yang ingin dicapai IPDN adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di IPDN dengan standar nasional dan internasional.
- 2. Terciptanya ekosistem akademik dan riset yang berkontribusi terhadap kebijakan pemerintahan nasional.
- 3. Terwujudnya lulusan IPDN yang memiliki kompetensi internasional, dengan kemampuan kepemimpinan, analisis kebijakan, serta penguasaan teknologi pemerintahan berbasis digital.
- 4. Peningkatan jejaring global dengan berbagai institusi internasional guna memperluas akses dan kesempatan akademik serta profesional bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

1.6. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (IK) dalam penyusunan Renstra IPDN 2025-2029 merupakan alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IK ini disusun dengan mempertimbangkan 5 (lima) kriteria utama, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi waktu, sehingga dapat memberikan gambaran akurat mengenai kinerja IPDN dalam berbagai aspek.

Tabel 1. Indikator Kinerja IPDN

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
Kriteria: 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis			
1.	Standar Jati Diri	4	5,00%
Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama			
2.	Standar Tata Pamong	19	2,75%
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	7	1,01%
4.	Standar Pengelolaan Penelitian	4	0,58%
5.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	4	0,58%
6.	Standar Kerjasama	5	0,72%

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
7.	Standar Daya Saing Internasional	30	4,35%
Kriteria 3: Mahasiswa			
8.	Standar Mahasiswa	12	10,00%
Kriteria 4: Sumber Daya Manusia			
9.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	15	11,84%
10.	Standar Peneliti	2	1,58%
11.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,58%
Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana			
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	12	6,00%
13.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	8	4,00%
14.	Standar Sarana Prasarana Penelitian	3	1,50%
15.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2	1,00%
16.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,00%
17.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	3	1,50%
Kriteria 6: Pendidikan			
18.	Standar Isi Pembelajaran	9	6,92%
19.	Standar Proses Pembelajaran	9	6,92%
20.	Standar Penilaian Pembelajaran	8	6,15%
Kriteria 7: Penelitian			
21.	Standar Isi Penelitian	4	3,64%
22.	Standar Proses Penelitian	3	2,73%
23.	Standar Penilaian Penelitian	4	3,64%
Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat			
24.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	4	2,86%
25.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	8	5,71%
26.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,43%

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
Kriteria 9: Luaran Tri Dharma			
27.	Standar Kompetensi Lulusan	9	1,50%
28.	Standar Hasil Penelitian	10	1,67%
29.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	11	1,83%
Total		215	100,00%

Dalam Renstra IPDN, indikator kinerja dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. Standar akreditasi nasional sesuai dengan BAN-PT untuk memastikan kualitas pendidikan kepomongprajaan.
2. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi.
3. Kontrak kinerja Rektor IPDN periode 2025-2029, yang mencerminkan target capaian kelembagaan yang selaras dengan standar nasional dan internasional.
4. Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama IPDN adalah Jumlah Program Studi IPDN Dengan Akreditasi Unggul, sehingga disusun Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS) IPDN dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).

Tabel 2. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS) IPDN

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
Kriteria: 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis			
1.	Standar Jati Diri	3	3,75%
Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama			
2.	Standar Tata Pamong	9	1,30%
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	4	0,58%
4.	Standar Pengelolaan Penelitian	3	0,43%
5.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3	0,43%

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
6.	Standar Kerjasama	2	0,29%
7.	Standar Daya Saing Internasional	17	2,46%
Kriteria 3: Mahasiswa			
8.	Standar Mahasiswa	10	8,33%
Kriteria 4: Sumber Daya Manusia			
9.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11	8,68%
10.	Standar Peneliti	1	0,79%
11.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,79%
Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana			
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	9	4,50%
13.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	5	2,50%
14.	Standar Sarana Prasarana Penelitian	2	1,00%
15.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1	0,50%
16.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,50%
17.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,50%
Kriteria 6: Pendidikan			
18.	Standar Isi Pembelajaran	5	3,85%
19.	Standar Proses Pembelajaran	6	4,62%
20.	Standar Penilaian Pembelajaran	4	3,08%
Kriteria 7: Penelitian			
21.	Standar Isi Penelitian	3	2,73%
22.	Standar Proses Penelitian	2	1,82%
23.	Standar Penilaian Penelitian	2	1,82%
Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat			
24.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,43%
25.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6	4,29%
26.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,71%

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
Kriteria 9: Luaran Tri Dharma			
27.	Standar Kompetensi Lulusan	7	1,17%
28.	Standar Hasil Penelitian	6	1,00%
29.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	9	1,50%
Total		136	65,35%

Indikator Kinerja Standar Tambahan (IKKST) IPDN, yang mencakup:

1. Indikator Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPDN, yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi internal.
2. Indikator kontrak kinerja Rektor di luar cakupan IKU, yang mencerminkan aspek pengembangan kelembagaan dan inovasi akademik.
3. Indikator kinerja lainnya yang tidak termasuk dalam standar BAN-PT, tetapi tetap relevan dalam peningkatan daya saing IPDN.

Tabel 3. Indikator Kinerja Standar Tambahan (IKKST) IPDN

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
Kriteria: 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis			
1.	Standar Jati Diri	1	1,25%
Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama			
2.	Standar Tata Pamong	10	1,45%
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0,43%
4.	Standar Pengelolaan Penelitian	1	0,14%
5.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,14%
6.	Standar Kerja Sama	3	0,43%
7.	Standar Daya Saing Internasional	13	1,88%
Kriteria 3: Mahasiswa			
8.	Standar Mahasiswa	2	1,67%
Kriteria 4: Sumber Daya Manusia			
9.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4	3,16%
10.	Standar Peneliti	1	0,79%

No.	Standar Mutu IPDN	Indikator Kinerja	Bobot
11.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,79%
Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana			
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3	1,50%
13.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	3	1,50%
14.	Standar Sarana Prasarana Penelitian	1	0,50%
15.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1	0,50%
16.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,50%
17.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,00%
Kriteria 6: Pendidikan			
18.	Standar Isi Pembelajaran	4	3,08%
19.	Standar Proses Pembelajaran	3	2,31%
20.	Standar Penilaian Pembelajaran	4	3,08%
Kriteria 7: Penelitian			
21.	Standar Isi Penelitian	1	0,91%
22.	Standar Proses Penelitian	1	0,91%
23.	Standar Penilaian Penelitian	2	1,82%
Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat			
24.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,43%
25.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	2	1,43%
26.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1	0,71%
Kriteria 9: Luaran Tri Dharma			
27.	Standar Kompetensi Lulusan	2	0,33%
28.	Standar Hasil Penelitian	4	0,67%
29.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	2	0,33%
Total		79	34,98%

BAB II

KONDISI INSTITUSI

2.1. Kondisi Internal

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi

1. Latar Belakang

IPDN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan di Indonesia. Sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, IPDN bertugas menyiapkan kader pemerintahan yang kompeten, berkarakter, dan berkepribadian. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) IPDN dirancang untuk mengoptimalkan peran tersebut, sejalan dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta IPDN. Penetapan VMTS mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pengembangan perguruan tinggi yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Tujuan penyusunan VMTS IPDN adalah sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi serta sebagai acuan strategis dalam mewujudkan visi besar IPDN. Untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya, penyusunan VMTS dilakukan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal mempertimbangkan berbagai peraturan institusional, seperti standar mutu pendidikan, dan rencana strategis jangka panjang. Sementara itu, analisis eksternal mengacu pada regulasi nasional terkait pendidikan tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan pendekatan ini, VMTS IPDN dapat mengakomodasi tuntutan perubahan serta kebutuhan pengembangan institusi yang adaptif dan inovatif.

Mekanisme penetapan VMTS dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Secara internal, pembentukan VMTS diketuai oleh rektor beserta jajaran akademik, sementara pemangku kepentingan eksternal meliputi asosiasi keilmuan, alumni, dan perwakilan pemerintah daerah. Proses penyusunannya mencakup pembentukan tim, koordinasi internal, konsultasi dengan pakar, serta revisi berkelanjutan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Rancangan akhir VMTS dikaji oleh Senat Institut

sebelum disahkan dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Dengan mekanisme yang terstruktur ini, VMTS IPDN diharapkan dapat terus menjadi acuan dalam mencetak kader pemerintahan yang berkualitas serta memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2. Kebijakan

Kebijakan VMTS IPDN meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 7) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN 2020-2045.

3. Strategi Pencapaian VMTS

Strategi pencapaian standar VMTS IPDN mencakup IKKS, dan IKKST.

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 4. Indikator Kinerja Kriteria Standar VMTS IPDN

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Jati Diri			
1.	Persentase Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas/Fakultas/Program Studi	100%	Melakukan evaluasi rutin terhadap visi, misi, dan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terkini

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			serta kebutuhan <i>stakeholders</i> .
2.	VMTS IPDN memenuhi kriteria PCMEA (<i>Periodic, Clear, Measurable, Easy to achieve, Appropriate</i>)	100%	Mengadakan rapat berkala untuk meninjau dan memastikan kriteria PCMEA terpenuhi, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
3.	Persentase pemahaman & internalisasi Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian oleh sivitas akademika	100%	Mengadakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.

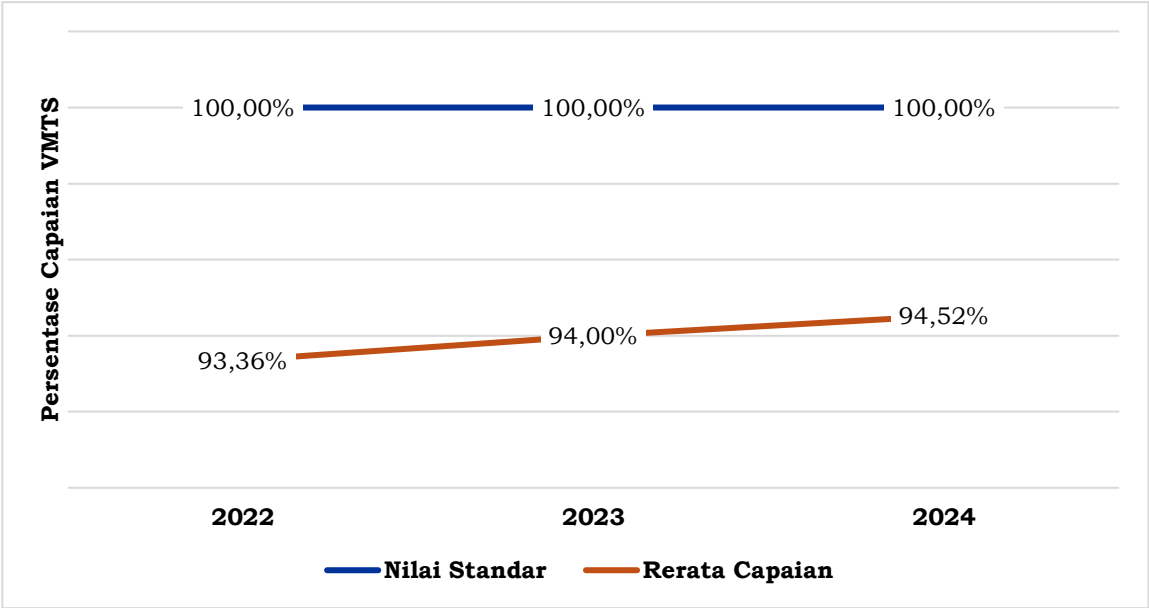
5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan VMTS IPDN

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Jati Diri			
1.	Persentase kegiatan sosialisasi, pembelajaran, pelatihan, pengasuhan, rapat pimpinan, dan kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pemahaman visi, misi, dan tujuan institusi.	100%	Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi, pembelajaran, pelatihan, pengasuhan, rapat pimpinan, dan kegiatan kemahasiswaan secara terstruktur dan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian VMTS

Pencapaian VMTS IPDN merupakan bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan. Untuk memastikan ketercapaian VMTS, diperlukan metode pengukuran yang tepat berdasarkan indikator kinerja utama dan tambahan, sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dengan akurat.



Gambar 3. Capaian Standar VMTS 2022-2024

Gambar 3 menunjukkan adanya peningkatan rerata capaian dari tahun 2022 hingga 2024, namun belum mencapai target ideal yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan persentase pemahaman dan internalisasi VMTS oleh sivitas akademika, alumni, pengguna lulusan, dan mitra yang masih berada di bawah standar yang diharapkan, terutama dalam keterlibatan alumni dan mitra eksternal. Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian ini meliputi kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan, minimnya keterlibatan alumni dalam penguatan pemahaman VMTS, serta belum optimalnya partisipasi pengguna lulusan dalam implementasi strategi. Selain itu, tantangan seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya mekanisme evaluasi berkelanjutan turut berkontribusi terhadap hambatan pencapaian. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan strategi komunikasi, penguatan keterlibatan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme internalisasi VMTS agar dapat lebih optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

Tabel 6. Evaluasi Ketercapaian dan Strategi Perbaikan VMTS IPDN

Masalah	Akar Masalah	Rencana Perbaikan
Pemahaman terhadap VMTS masih bervariasi, terutama di kalangan alumni dan pengguna lulusan	Minimnya sosialisasi dan keterlibatan alumni serta mitra dalam program penguatan VMTS	Peningkatan sosialisasi melalui seminar, diskusi akademik, serta integrasi VMTS dalam kurikulum dan kegiatan alumni

Tabel 6 menunjukkan pemosisian masalah dalam pencapaian VMTS IPDN, di mana kendala utama adalah rendahnya pemahaman dan internalisasi oleh pemangku kepentingan, dengan akar masalah berupa minimnya sosialisasi dan integrasi dalam berbagai aspek akademik dan kelembagaan, sehingga diperlukan strategi perbaikan seperti penguatan komunikasi, peningkatan keterlibatan alumni dan mitra, serta penyempurnaan kebijakan yang memastikan VMTS terimplementasi secara optimal.

2.1.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Latar Belakang

IPDN berkomitmen untuk menerapkan tata pamong dan tata kelola yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas. Sistem tata pamong IPDN mencerminkan struktur organisasi yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta proses manajemen risiko yang terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan institusi. Dengan prinsip *Good University Governance* (GUG), IPDN berupaya memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sivitas akademika, dan masyarakat. Tata pamong yang baik menjadi landasan dalam membangun sistem kepemimpinan yang responsif, kode etik akademik yang kuat, serta mekanisme pengelolaan institusi yang efektif untuk mencapai visi dan misi IPDN.

Sebagai institusi pendidikan tinggi kepomongprajaan, IPDN mengacu pada regulasi nasional dalam menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola. Dasar hukum yang digunakan mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta IPDN serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN. Struktur organisasi IPDN dipimpin oleh seorang Rektor dengan dukungan Wakil Rektor, Pengawas Mutu Internal, serta fakultas yang

menjalankan operasional akademik. Saat ini, IPDN memiliki tiga fakultas utama, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu juga menjadi bagian penting dalam menjamin standar akademik dan operasional institusi.

Untuk mendukung keberlanjutan tata kelola yang efektif, IPDN juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi dilakukan dengan institusi pemerintahan, lembaga akademik, serta pihak industri guna memperkuat aspek penelitian, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kapasitas kader pemerintahan. Kerja sama ini tidak hanya memperluas jaringan akademik IPDN tetapi juga memastikan relevansi pendidikan ke pamongpraja dengan kebutuhan aktual di lapangan. Dengan sistem tata pamong yang kokoh, kepemimpinan yang visioner, pengelolaan yang terencana, serta jaminan mutu yang terstruktur, IPDN terus berupaya menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

2. Kebijakan

Kebijakan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama IPDN meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 - 2029; dan
- 13) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
- Strategi pencapaian standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama IPDN mencakup IKKS, dan IKKST.

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 7. IKKS Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Tata Pamong			
1.	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek; (1) Kebijakan SPMI, (2) Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, (3) Standar dan/atau kriteria,	Tersedia	Melakukan pembaruan dokumen SPMI setiap periode, mengintegrasikan dengan peraturan terbaru, serta memastikan sosialisasi dan implementasi oleh seluruh unit akademik dan administratif.

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, (4)Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI dan (5) Perangkat SPMI.		
2.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> mencakup 5 aspek; (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, dan (5) berkeadilan.	Tersedia	Melaksanakan audit internal berkala, membangun sistem transparansi data akademik dan keuangan, serta mengadakan pelatihan kepemimpinan dan tata kelola bagi pimpinan institusi.
3.	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Tersedia	Menerapkan sistem pengawasan akademik yang ketat, termasuk penerapan anti-plagiarisme, peningkatan etika penelitian, dan penguatan peran komite akademik dalam menjaga kualitas pendidikan.
4.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	Tersedia	Melakukan evaluasi dan optimalisasi struktur organisasi setiap 4 tahun sekali, menyesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan serta memastikan adanya

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			dokumen pedoman kerja yang mudah diakses.
5.	Ketersediaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Tersedia	Memastikan keberlanjutan pelatihan etika akademik bagi dosen dan mahasiswa, serta membangun sistem pelaporan pelanggaran etika yang aman dan terpercaya.
6.	Ketersediaan bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman aspek; (1) Pendidikan, (2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) Kemahasiswaan, (4) Penelitian, (5) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), (6) Sumber Daya Manusia (SDM), (7) Keuangan, (8) Sarana dan prasarana, (9) Sistem penjaminan mutu, dan (10) Kerjasama.	Tersedia	Mengembangkan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan secara digital, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, dan memastikan keberlanjutan monitoring implementasi kebijakan oleh tim penjaminan mutu.
7.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Tersedia	Menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan visi dan misi institusi serta dapat diakses dengan mudah.
8.	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi	Tersedia	Menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	pelaksanaan program kemitraan		program kemitraan yang mencakup capaian dan rekomendasi perbaikan.
9.	Peringkat IPDN pada QS Ranking	551-602	Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional untuk meningkatkan daya saing akademik.
Standar Pengelolaan Pembelajaran			
10.	Persentase penyelenggaraan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	100%	Menyusun kurikulum berbasis capaian pembelajaran, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran, serta melibatkan <i>stakeholder</i> dalam validasi standar pendidikan.
11.	Persentase prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	100%	Menerapkan siklus evaluasi pembelajaran setiap semester, melibatkan Unit Penjaminan Mutu dalam proses monitoring, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
12.	Persentase jumlah prodi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.	100%	Menyediakan format standar pelaporan bagi setiap prodi, melakukan verifikasi laporan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, serta

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			mengintegrasikan hasil laporan dalam peningkatan kurikulum.
13.	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran	> 80%	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala, menindaklanjuti hasil survei dengan kebijakan yang meningkatkan kualitas pembelajaran, serta melibatkan mahasiswa dalam forum evaluasi akademik.
Standar Pengelolaan Penelitian			
14.	Lembaga Penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) selaras visi keilmuan, Renstra IPDN, dan arah kebijakan riset nasional.	100%	Menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan visi institusi, melibatkan dosen dalam penyusunan RIP, serta melakukan revisi berkala berdasarkan hasil penelitian yang berkembang.
15.	Lembaga Penelitian memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan sistem, pedoman, serta dukungan pendanaan terintegrasi.	100%	Menyediakan dana hibah penelitian, membangun sistem pemantauan berbasis digital, serta melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penelitian.

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
16.	Lembaga Penelitian melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian secara berkala untuk menjamin mutu dan ketercapaian hasil riset.	100%	Mendorong publikasi penelitian di jurnal terindeks, menyelenggarakan seminar ilmiah, serta menjalin kemitraan dengan industri untuk implementasi hasil penelitian.
Standar Pengelolaan PkM			
17.	LPM telah memiliki pedoman PkM.	100%	Menyusun pedoman PkM berbasis regulasi dan kebutuhan masyarakat, mengadakan sosialisasi pedoman kepada dosen dan mahasiswa, serta melakukan revisi berkala.
18.	LPM memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.	100%	Menyediakan hibah PkM, melakukan kunjungan lapangan untuk pemantauan, serta menyusun laporan evaluasi tahunan.
19.	LPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM.	100%	Memublikasikan hasil PkM dalam jurnal, mengadakan forum diskusi dengan mitra eksternal, serta mengintegrasikan hasil PkM ke dalam kebijakan institusi.
Standar Kerjasama			
20.	Peningkatan jumlah Implementasi MoU kerjasama Internasional per tahun.	5	Memperluas jejaring kerja sama dengan universitas luar negeri, mengadakan program pertukaran akademik, dan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			mengoptimalkan platform digital untuk memudahkan implementasi serta evaluasi MoU internasional.
21.	Pengembangan jumlah Kerjasama Tridharma PT lingkup Nasional per tahun.	50	Membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi nasional, menyelenggarakan program kolaborasi Tridharma, dan memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas serta transparansi kerja sama akademik.
Standar Daya Saing Internasional			
22.	IPDN mengembangkan kelas internasional berciri khas local wisdom kepomongprajaan melalui kurikulum berbasis nilai budaya Nusantara dan tata pemerintahan adaptif global.	0,05	Menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal yang dapat diadaptasi dalam kelas internasional, serta mengembangkan program studi berbasis budaya lokal.
23.	Setiap mahasiswa kelas internasional memiliki kemampuan bahasa Inggris (TOEFL $\geq$ 525) atau setara dengan standar internasional.	525	Menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris intensif, menyediakan akses ke tes TOEFL, serta mengintegrasikan pembelajaran bahasa dalam kurikulum.
24.	Terdapat pedoman resmi alih program bagi	Ada	Menyusun kebijakan alih program yang jelas, serta

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	mahasiswa kelas internasional dengan IPK < 3,00 dua semester berturut-turut ke program reguler.		memberikan bimbingan akademik bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik.
25.	Jumlah kerjasama dengan institusi asing.	Minimal 50 kerjasama	Mengembangkan jaringan kerja sama dengan universitas dan institusi asing melalui program akademik, penelitian, dan pertukaran mahasiswa.
26.	Kaprodi dan Dekan, dan berkewajiban mencari mitra.	Minimal 3 perguruan tinggi asing	Mendorong pimpinan akademik untuk aktif mencari mitra internasional melalui konferensi, seminar, dan forum akademik global.
27.	Jumlah mahasiswa asing dari populasi mahasiswa.	5%	Menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa asing, serta meningkatkan promosi internasional untuk menarik mahasiswa dari berbagai negara.
28.	Jumlah mahasiswa inbound dari perguruan tinggi luar negeri yang mengikuti program akademik/pertukaran di IPDN setiap tahun.	2%	Mengembangkan program pertukaran mahasiswa dengan universitas mitra, serta menyediakan fasilitas pendukung bagi mahasiswa inbound.
29.	Jumlah mahasiswa outbound dari jumlah mahasiswa.	2%	Meningkatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program studi di luar negeri melalui kerja sama dengan universitas internasional.

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
30.	Jumlah negara mahasiswa asing	3	Memperluas kerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keberagaman mahasiswa internasional.
31.	Jumlah dosen asing yang terlibat dalam tridharma di IPDN (pengajaran, riset, pembimbingan, kuliah umum).	$\leq 25 \%$	Merekrut dosen asing melalui program kerja sama akademik dan penelitian internasional.
32.	Setiap dosen minimal berpendidikan master dan jabfung lektor memiliki kemampuan bahasa Inggris.	Skor TOEFL 500	Menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi dosen, serta memberikan insentif bagi mereka yang meningkatkan kompetensi bahasa.
33.	Setiap dosen memiliki Indeks Kepuasan Mengajar.	3,25	Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen, serta memberikan pelatihan pedagogik bagi dosen.
34.	Setiap program studi IPDN memiliki minimal satu dosen asing yang berkontribusi pada kegiatan tridharma atau kurikulum internasional.	Minimal 1 orang/semester	Mengembangkan program visiting professor dan kerja sama akademik dengan dosen asing.
35.	Jumlah keanggotaan profesi di tingkat internasional.	Minimal 1 keanggotaan	Mendorong dosen untuk bergabung dalam organisasi profesi internasional melalui dukungan institusi.

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
36.	Jumlah kegiatan internasional per tahun.	2	Menyelenggarakan seminar, konferensi, dan workshop internasional secara rutin.
37.	Jumlah dosen yang menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional.	Minimal 2 Dosen	Memberikan dukungan bagi dosen untuk aktif dalam organisasi profesi internasional.
38.	IPDN memperoleh dan mempertahankan akreditasi/sertifikasi internasional pada program studi dari lembaga bereputasi dunia (AUN-QA, FIBAA, AQAS, ABET, dll.).	1	Mengajukan program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui lembaga akreditasi global.

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 8. IKKST Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Pamong dan Tata Kelola			
1.	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek: (1) Visi dan Misi Perguruan Tinggi, (2) Analisis Lingkungan, (3) Tujuan dan Sasaran Strategis, (4) Program dan Kegiatan, dan (5) Indikator Kinerja.	Tersedia	Melaksanakan pembaruan dan penyelarasan dokumen strategis setiap tahun, serta memastikan sosialisasi dan implementasi kepada seluruh unit akademik dan administratif.

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
2.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Tersedia	Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen secara berkala dengan agenda evaluasi kualitas akademik dan peningkatan proses perbaikan berkelanjutan.
3.	Persentase unit kerja memiliki sertifikat ISO sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga nasional atau internasional bereputasi.	25%	Mengembangkan sistem audit internal untuk memastikan kesiapan unit kerja dalam mendapatkan sertifikasi ISO, serta memberikan dukungan administratif untuk proses sertifikasi dan akreditasi eksternal.
4.	Persentase akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi / Prodi yang sudah memiliki lulusan harus memperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.	100%	Mengoptimalkan sistem evaluasi kurikulum, meningkatkan keterlibatan program studi dalam kerja sama akademik internasional, serta menyediakan pendampingan akreditasi bagi prodi.
5.	Ketersediaan bukti yang sah terhadap pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi / Wajar Tanpa Persyaratan.	Tersedia	Menyelenggarakan audit keuangan tahunan dengan melibatkan auditor independen dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana perguruan tinggi.
6.	Persentase program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi	100%	Memperkuat sistem penjaminan mutu internal, menyediakan pelatihan

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	Mandiri (LAM) / Prodi yang sudah memiliki lulusan harus memperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.		bagi prodi dalam penyusunan dokumen akreditasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan data akademik dalam proses evaluasi akreditasi.
7.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Tersedia	Mengembangkan strategi kerja sama aktif dengan mitra akademik dan industri, memanfaatkan platform digital untuk monitoring evaluasi kepuasan mitra, serta menyusun kebijakan kemitraan yang relevan dengan kebutuhan institusi.
8.	Ketersediaan dokumen hasil analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek; (1) capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian	Tersedia	Menyusun laporan analisis capaian kinerja dengan metode evaluasi berbasis data untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.		
9.	Ketersediaan dokumen efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi aspek: (1) keberadaan dokumen formal standar mutu, (2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, (3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan (4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Tersedia	Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penjaminan mutu dan menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan.
10.	Persentase Dosen dengan Nilai SFQ $\geq 80\%$	80%	Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi dosen untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan interaksi dengan mahasiswa.
Standar Pengelolaan Pembelajaran			
11.	Persentase tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran.	> 80%	Melakukan survei kepuasan dosen, menindaklanjuti temuan dengan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dosen, serta memperbaiki sistem pembelajaran berdasarkan masukan dosen.

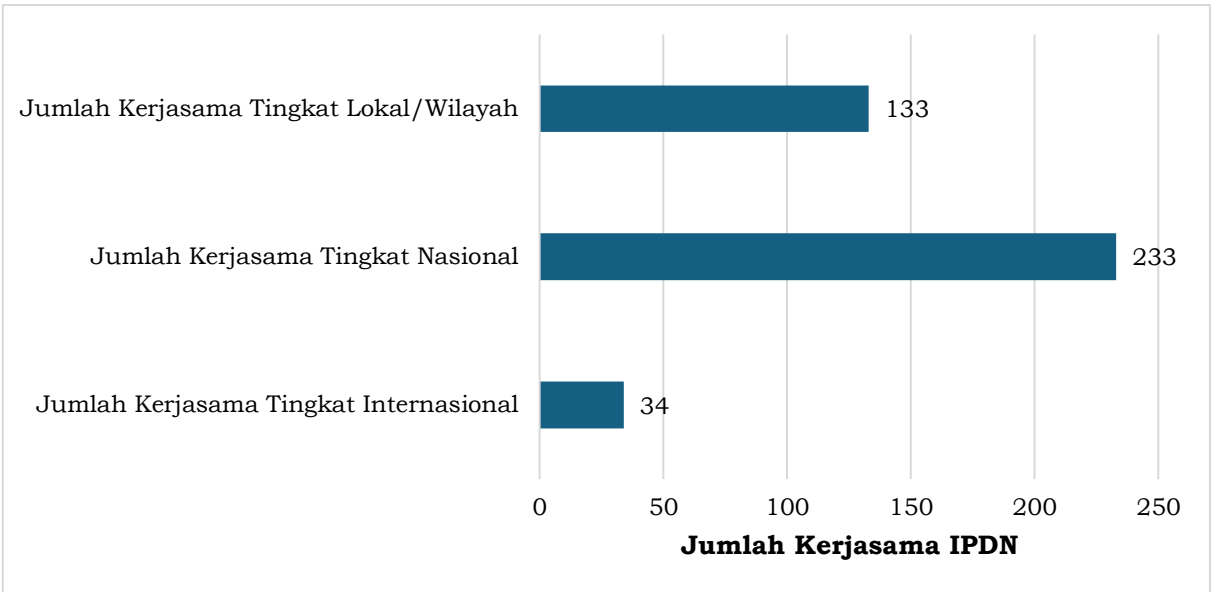
No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
12.	Persentase jumlah Unit Penjaminan mutu setiap semester melakukan monev kegiatan pembelajaran.	100%	Menetapkan jadwal monev yang konsisten, menggunakan instrumen evaluasi berbasis standar, serta menyusun laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan.
13.	Persentase jumlah Unit Penjaminan Mutu setiap semester melakukan pelaporan hasil monev kepada rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu.	100%	Menyusun format pelaporan yang sistematis, mengadakan pertemuan berkala dengan pimpinan, serta mengintegrasikan hasil evaluasi dalam pengambilan kebijakan akademik.
Standar Pengelolaan Penelitian			
14.	IPDN melalui LP3MI melakukan dan mengevaluasi kinerja penelitian setahun sekali.	100%	Menyusun indikator evaluasi kinerja LP3MI, melakukan kajian efektivitas penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja.
Standar Pengelolaan PkM			
15.	Lembaga penelitian memfasilitasi diseminasi dan evaluasi tahunan penelitian untuk menilai kinerja, publikasi, dan dampak hasil riset IPDN.	100%	Mengadakan evaluasi berbasis capaian kinerja, melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal dalam penilaian, serta mengimplementasikan hasil evaluasi dalam perbaikan kebijakan PkM.

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Kerjasama			
16.	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan media massa lokal dan nasional per tahun.	4	Meningkatkan publikasi akademik dan kegiatan institusi melalui kerja sama dengan media massa, serta mengadakan konferensi pers dan diskusi publik.
17.	Peningkatan Implementasi MoU kerjasama Internasional.	5	Memastikan MoU yang telah ditandatangani diimplementasikan melalui program pertukaran akademik, penelitian bersama, dan kolaborasi proyek internasional.
18.	Adanya pedoman kerjasama dan mekanisme monev pertahun.	Ada	Menyusun pedoman kerja sama yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap efektivitas kerja sama yang telah dijalankan.
Standar Daya Saing Internasional			
19.	IPDN melaksanakan program <i>joint degree/double degree</i> dengan universitas mitra internasional yang termasuk dalam Top 1200 QS/THE Ranking.	0,4%	Mengembangkan program <i>joint degree</i> dengan universitas terkemuka dunia.
20.	Persentase mata kuliah per program studi diajarkan dalam bahasa Internasional.	50%	Menyediakan kurikulum berbasis bahasa internasional dan meningkatkan kompetensi dosen dalam pengajaran multibahasa.

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
21.	Pembelajaran menggunakan referensi bahasa asing.	Minimal 50 %	Mengintegrasikan referensi internasional dalam kurikulum dan menyediakan akses ke jurnal serta buku berbahasa asing.
22.	IPDN menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Internasional bersama institusi luar negeri bereputasi melalui <i>joint class, credit transfer, atau exchange program</i> .	Top 1200 dunia	Mengembangkan kerja sama dengan universitas top dunia untuk menyelenggarakan kelas internasional.
23.	Muatan kurikulum berisi kajian lokal, nasional, dan global.	Sesuai	Menyusun kurikulum yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional.
24.	Proses belajar mengajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa Perserikatan Bangsa Bangsa.	Sesuai	Menyediakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing.
25.	Pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional.	Minimal 1 semester	Mengembangkan program kelas internasional dengan durasi minimal satu semester.
26.	Ada pedoman credit transfer untuk mata kuliah yang telah ditempuh di IPDN atau di Mitra.	Ada	Menyusun kebijakan credit transfer yang jelas dan fleksibel.
27.	Ada kebijakan dan pedoman untuk	Ada	Menyediakan layanan akademik dan administratif

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	pelayanan bagi mahasiswa yang akan seat-in di PT mitra.		bagi mahasiswa yang mengikuti program seat-in.
28.	Jumlah paper terindeks SCOPUS dan atau Thomson 7 artikel/dosen/ 5 tahun.	3	Mendorong publikasi ilmiah dosen melalui insentif dan dukungan penelitian.
29.	Jumlah publikasi SCOPUS per dosen per 5 tahun.	1,5 artikel	Menyediakan dana penelitian dan akses ke jurnal internasional bagi dosen.
30.	Karya akademik dosen dan mahasiswa disitasi.	Minimal 6 sitasi/paper	Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi agar lebih banyak disitasi.
31.	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS.	6 sitasi	Mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang dapat disitasi secara luas.

6. Evaluasi Capaian Kinerja



Gambar 4. Jumlah Kerjasama IPDN

Gambar 4 menunjukkan kerja sama yang dijalin oleh IPDN dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri, memberikan peluang strategis dalam pengembangan akademik dan institusi. Kolaborasi ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik serta memastikan relevansi program pendidikan IPDN dengan kebutuhan nasional maupun global. Dengan kerja sama yang terus diperluas, IPDN berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya dan memperkuat jaringan akademik yang mendukung inovasi dalam sistem pendidikan kepamongprajaan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap menjadi bagian integral dari strategi IPDN dalam menjamin keberlanjutan pencapaian kinerja institusi secara optimal.

Tabel 9. Evaluasi Ketercapaian dan Strategi Perbaikan Standar Tata Pamong, Tata kelola, dan Kerja sama

Masalah	Akar Masalah	Rencana Perbaikan
Tata Pamong belum optimal dalam mendukung GUG	Struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan belum sepenuhnya efisien	Penyempurnaan sistem tata pamong berbasis manajemen risiko untuk menjamin keberlanjutan institusi
Koordinasi antar unit kerja belum maksimal	Kurangnya sinergi antara core unit dan supporting unit serta birokrasi yang masih kompleks	Optimalisasi jalur komunikasi dan koordinasi dengan memanfaatkan teknologi digital serta sistem <i>paperless</i>
Sistem kepemimpinan perlu lebih responsif	Mekanisme pemantauan kinerja pimpinan belum sistematis	Implementasi sistem evaluasi kinerja pimpinan secara berkala dengan berbasis indikator keberhasilan
Kode etik akademik perlu diperkuat	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi kode etik	Peningkatan pengawasan dan pelatihan terkait etika akademik bagi seluruh sivitas akademika

Masalah	Akar Masalah	Rencana Perbaikan
Penjaminan mutu masih memiliki tantangan dalam implementasi yang konsisten	Standar mutu sudah ditetapkan, tetapi belum dilaksanakan secara merata	Peningkatan sosialisasi serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan standar mutu di setiap unit kerja
Kerja sama akademik belum sepenuhnya mendukung peningkatan daya saing institusi	Kerja sama internasional masih terbatas dan belum mencakup berbagai aspek pendidikan	Ekspansi kerja sama internasional dalam bidang riset, pengabdian, dan inovasi/kewirausahaan
Kurangnya keterlibatan mitra eksternal dalam tata kelola institusi	Belum ada mekanisme yang sistematis untuk melibatkan mitra dalam pengembangan institusi	Penguatan hubungan dengan mitra strategis melalui program kolaboratif dan forum konsultasi kebijakan

Tabel 9 menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi IPDN dalam penerapan tata pamong, tata kelola, dan kerja sama, serta akar masalah yang menyebabkan kendala tersebut. Meskipun IPDN telah menerapkan prinsip GUG, efektivitas koordinasi antar unit masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatasi kompleksitas birokrasi dan memastikan kepemimpinan yang lebih responsif. Selain itu, standar penjaminan mutu perlu diterapkan secara lebih konsisten agar dapat meningkatkan transparansi dan kualitas akademik secara menyeluruh. Dalam aspek kerja sama, keterlibatan mitra eksternal dan perluasan jaringan internasional masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Sebagai langkah perbaikan, IPDN merencanakan optimalisasi sistem komunikasi berbasis teknologi, peningkatan evaluasi kinerja pimpinan, serta perluasan kerja sama akademik dan penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.1.3. Mahasiswa

1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari perguruan tinggi, IPDN berkomitmen dalam mencetak kader pemerintahan yang kompeten, berkarakter, dan

berkepribadian. IPDN menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan, magister terapan, doktor, serta program profesi kepamongprajaan (PPKp) untuk membekali mahasiswa dengan ilmu pemerintahan yang teoretis maupun terapan. Dalam konteks pendidikan di IPDN, istilah “Praja” digunakan untuk mahasiswa program sarjana terapan, sedangkan mahasiswa program magister, doktor, dan profesi PPKp tetap disebut mahasiswa. Penetapan standar perguruan tinggi bagi mahasiswa sangat penting guna memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Standar tersebut mencakup sistem seleksi yang ketat serta layanan mahasiswa yang mendukung pengembangan akademik dan karakter individu.

Sistem seleksi mahasiswa IPDN diselenggarakan secara terbuka dan transparan guna menjaring sumber daya manusia berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Seleksi calon praja dilakukan secara nasional bersamaan dengan sekolah kedinasan lain, mengikuti kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan hanya calon praja terbaik yang diterima berdasarkan prinsip kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah. Proses seleksi mencakup beberapa tahapan, seperti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tes kesehatan, tes psikologi integritas, dan kejujuran, serta pantukhir, yang semuanya menggunakan sistem gugur. Mahasiswa program magister dan doktor menjalani seleksi yang berbeda, yaitu melalui ujian berbasis online dan wawancara. Sementara itu, mahasiswa PPKp mengikuti pendaftaran tahunan dengan masa studi selama empat bulan.

Selain sistem seleksi yang ketat, IPDN juga menyediakan berbagai layanan bagi praja dan mahasiswa guna mendukung pembelajaran serta pengembangan keterampilan. Layanan tersebut meliputi tutorial akademik, pengembangan nalar, dan peningkatan *soft skills* yang diperlukan dalam pemerintahan. Selain itu, IPDN juga memberikan layanan konseling pribadi dan sosial, layanan kesehatan, serta informasi beasiswa dan bimbingan karier. Keseluruhan layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun non-akademik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam bidang pemerintahan setelah menyelesaikan pendidikan di IPDN.

2. Kebijakan

Kebijakan tentang kemahasiswaan di IPDN mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintah Dalam Negeri;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar PNS TA 2023;
- 8) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/5471/SJ tanggal 14 September 2022 tentang Pendaftaran dan Pelaksanaan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 9) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar mahasiswa IPDN mencakup Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS), dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 10. Indikator Kinerja Kriteria Standar Mahasiswa

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Mahasiswa			
1.	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi	100%	

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
2.	Jumlah prestasi Akademik mahasiswa tingkat internasional, nasional atau regional per prodi per tahun.	Regional: 15 Nasional: 50 Internasional: 5	Peningkatan dukungan terhadap kompetisi akademik, penyediaan pelatihan intensif, serta penguatan kerja sama dengan lembaga penyelenggara kompetisi
3.	Jumlah prestasi Non akademik mahasiswa tingkat internasional, nasional atau regional per prodi per tahun	Regional: 15 Nasional: 50 Internasional: 5	Penguatan program ekstrakurikuler, peningkatan akses terhadap kompetisi non-akademik, serta optimalisasi pembinaan <i>soft skills</i>
4.	Kepuasan mahasiswa atas layanan dalam bidang (1) pengajaran (2) bimbingan dan konseling, (3) minat dan bakat, (4) pembinaan <i>soft skills</i> , (5) beasiswa, dan (6) kesehatan	90%	Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan pelatihan bagi staf, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penilaian rutin untuk memastikan kepuasan mahasiswa tercapai
5.	Rasio jumlah pendaftar dan lulus seleksi <i>Passing grade</i>	25	Meningkatkan proses seleksi dengan sistem yang transparan dan objektif, serta mempromosikan program studi secara luas untuk menarik lebih banyak pendaftar berkualitas
6.	Persentase jumlah mahasiswa baru yang registrasi dan lulus seleksi dibandingkan dengan kuota nasional	03:01	Memastikan proses registrasi yang efisien dan memberikan informasi yang jelas kepada calon

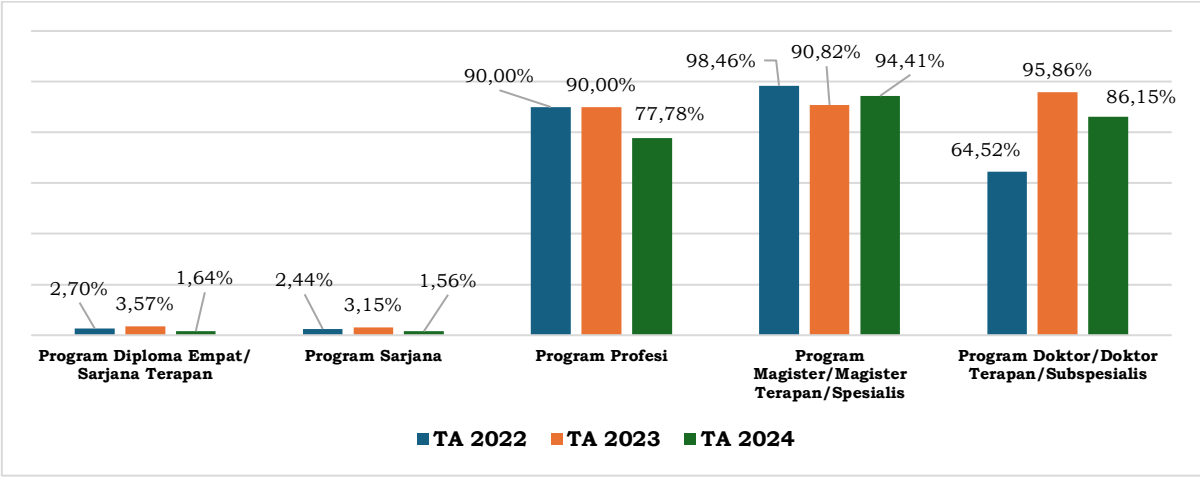
No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		mahasiswa mengenai prosedur pendaftaran
7.	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap total mahasiswa IPDN (target minimal 0,5%) melalui program kelas internasional, <i>short course</i> , atau <i>joint class</i>	0,5%	Meningkatkan program internasionalisasi, menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri, dan memberikan layanan khusus bagi mahasiswa asing
8.	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa aktif (<i>student body</i>) dibandingkan dengan tahun akademik sebelumnya, berdasarkan data resmi registrasi IPDN	10%	Meningkatkan jumlah kegiatan yang melibatkan <i>student body</i> , seperti klub dan organisasi, serta menyediakan fasilitas yang mendukung partisipasi mahasiswa
9.	Tingkat pelaksanaan dan efektivitas <i>tracer study</i> lulusan IPDN, mencakup proporsi responden, waktu pelacakan, dan pemanfaatan hasilnya	100%	Melaksanakan <i>tracer study</i> secara berkala untuk semua lulusan dan menganalisis hasilnya untuk perbaikan program akademik
10.	Pelaksanaan survey pengguna lulusan (<i>user study</i>) terhadap instansi pusat dan daerah pengguna alumni IPDN	50%	Melakukan <i>user study</i> untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan pengguna, serta menggunakan hasilnya untuk meningkatkan kualitas layanan

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 11. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan Mahasiswa

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Mahasiswa			
1.	Persentase mahasiswa yang melaksanakan transfer <i>credit/credit earning/dual degree/Joint degree</i> di luar negeri terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun	4	
2.	Pengembangan Sistem Informasi lulusan	100%	

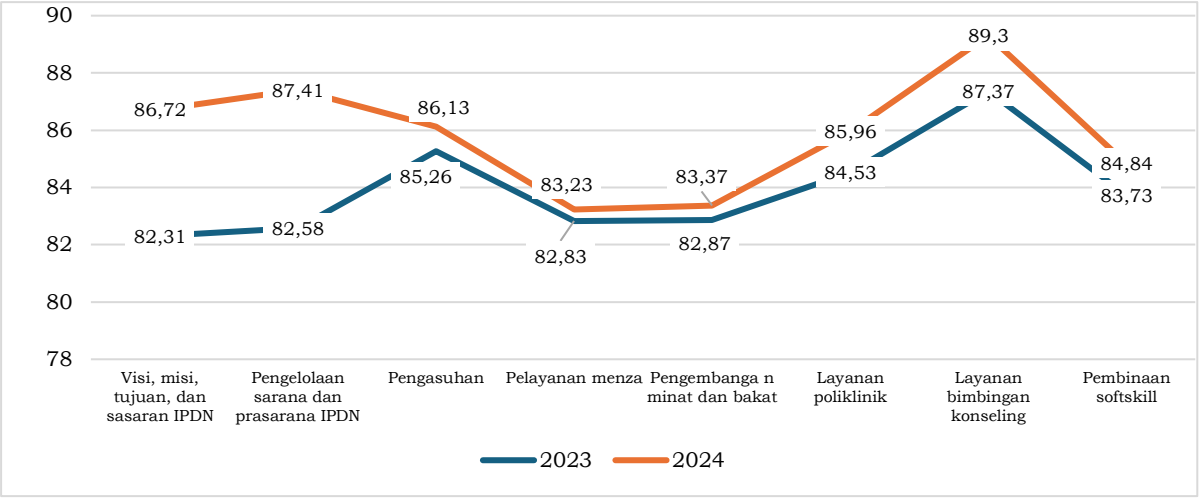
6. Evaluasi Capaian Kinerja



Gambar 5. Persentase Seleksi Mahasiswa Baru IPDN

Evaluasi pencapaian kinerja mahasiswa IPDN menunjukkan bahwa tingginya minat pendaftar, yang mencapai puluhan ribu setiap tahun. Berbanding terbalik dengan daya tampung yang sangat terbatas, terutama pada Program Sarjana dan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan. Tingkat seleksi yang sangat ketat memastikan hanya calon mahasiswa terbaik yang diterima, sehingga mendukung pencapaian standar akademik yang tinggi, namun juga menjadi tantangan bagi banyak pendaftar yang tidak lolos seleksi. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah seperti persaingan yang semakin tinggi dan keterbatasan kapasitas institusi, serta faktor pendukung keberhasilan seperti sistem seleksi berbasis kompetensi yang terukur dengan tindak lanjut institusi berupa kajian terhadap kemungkinan peningkatan daya tampung dan penyempurnaan

sistem seleksi agar tetap menjamin kualitas lulusan tanpa mengurangi standar akademik yang telah ditetapkan.



Gambar 6. Tingkat kepuasan praja/mahasiswa IPDN 2023-2024

Gambar 6 menunjukkan perbandingan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan IPDN dalam dua tahun terakhir berdasarkan delapan kriteria utama, dengan dua garis warna berbeda yang mewakili masing-masing tahun serta angka kepuasan berkisar antara 82,31 hingga 89,3, menjadi bukti kuantitatif terhadap perubahan tingkat kepuasan dan dasar bagi institusi untuk melakukan evaluasi serta peningkatan layanan guna mencapai kepuasan mahasiswa yang lebih optimal.

2.1.4. Sumber Daya Manusia

1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi sebuah organisasi, termasuk IPDN yang menetapkan standar khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan guna memastikan kualitas serta kompetensi yang sesuai kebutuhan. Standar ini diatur dalam Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang mencakup aspek kualifikasi, kompetensi, beban kerja, serta proporsi SDM berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan utama dari penetapan standar ini adalah memperoleh tenaga akademik dan administratif yang profesional, sehingga mampu menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, serta administrasi di lingkungan IPDN secara optimal.

Secara rasional, mekanisme perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di IPDN dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan pemerintah terkait manajemen pegawai negeri. Perekrutan dilakukan melalui seleksi CPNS yang diajukan kepada Kemendagri atau seleksi internal yang mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang memungkinkan PNS berpendidikan S2 menjadi dosen IPDN, sementara tenaga kependidikan dapat direkrut dari masyarakat umum dan diangkat sebagai tenaga honor dengan keputusan Rektor. Pengelolaan SDM juga mencakup pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan kursus sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menjamin efektivitas sistem SDM, IPDN melakukan pemantauan kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui aplikasi digital seperti *sikerja*, *fingerprint*, serta aplikasi *sister* yang mencatat laporan beban kerja dosen setiap semester. Selain itu, penghargaan diberikan kepada pegawai berprestasi dalam acara Dies Natalis berupa sertifikat dan cendera mata, sementara sanksi diberikan bagi pelanggaran tertentu seperti penjualan buku kepada praja. Pemutusan hubungan kerja bagi pegawai PNS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan tenaga honorer dapat dihentikan melalui pemutusan kontrak kerja. Meskipun jumlah SDM di IPDN telah mencukupi, tantangan masih ada dalam pendistribusian yang belum optimal serta kekurangan tenaga laboran untuk pengelolaan laboratorium di berbagai program studi.

2. Kebijakan

SDM IPDN diatur dalam kebijakan nasional hingga kebijakan universitas. Kebijakan yang melandasi SDM IPDN, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 8) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Sipil Negara; dan
- 9) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar SDM IPDN meliputi IKKS, dan IKKST.

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 12. Indikator Kinerja Kriteria Standar Sumber Daya Manusia

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1.	Rasio dosen dan mahasiswa	1:30	Menjaga rasio dosen dan mahasiswa dengan merekrut dosen baru sesuai kebutuhan, memastikan beban mengajar yang proporsional.
2.	Persentase dosen dengan gelar doktor terhadap jumlah dosen program studi	50%	Mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang doktor melalui beasiswa dan program pengembangan akademik.
3.	Persentase dosen bersertifikat profesi Pendidik (serdos)	80%	Memfasilitasi sertifikasi profesi bagi dosen melalui pelatihan dan pendampingan.
4.	Persentase pembimbing utama yang menghasilkan karya ilmiah dalam 5 tahun terakhir di jurnal	100%	Meningkatkan dukungan penelitian, akses jurnal, dan insentif publikasi bagi dosen pembimbing utama.

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi		
5.	Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional/internasional	50%	Mendorong dosen untuk aktif dalam organisasi akademik dan profesi, serta mengikuti konferensi ilmiah
6.	Persentase dosen mampu menggunakan media pembelajaran	95%	Menyelenggarakan pelatihan teknologi pembelajaran dan menyediakan platform digital yang mendukung pengajaran
7.	Persentase dosen bersertifikat kompetensi yang relevan	70%	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen melalui pelatihan dan uji kompetensi
8.	Jumlah dosen dengan jabfung Guru Besar	10%	Meningkatkan jumlah Guru Besar melalui program percepatan jabatan akademik
9.	Jumlah dosen dengan jabfung Lektor Kepala	20%	Mendorong dosen untuk memenuhi syarat jabatan Lektor Kepala melalui publikasi dan pengabdian masyarakat
10.	Persentase dosen menjalankan tugas pokok, tambahan, dan penunjang	90%	Memastikan keseimbangan beban kerja dosen melalui sistem monitoring dan evaluasi
11.	Persentase jumlah prodi minimal memiliki 6 dosen tetap	100%	Merekrut dosen tetap sesuai kebutuhan program studi dan memastikan keberlanjutan DTPS
Standar Peneliti			
12.	Persentase dosen melakukan penelitian setiap tahun	100%	Memberikan insentif penelitian dan akses ke sumber daya penelitian yang memadai

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Pelaksana PkM			
13.	Persentase dosen melakukan PkM setiap tahun	75%	Mendorong dosen untuk aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program institusi dan kolaborasi eksternal

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 13. IKKST Sumber Daya Manusia

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1.	Persentase tenaga kependidikan pendidikan minimal S1	70%	Mengupayakan peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan melalui program pendidikan lanjut dan beasiswa
2.	Persentase jumlah prodi memiliki laboran	80%	Merekrut tenaga laboran sesuai kebutuhan dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan
3.	Jumlah pustakawan tingkat fakultas yang terlatih dengan sertifikat	1	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi pustakawan fakultas
4.	Persentase tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai pekerjaan	60%	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan uji kompetensi
Standar Peneliti			
5.	Persentase dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun	50%	Memberikan dukungan bagi dosen untuk menjadi ketua peneliti melalui program hibah dan kolaborasi penelitian

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Pelaksana PkM			
6.	Persentase dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana PkM setiap tahun	50%	Mendorong dosen untuk aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program institusi dan kolaborasi eksternal

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan jumlah dosen bersertifikasi, tetapi ada tantangan dalam mendorong lebih banyak dosen mencapai jabatan fungsional yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala dan Guru Besar. Analisis terhadap capaian kinerja dalam pencapaian standar institusi dilakukan dengan metode yang tepat untuk mengukur efektivitas kebijakan akademik terkait jabatan fungsional dosen.

Tabel 14. Jumlah dosen berdasarkan jabatan Fungsional

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik				Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	
1.	Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis	22	58	69	150	150
2.	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	0	2	87	109	109
3.	Profesi	0	0	0	0	0
Jumlah		22	58	156	21	257

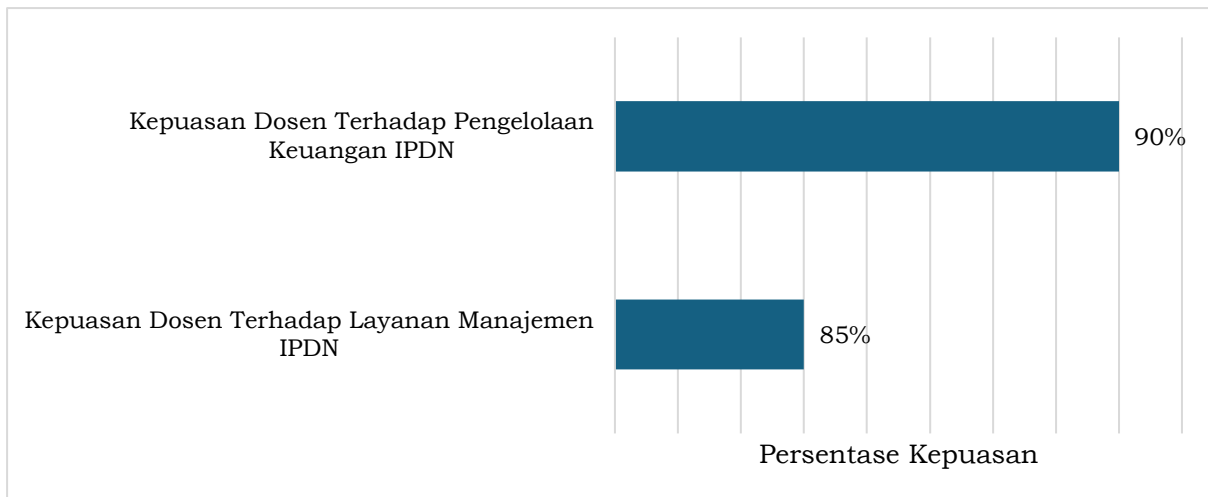
Tabel 14 menunjukkan kualifikasi dan perkembangan karir dosen IPDN, mayoritas dosen dengan gelar Doktor dan Magister menduduki jabatan akademik yang sesuai dengan kualifikasi mereka, sementara proporsi dosen yang mencapai jabatan Guru Besar masih perlu ditingkatkan; identifikasi akar masalah, seperti keterbatasan kesempatan untuk memperoleh kenaikan jabatan, serta faktor pendukung keberhasilan, seperti peningkatan jumlah dosen berkualifikasi tinggi, menjadi poin penting dalam evaluasi kinerja, sedangkan faktor penghambat ketercapaian standar meliputi kebijakan promosi jabatan dan persyaratan administrasi yang kompleks, sehingga

tindak lanjut yang akan dilakukan institusi mencakup optimalisasi program pengembangan karir dosen serta penyederhanaan prosedur untuk mendukung akselerasi pencapaian jabatan akademik yang lebih tinggi.

Tabel 15. Jumlah Dosen Tersertifikasi pada IPDN

No.	UPPS	Jumlah Dosen	Jumlah Dosen Bersertifikat**)
1.	Fakultas Politik Pemerintahan	74	55
2.	Fakultas Manajemen Pemerintahan	101	79
3.	Fakultas Perlindungan Masyarakat	59	49
4.	Sekolah Pascasarjana	17	17
5.	Program Profesi Kepamongprajaan	6	1
Jumlah		257	201

Tabel 15 menunjukkan jumlah dosen yang tersertifikasi di IPDN, analisis terhadap capaian kinerja dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai efektivitas program sertifikasi dosen, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa proporsi dosen yang telah tersertifikasi mengalami peningkatan seiring dengan upaya institusi dalam mendorong pengembangan profesionalisme akademik, identifikasi akar masalah, seperti tantangan administratif dan kesiapan dosen dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, serta faktor pendukung keberhasilan, seperti pelatihan yang sistematis dan dukungan kebijakan kelembagaan, menjadi aspek penting dalam analisis kinerja, sementara itu, faktor penghambat ketercapaian standar meliputi keterbatasan akses terhadap program pelatihan serta kompleksitas proses sertifikasi, sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan institusi mencakup optimalisasi program pendampingan bagi dosen serta peningkatan efisiensi prosedur sertifikasi untuk memastikan peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi.



Gambar 7. Kepuasan Dosen terhadap layanan SDM

2.1.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Latar Belakang

IPDN memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas operasional, pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana menjadi aspek fundamental yang harus diatur dengan baik. Transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran berperan penting dalam menjamin keberlanjutan program akademik dan administrasi, sementara pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, IPDN menetapkan standar yang mencakup sistem keuangan serta infrastruktur guna menciptakan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

Penetapan standar pengelolaan keuangan di IPDN bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan dana institusi. Dengan sistem perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan yang terstruktur, IPDN dapat memastikan bahwa alokasi dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan akademik serta operasional, meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas teknologi informasi, bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu menjamin pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kegiatan akademik dan administrasi secara maksimal. Standar ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi institusi dan memastikan bahwa fasilitas yang tersedia selalu dalam kondisi optimal.

Mekanisme penetapan standar dilakukan dengan merancang kebijakan internal yang sejalan dengan regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 dan Peraturan Rektor ini. Proses pengelolaan keuangan melibatkan penyusunan anggaran berbasis kebutuhan, distribusi dana secara efektif, serta pelaporan berkala untuk memastikan transparansi dan akurasi penggunaan anggaran. Audit internal dan eksternal dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Di sisi lain, standar pengelolaan sarana dan prasarana mencakup pengadaan fasilitas yang sesuai kebutuhan, pemeliharaan berkala, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan, serta perbaikan berkelanjutan. Dengan penerapan mekanisme ini, IPDN dapat memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan dengan baik, serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara keseluruhan.

2. Kebijakan

Kebijakan tentang Keuangan, Sarana, dan Prasarana IPDN mencakup:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- 9) Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.02/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 14) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Honorarium Bagi Tenaga Pendidik;
- 15) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- 16) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Smart Campus Database;
- 17) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 18) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020-2045; dan
- 19) Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 700.1 – 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Manajemen Risiko di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana IPDN meliputi IKKS, dan IKKST.

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 16. IKKS Keuangan, Sarana, dan Prasarana

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
1.	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, berkualitas, dan terawat	85%	Meningkatkan pemeliharaan fasilitas, survei kepuasan berkala, dan investasi dalam infrastruktur
2.	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	50%	Standarisasi fasilitas laboratorium, sertifikasi berkala, dan peningkatan kualitas alat praktikum
3.	Persentase ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa.	100%	Penyediaan ruang ujian sesuai standar, pemeliharaan fasilitas, dan optimalisasi jadwal penggunaan
4.	Persentase gedung dilengkapi dengan sistem untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, petir, dan kecelakaan kerja	100%	Pemasangan alat keselamatan, pelatihan evakuasi, dan inspeksi berkala
5.	Persentase gedung dilengkapi dengan peringatan bahaya dan jalur evakuasi bagi pengguna	100%	Penyediaan jalur evakuasi yang jelas, simulasi keselamatan, dan sosialisasi prosedur darurat
6.	Persentase progran studi memiliki koleksi pustaka/jurnal/prosiding dengan jumlah yang memadai	100%	Pengadaan pustaka berkala, kerja sama dengan penerbit, dan akses ke jurnal internasional
7.	Persentase jumlah kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan	100%	Pemeliharaan fasilitas kelas, penyediaan alat pembelajaran, dan monitoring penggunaan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)		
8.	Persentase ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari	100%	Penyediaan alat praktikum berkualitas, pemeliharaan berkala, dan evaluasi kebutuhan
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
9.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ praja pertahun	85%	Perencanaan anggaran yang efektif, optimalisasi penggunaan dana, pelaporan transparan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
10.	Persentase UPPS/Fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan	100%	Penyusunan rencana strategis, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi berkala

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di IPDN dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur		
11.	IPDN menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap awal tahun akademik	1	Penyusunan RAPB berbasis kebutuhan, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala
12.	Jumlah pelaksanaan Audit keuangan IPDN oleh auditor internal Setiap semester	1	Pelaksanaan audit internal berkala, evaluasi hasil audit, dan perbaikan sistem keuangan
13.	Jumlah pelaksanaan Audit keuangan IPDN oleh auditor eksternal Setiap tahun	1	Audit eksternal oleh lembaga independen, transparansi laporan keuangan
Standar Sarana Prasarana Penelitian			
14.	Persentase Prodi memiliki laboratorium untuk riset	100%	Pengadaan fasilitas riset, peningkatan kualitas laboratorium, dan kerja sama penelitian
15.	Persentase sarana prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	100%	Standarisasi fasilitas penelitian, inspeksi berkala, dan peningkatan kualitas lingkungan kerja
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
16.	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari APBN untuk penelitian	5%	Optimalisasi anggaran penelitian, peningkatan efektivitas penggunaan dana

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Sarana dan Prasarana PkM			
17.	Persentase Prodi memiliki laboratorium untuk PkM	100%	Penyediaan laboratorium sesuai kebutuhan program studi, pemeliharaan berkala
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM			
18.	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari APBN untuk	1%	Optimalisasi anggaran PkM, peningkatan efektivitas program pengabdian

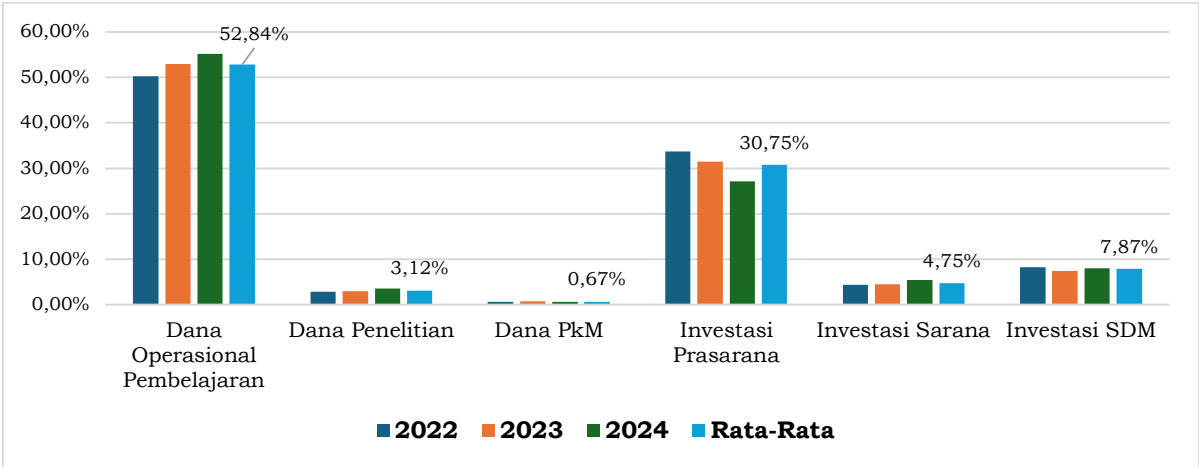
5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 17. IKKST Keuangan, Sarana, dan Prasarana

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
1.	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari jumlah mahasiswa per tahun	75%	Optimalisasi koleksi pustaka, peningkatan layanan digital, dan promosi literasi akademik
2.	Persentase gedung dengan cakupan layanan internet/wifi (standarisasi fasilitas di dalam dan luar gedung)	100%	Penguatan infrastruktur jaringan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas bandwidth
3.	Persentase sistem manajemen pemanfaatan ruang	100%	Implementasi sistem manajemen ruang berbasis teknologi, monitoring penggunaan, dan evaluasi berkala
4.	Persentase ketersediaan tempat sampah disetiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi	100%	Penyediaan tempat sampah sesuai kebutuhan, kampanye kebersihan, dan sistem pengelolaan limbah

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
5.	IPDN melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali	100%	Audit internal, analisis efektivitas anggaran, dan perbaikan sistem keuangan
6.	Persentase jumlah Unit Kerja menyusun laporan keuangan setiap kegiatan	100%	Implementasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital, monitoring berkala
7.	Persentase IPDN menyusun laporan keuangan setiap semester	100%	Penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas, audit berkala
Standar Sarana Prasarana Penelitian			
8.	Persentase laboratorium untuk riset digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian	80%	Optimalisasi penggunaan laboratorium, peningkatan akses bagi peneliti
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
9.	Persentase serapan alokasi dana Penelitian IPDN	100%	Monitoring penggunaan dana penelitian dan evaluasi efektivitas program
Standar Sarana dan Prasarana PkM			
10.	Fakultas minimal memiliki 1 inkubator bisnis	100%	Pengembangan inkubator bisnis, kerja sama industri, dan dukungan bagi startup
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM			
11.	Persentase serapan alokasi dana PkM IPDN	100%	Monitoring penggunaan dana PkM dan evaluasi efektivitas program
12.	Tersedianya alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan intelektual	100%	Penyediaan dana publikasi, insentif bagi dosen, dan mahasiswa

6. Evaluasi Capaian Kinerja



Gambar 8. Persentase Penggunaan Anggaran IPDN tahun 2022-2024

Dari evaluasi capaian kinerja standar IPDN, beberapa indikator telah berhasil terpenuhi, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna dan publikasi jurnal nasional, yang didukung oleh kerja sama aktif dengan industri serta kebijakan akademik yang mendorong inovasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan jumlah publikasi internasional bereputasi dan paten hasil penelitian serta PkM, yang terkendala oleh keterbatasan dana dan fasilitas. Akar masalah dari beberapa ketidakberhasilan adalah kurangnya pendampingan akademik dalam penyusunan paten dan publikasi internasional. Sebagai tindak lanjut, IPDN berencana memperkuat dukungan penelitian melalui hibah riset, fasilitasi pendaftaran paten, serta peningkatan jejaring akademik untuk mendorong publikasi yang lebih luas dan berpengaruh dalam skala internasional.

2.1.6. Pendidikan

1. Latar Belakang

Sebagai upaya strategis dalam penguatan kapasitas akademik dan pengembangan program studi, IPDN menetapkan kebijakan pembukaan Program Magister di seluruh fakultas serta Program Doktor Terapan di Sekolah Pascasarjana mulai tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Setiap program dirancang berdasarkan studi kelayakan akademik dan disusun dengan kurikulum berbasis riset yang terintegrasi dengan roadmap tematik nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan relevansi keilmuan, peningkatan mutu lulusan, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan

ilmu kepomongprajaan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kontekstual.

IPDN sebagai institusi pendidikan tinggi kepomongprajaan telah memperoleh akreditasi “Unggul” dan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan regulasi nasional. Standar pendidikan tinggi yang diterapkan mencakup aspek pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama akademik. Dalam pelaksanaannya, IPDN melalui LP3MI bersinergi dengan unit penjaminan mutu di berbagai tingkat untuk memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Keunggulan IPDN terletak pada peran strategisnya dalam mencetak kader pemerintahan, di mana lulusannya langsung direkrut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadikan IPDN memiliki posisi yang unik dan kompetitif dibandingkan perguruan tinggi lainnya.

Tabel 18. Akreditasi Program Studi IPDN

No.	Status dan Peringkat Akreditasi	Profesi	S-1	S-2	S3	Total
1.	Terakreditasi Unggul	0	7	0	0	7
2.	Terakreditasi A	0	0	0	0	0
3.	Terakreditasi Baik Sekali	0	3	1	1	5
4.	Terakreditasi B	1	-	0	0	1
5.	Terakreditasi Baik	0	0	0	0	0
Jumlah		1	10	1	1	13

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembentukan pemimpin pemerintahan, IPDN menerapkan sistem pendidikan yang terintegrasi melalui tiga pilar utama yakni pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pengajaran berfokus pada kajian teori di kelas, pelatihan berfungsi sebagai sarana bagi praja untuk menerapkan ilmu yang diperoleh, sementara pengasuhan menitikberatkan pada pembentukan karakter yang kuat. Untuk mendukung sistem ini, IPDN menyelenggarakan berbagai program pendidikan, termasuk sarjana terapan, profesi kepomong prajaan, magister administrasi pemerintahan daerah, dan program doktoral ilmu pemerintahan. Suasana akademik yang dinamis juga diperkuat melalui seminar, konferensi tingkat nasional dan internasional, serta kompetisi akademik, seperti debat dan pembuatan artikel ilmiah. Studi perspektif ke instansi pemerintah juga dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual, misalnya mengunjungi BPK, Bapenda, atau BUMD untuk memahami lebih dalam mata kuliah terkait.

Dalam upaya mengintegrasikan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, IPDN mendorong kolaborasi antara dosen dan praja/mahasiswa dalam penelitian bersama. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kemudian dipublikasikan sebagai laporan akademik dan diintegrasikan ke dalam mata kuliah, baik sebagai bahasan tersendiri maupun sebagai pengembangan bahan ajar. IPDN juga mewajibkan mahasiswa S3 untuk melakukan studi strategis ke luar negeri sebagai bagian dari peningkatan daya saing global. Dengan pendekatan ini, IPDN tidak hanya berperan dalam mencetak lulusan yang kompeten, tetapi juga menciptakan ekosistem akademik yang mendorong inovasi, profesionalisme, dan keterlibatan aktif dalam perkembangan ilmu pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa IPDN tetap berada dalam posisi unggul di antara perguruan tinggi dengan jurusan serupa dan memiliki daya saing tinggi dalam menghasilkan pemimpin pemerintahan yang berkualitas.

2. Kebijakan

Kebijakan pendidikan di IPDN meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 6) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 7) Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.2.3 - 445 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar Pendidikan IPDN meliputi Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS), dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 19. Indikator Kinerja Kriteria Standar Pendidikan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi Pembelajaran			
1.	Persentase jumlah prodi dengan kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) yang telah ditinjau setiap tahun	80%	Mengembangkan kurikulum berbasis OBE sesuai standar SNDIKTI, melibatkan dosen dalam pelatihan integrasi, serta melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala
2.	Persentase jumlah prodi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya	100%	Mengadakan forum evaluasi berkala dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologi terbaru
3.	Persentase kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum	100%	Menyusun dan mempublikasikan matriks kurikulum yang jelas untuk memastikan keselarasan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran
4.	Persentase tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai	100%	Mengintegrasikan standar KKNI dalam penyusunan dan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	dengan capaian pembelajaran dari KKNI		evaluasi materi pembelajaran untuk memastikan kedalaman dan keluasan yang sesuai
5.	Persentase (Prodi-Dosen) Pengembangan Pembelajaran berbasis penelitian dan PKM	50%	Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan menyediakan dana hibah penelitian bagi dosen
Standar Proses Pembelajaran			
6.	Persentase program studi memiliki kurikulum yang memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	100%	Merancang kurikulum berbasis kompetensi dan memastikan kesesuaian dengan visi dan misi prodi
7.	Prodi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan	100%	Melaksanakan evaluasi berkala dengan masukan dari pemangku kepentingan dan tren keilmuan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
8.	Persentase prodi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa	100%	Memastikan pembelajaran terstruktur, dengan beban belajar yang proporsional dan terukur
9.	Persentase proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan	100%	Menggunakan metode inovatif yang mendorong kreativitas dan daya pikir kritis mahasiswa
10.	Persentase rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah	100%	Mengembangkan RPS sesuai dengan standar SN DIKTI dan memperbaruinya secara berkala
11.	Persentase penelitian/PkM yang terintegrasi ke dalam pembelajaran	50%	Mengembangkan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Penilaian Pembelajaran			
12.	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen	80%	Melakukan survei kepuasan mahasiswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan masukan
13.	Nilai minimal tes masuk IPDN (CBT & PBT)	S2=70 S3=80	Menyusun strategi peningkatan mutu seleksi dengan sistem tes berbasis komputer.
14.	Hasil tugas akhir jenjang S2/S3 dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi	S2 = 1/mahasiswa S3 = 2/mahasiswa	Mewajibkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal bereputasi sebagai syarat kelulusan
15.	Persentase mata kuliah yang telah terintegrasi dengan penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat	S1=25% S2=50%	Mendorong integrasi penelitian dan pengabdian dalam setiap mata kuliah melalui tugas akademik dan proyek lapangan

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 20. IKKST Pendidikan

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi Pembelajaran			
1.	Persentase mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi	100%	Menerapkan sistem pemutakhiran

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu dimutakhirkan		silabus dan RPS berbasis evaluasi dan masukan dari pemangku kepentingan
2.	Persentase Prodi melakukan Pengembangan Pembelajaran yang berbasis <i>Student Center Learning</i> dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif <i>case study</i> dan <i>project based learning</i> yang dilaksanakan secara <i>Blended Learning</i>	100%	Melakukan pelatihan bagi dosen, menyediakan platform e-learning, serta mengembangkan pembelajaran berbasis studi kasus dan proyek kolaboratif
3.	Persentase mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran Pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>Project Based Learning</i>	Vokasi=50% S1=35% S2= 50% S3=50%	Memasukkan pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek ke dalam kurikulum serta memberikan pelatihan bagi dosen terkait metode ini.
4.	Persentase (Prodi-Pusdatin) Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan inventarisasi perangkat pembelajaran berbasis sistem informasi	100%	Membangun sistem informasi terintegrasi untuk penyimpanan dan pemanfaatan perangkat pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Proses Pembelajaran			
5.	Persentase jumlah dosen mengembangkan RPS	100%	Mewajibkan setiap dosen untuk menyusun dan memperbarui RPS berdasarkan evaluasi akademik
6.	Persentase RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI	100%	Mengadaptasi format RPS berdasarkan SN DIKTI serta melakukan sosialisasi kepada dosen
7.	Persentase materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala (setiap tahun)	100%	Memastikan keterbaruan metode pembelajaran sesuai tren industri dan akademik
Standar Penilaian Pembelajaran			
8.	Persentase mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah	>50%	Memberikan dukungan akademik dan peningkatan efektivitas metode pembelajaran
9.	Persentase mahasiswa mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dinyatakan lulus dalam mata kuliah dan memiliki kompetensi	100%	Menyediakan sistem evaluasi pembelajaran yang memastikan

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	sesuai standar yang dipersyaratkan.		pemenuhan standar kompetensi lulusan.
10.	Persentase dosen yang mencantumkan mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran pada saat kontrak kuliah	100%	Menetapkan kebijakan penilaian yang transparan serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa
11.	Implementasi proses pembelajaran berbasis evaluasi dan perbaikan	100%	Menyusun sistem evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu akademik

6. Evaluasi Capaian Kinerja

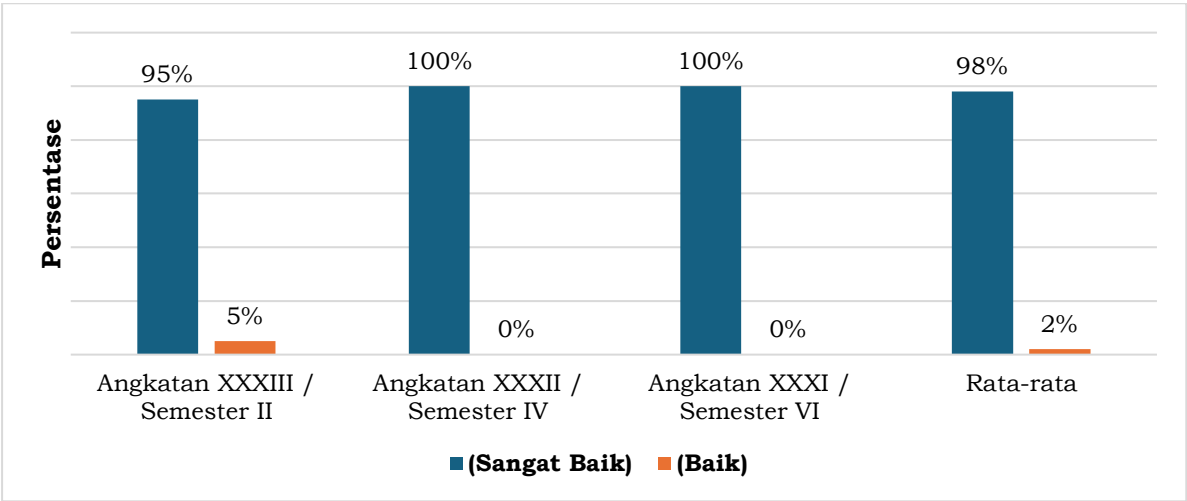
Tabel 21. Evaluasi Capaian Kinerja Pendidikan IPDN

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Rata-rata masa studi lulusan tepat waktu, maksimal 5 tahun	Rata-rata masa studi lulusan tepat waktu (4 tahun)	Manajemen akademik yang efektif	Perlu peningkatan monitoring individu	Optimalisasi sistem pengawasan studi mahasiswa
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3,50	Rata-rata IPK lulusan 3,59	Kurikulum berbasis KKNI dan sistem pembelajaran yang mendukung	Variasi metode evaluasi masih perlu diperbaiki	Peningkatan metode asesmen berbasis kompetensi
Memiliki Peta kurikulum dan melaksanaka	Peta kurikulum digunakan sebagai syarat	Sinkronisasi kurikulum dengan	Evaluasi berkala masih perlu diperkuat	Penyempurnaan dan revisi kurikulum

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
n pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	untuk ujian komprehensif	kebutuhan industri		secara periodik
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Kurikulum telah dirancang berbasis KPT	Dukungan penuh dari pemangku kepentingan eksternal	Masih ada kesenjangan antara akademik dan kebutuhan industri	Kolaborasi lebih erat dengan industri dan lembaga pemerintahan
Partisipasi berbagai pihak dalam evaluasi dan penyempurnaan kurikulum	Evaluasi kinerja dosen berbasis masukan mahasiswa	Sistem evaluasi berbasis <i>feedback</i>	Perlu perluasan partisipasi alumni dan <i>stakeholder</i> eksternal	Melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam pengembangan kurikulum
Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran interaktif, saintifik, dan berpusat pada mahasiswa	Pembelajaran berbasis kelas, seminar, dan studi lapangan	Model pembelajaran berbasis penelitian dan diskusi	Masih terbatasnya keterlibatan mahasiswa dalam riset	Peningkatan akses mahasiswa ke penelitian dan proyek akademik
Integrasi kurikulum dengan pencapaian	Penelitian dan PkM telah terintegrasi dalam pembelajaran	Kurikulum yang fleksibel dalam mengakomodasi penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM perlu ditingkatkan	Mendorong kolaborasi lebih aktif antara mahasiswa

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
pembelajaran lulusan				dan dosen dalam PkM

Evaluasi capaian kinerja pendidikan IPDN menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah tercapai, seperti kelulusan tepat waktu, pencapaian IPK minimal, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Keberhasilan ini didukung oleh kurikulum berbasis KKNI, sistem evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, serta metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis riset. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan konferensi internasional, serta optimalisasi kurikulum berbasis OBE. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan masih minimnya publikasi akademik. Sebagai tindak lanjut, IPDN akan memperkuat kerja sama dengan industri dan pemerintah, meningkatkan akses mahasiswa terhadap penelitian, serta mengembangkan program akademik berbasis inovasi untuk mendukung daya saing lulusan.



Gambar 9. Kepuasan Layanan Akademik IPDN

IPDN menerapkan sistem evaluasi kepuasan pengguna proses pendidikan, terutama mahasiswa, melalui survei yang dilakukan secara konsisten setiap akhir perkuliahan oleh masing-masing program studi. Evaluasi ini menggunakan instrumen yang jelas dan terstandarisasi untuk menilai kualitas pengajaran dosen, yang mencakup aspek metode pengajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan efektivitas penyampaian materi. Data yang diperoleh direkam secara sistematis dan dianalisis untuk memberikan umpan balik bagi program studi terkait, seperti Prodi Keuangan Publik, guna merencanakan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan

kebutuhan mahasiswa dan standar akademik. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan mayoritas mahasiswa memberikan penilaian “sangat baik” terhadap kinerja dosen, yang membuktikan efektivitas sistem penjaminan mutu akademik di IPDN. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara berkala tetapi juga ditindaklanjuti dengan strategi peningkatan kompetensi dosen serta penyesuaian kurikulum agar lulusan memiliki kualitas yang semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan sektor pemerintahan.

2.1.7. Penelitian

1. Latar Belakang

Penelitian di IPDN merupakan bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian di IPDN berfokus pada aspek akademik yang berkontribusi terhadap penguatan sistem pemerintahan. Penelitian ini dikelola oleh Lembaga Riset dan Kajian Ilmu Pemerintahan, yang berfungsi sebagai pusat kajian dan inovasi di bidang pemerintahan, dengan tema penelitian yang ditetapkan sesuai dengan peta jalan akademik dan kebutuhan nasional.

Tujuan utama penelitian di IPDN adalah menciptakan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian dilakukan melalui tiga pendekatan utama: penelitian individu, yang memungkinkan dosen untuk melakukan kajian secara mandiri; penelitian kelompok, yang mengintegrasikan dosen dan praja untuk meningkatkan pengalaman penelitian berbasis kolaborasi serta penelitian unggulan, yang berorientasi pada publikasi nasional dan internasional untuk memperkuat kontribusi akademik IPDN dalam sektor pemerintahan. Pelaksanaan penelitian di IPDN dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan berdasarkan analisis internal dan eksternal, pengumpulan data melalui metode ilmiah, hingga penyusunan laporan sebagai bahan ajar dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.

Mekanisme penetapan standar penelitian di IPDN mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sesuai dengan standar akademik dan kebutuhan pemerintahan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas penelitian dalam konteks kebijakan publik. Sebagai institusi pencetak kader pemerintahan, IPDN

memiliki posisi strategis dalam menyediakan referensi akademik bagi pemerintah, yang memberikan keunggulan kompetitif dibanding perguruan tinggi lain. Dengan memperkuat kerja sama dengan institusi nasional dan internasional, serta meningkatkan keterlibatan praja dalam penelitian, IPDN terus berupaya meningkatkan daya saing akademik dan kontribusi ilmiah dalam bidang pemerintahan.

2. Kebijakan

Kebijakan tentang Penelitian IPDN mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 9) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 10) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Grand Design dan Roadmap Penelitian Tahun 2024 - 2028 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 11) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020-2045.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar Penelitian IPDN meliputi Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS), dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 22. IKKS Penelitian

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi Penelitian			
1.	Persentase dosen melakukan penelitian dasar	25%	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian fundamental melalui pendanaan internal dan eksternal, serta menyediakan pelatihan metodologi penelitian dasar
2.	Persentase dosen melakukan penelitian pengembangan/terapan	75%	Mengoptimalkan kolaborasi dengan instansi pemerintahan dan industri dalam penelitian terapan, serta menyediakan akses ke hibah riset terapan
3.	Persentase kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	100%	Memastikan setiap penelitian memiliki luaran berupa publikasi, paten, atau rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat
Standar Proses Penelitian			
4.	Jumlah SKS untuk penelitian program sarjana	4-6 SKS	Memastikan kurikulum penelitian berbasis <i>problem-solving</i> dan diterapkan dalam tugas akhir mahasiswa
5.	Jumlah SKS untuk penelitian program magister	6 SKS	Meningkatkan kualitas penelitian pascasarjana dengan penguatan metodologi

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			dan implementasi riset berbasis kebijakan
Standar Penilaian Penelitian			
6.	Persentase skripsi dan tesis mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku	100%	Menyusun sistem penilaian yang transparan dan berbasis standar akademik nasional
7.	Persentase penelitian dosen telah memenuhi standar yang telah ditetapkan	100%	Meningkatkan pengawasan mutu penelitian dosen melalui audit internal dan eksternal

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 23. IKKST Penelitian

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi Penelitian			
1.	Persentase materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan	100%	Meningkatkan pembekalan akademik bagi dosen dan mahasiswa terkait prinsip penelitian berbasis kaidah ilmiah dan kebutuhan kebijakan publik
Standar Proses Penelitian			
2.	Persentase proses penelitian mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan	100%	Melakukan evaluasi berkala terhadap relevansi penelitian dengan kompetensi lulusan serta keterkaitan dengan kebutuhan sektor pemerintahan
Standar Penilaian Penelitian			
3.	Persentase hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti	100%	Membangun sistem akses terbuka terhadap hasil penelitian melalui repositori digital dan jurnal institusi

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
4.	Persentase penilaian penelitian dilakukan oleh pihak internal dan eksternal	100%	Memastikan mekanisme <i>review</i> penelitian melibatkan pihak akademisi, praktisi, dan regulator untuk meningkatkan relevansi hasil riset

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Tabel 24. Evaluasi Capaian Kinerja Penelitian IPDN

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase dosen melakukan penelitian dasar	Peningkatan jumlah penelitian dasar dengan pendanaan kompetitif	Atmosfer budaya penelitian semakin berkembang	Kurangnya publikasi penelitian dasar di jurnal internasional	Peningkatan pelatihan dan pendanaan penelitian dasar
Persentase dosen melakukan penelitian pengembangan/terapan	Penelitian terapan meningkat dengan keterlibatan pemerintah daerah	MoU dan kerja sama penelitian dengan mitra eksternal	Belum optimalnya implementasi hasil penelitian terapan	Penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan industri
Persentase kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan	Hasil penelitian mencakup publikasi dan rekomendasi kebijakan	Tingginya jumlah penelitian yang menghasilkan luaran akademik	Keterbatasan akses ke jurnal internasional bereputasi	Penyediaan hibah riset untuk penelitian yang berorientasi publikasi internasional
Persentase materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan	Kajian ilmiah berbasis kaidah akademik telah diterapkan dalam penelitian	Standarisasi metodologi penelitian	Kurangnya pelatihan penyusunan penelitian berbasis OBE	Peningkatan pelatihan metodologi penelitian berbasis OBE dan akademik
Jumlah SKS untuk penelitian program sarjana	Penelitian mahasiswa sarjana terintegrasi dengan kurikulum	Struktur kurikulum berbasis penelitian dan proyek	Masih minimnya publikasi hasil penelitian mahasiswa	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam seminar dan publikasi ilmiah
Jumlah SKS untuk penelitian program magister	Program magister telah memenuhi	Sistem penelitian berbasis	Keterbatasan akses mahasiswa	Penyediaan lebih banyak hibah

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	standar akademik dalam penelitian	kebijakan publik	magister ke hibah penelitian	penelitian untuk mahasiswa pascasarjana
Persentase proses penelitian mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Hasil penelitian mahasiswa telah sesuai dengan standar akademik dan capaian pembelajaran	Monitoring penelitian oleh dosen pembimbing	Masih terdapat kendala dalam pengolahan data penelitian mahasiswa	Optimalisasi sistem pendampingan penelitian dan penyediaan akses data riset
Persentase skripsi dan tesis mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku	Skripsi dan tesis mahasiswa telah mengikuti format standar akademik	Mekanisme bimbingan dan validasi akademik yang ketat	Kualitas penelitian mahasiswa perlu ditingkatkan dalam publikasi ilmiah	Peningkatan pembimbingan akademik dan <i>workshop</i> publikasi ilmiah
Persentase penelitian dosen telah memenuhi standar yang telah ditetapkan	Standarisasi penelitian dosen telah memenuhi indikator akademik nasional	Dukungan anggaran penelitian dosen setiap tahun	Rasio penelitian dan jumlah dosen masih rendah	Optimalisasi jumlah penelitian per dosen dan peningkatan target penelitian
Persentase hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti	Repositori digital IPDN telah di implementasikan untuk akses terbuka	Peningkatan digitalisasi dan sistem informasi akademik	Masih perlu peningkatan keterlibatan <i>reviewer</i> eksternal	Integrasi sistem penelitian dengan jurnal akademik nasional
Persentase penilaian penelitian dilakukan oleh pihak internal dan eksternal	Evaluasi penelitian dilakukan oleh pihak akademik dan praktisi	Adanya sistem review akademik dan kemitraan penelitian	Masih terdapat penelitian yang belum mendapatkan evaluasi eksternal	Meningkatkan partisipasi akademisi luar dalam evaluasi dan publikasi penelitian

2.1.8. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Latar Belakang

IPDN memiliki Rencana Strategis PkM yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan program, alokasi sumber daya, serta sasaran strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak calon pemimpin pemerintahan, IPDN berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program seperti magang di pemerintahan daerah, pendampingan

desa, dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, sambil memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam lingkungan nyata.

Pengabdian kepada masyarakat di IPDN memiliki tujuan utama yaitu membekali calon aparatur negara dengan kemampuan analisis masalah, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang kuat. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai tantangan pemerintahan di lapangan, menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam kurikulum, serta berkontribusi dalam penyelesaian persoalan publik. Rasional dari program PkM ini didasarkan pada analisis internal dan eksternal, yang menunjukkan pentingnya integrasi antara akademik dan praktik lapangan dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teori tetapi juga siap menghadapi dinamika pemerintahan.

Mekanisme penetapan standar PkM di IPDN meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan secara sistematis oleh LP3MI. Kegiatan PkM disusun dengan pendekatan berbasis program strategis yang melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana utama, sementara dosen berperan sebagai pembimbing dan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui laporan yang disampaikan kepada pimpinan IPDN untuk dianalisis dan dijadikan dasar bagi pengembangan program studi. Dengan pendekatan ini, IPDN terus meningkatkan daya saing akademiknya, memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pemerintahan, serta memperkuat posisinya sebagai institusi pencetak kader pemerintahan yang unggul.

2. Kebijakan

Dokumen formal kebijakan PkM IPDN mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 11) Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.2.1-73 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar PkM IPDN meliputi Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS) dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).

4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 25. IKKS PkM

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi PkM			
1.	Persentase isi PkM adalah hasil penelitian dosen	≥ 40%	Meningkatkan integrasi penelitian dosen dengan program PkM serta mendorong publikasi hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam masyarakat
2.	Persentase isi PkM dapat diterapkan langsung oleh masyarakat	≥ 40 %	Mengembangkan program PkM berbasis kebutuhan masyarakat dan memastikan hasil penelitian memiliki dampak nyata
Standar Proses PkM			
3.	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan	≥ 25%	Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat		dalam program pelayanan publik berbasis akademik
4.	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya	≥ 25%	Memastikan setiap program PkM berbasis keilmuan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5.	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat	≥ 25%	Mengembangkan pelatihan dan pendampingan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
6.	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat	≥ 25%	Mendorong program pemberdayaan berbasis ekonomi dan sosial yang berkelanjutan
7.	Persentase kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	80%	Menyusun pedoman pelaksanaan PkM yang memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan
8.	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	100%	Mengintegrasikan PkM dalam kurikulum akademik dan memastikan keterlibatan mahasiswa dalam program berbasis kompetensi
Standar Penilaian PkM			
9.	Persentase hasil penilaian PkM memperhatikan standar hasil, isi dan proses PkM	100%	Mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator capaian dan dampak PkM

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 26. IKKST Pengabdian kepada Masyarakat

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Isi PkM			
1.	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	85%	Meningkatkan sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam penerapan teknologi serta menyediakan pelatihan berbasis inovasi
2.	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%	Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
Standar Proses PkM			
3.	Persentase PkM yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan besaran 4 SKS	100%	Menyelaraskan program KKN dengan PkM serta memastikan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan berbasis lapangan
4.	Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	100%	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas program PkM
Standar Penilaian PkM			
5.	Persentase kriteria penilaian PkM berdasarkan pada tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan	100%	Menyusun mekanisme penilaian berbasis survei dan analisis dampak sosial

No.	IKKST	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
	sumber belajar, dan mengatasi masalah sosial		

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Tabel 27. Evaluasi Capaian Kinerja PkM IPDN

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase isi PkM adalah hasil penelitian dosen	Peningkatan integrasi penelitian dosen dalam program PkM	Adanya kebijakan akademik yang mendorong sinergi penelitian dan PkM	Masih terbatasnya jumlah penelitian yang langsung dapat diterapkan dalam PkM	Penguatan integrasi penelitian dalam program PkM melalui pendampingan dosen dan mahasiswa
Persentase isi PkM dapat diterapkan langsung oleh masyarakat	PkM berbasis kebutuhan masyarakat semakin meningkat	Dukungan kebijakan dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan	Kurangnya keterlibatan industri atau sektor swasta dalam penerapan ilmu dan teknologi	Meningkatkan kolaborasi dengan sektor industri dan pemerintahan dalam implementasi PkM
Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan PkM berbasis pelayanan publik mengalami peningkatan	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program pemberdayaan	Terbatasnya program pendampingan untuk dosen dan mahasiswa dalam kegiatan langsung dengan masyarakat	Penguatan pelatihan dan pendampingan dosen serta mahasiswa sebelum terjun dalam PkM

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya	Pemanfaatan keilmuan berbasis akademik semakin terintegrasi dalam PkM	Sinkronisasi kurikulum dan program PkM dengan kebutuhan masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk penerapan teknologi inovatif dalam PkM	Penyediaan dana dan fasilitas riset untuk mendukung penerapan teknologi berbasis akademik
Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat	PkM diarahkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat berbasis kompetensi	Adanya program pelatihan dan edukasi untuk masyarakat	Kurangnya keberlanjutan program pasca intervensi PkM	Pengembangan model PkM berkelanjutan dengan evaluasi dampak secara berkala
Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat	Program berbasis pemberdayaan ekonomi dan sosial semakin diperkuat	Adanya kerja sama dengan berbagai komunitas dan instansi terkait	Minimnya monitoring jangka panjang terhadap dampak pemberdayaan	Implementasi sistem pemantauan dan evaluasi dampak pemberdayaan berbasis data
Persentase kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Pedoman pelaksanaan PkM telah disusun dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan	Ketersediaan SOP pelaksanaan kegiatan PkM	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pedoman keselamatan dan kesehatan	Peningkatan sosialisasi dan pelatihan terkait protokol keselamatan dalam PkM

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Integrasi PkM dengan capaian pembelajaran semakin optimal	Kebijakan akademik yang mengharuskan keterlibatan PkM dalam kurikulum	Tantangan koordinasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal	Peningkatan sistem manajemen PkM berbasis koordinasi antara dosen dan mahasiswa
Persentase hasil penilaian PkM memperhatikan standar hasil, isi, dan proses PkM	Evaluasi berbasis indikator capaian dan dampak PkM telah diterapkan	Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data telah berjalan	Kurangnya keterlibatan evaluator eksternal dalam penilaian PkM	Menambah evaluator eksternal dan meningkatkan transparansi proses penilaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program berbasis penerapan ilmu dan teknologi semakin berkembang	Tersedianya program pendanaan dan kemitraan	Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang dapat digunakan dalam PkM	Peningkatan infrastruktur dan sumber daya teknologi dalam kegiatan PkM
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	Program pemberdayaan berbasis komunitas semakin meningkat	Partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam program pemberdayaan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi program	Menambah tenaga pendamping dari berbagai disiplin ilmu dalam program pemberdayaan
Persentase PkM yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan besaran 4 SKS	Program KKN berbasis PkM semakin ditingkatkan	Sinkronisasi kurikulum dengan program KKN	Masih perlu peningkatan koordinasi antara akademik dan mitra pemerintah	Penyempurnaan koordinasi antara akademik dan mitra pemerintah serta dunia usaha

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data diterapkan dalam PkM	Adanya perencanaan berbasis program strategis	Kurangnya sistem digitalisasi dalam pemantauan dampak PkM	Pengembangan sistem digitalisasi evaluasi untuk peningkatan efektivitas PkM
Persentase kriteria penilaian PkM berdasarkan pada: tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan mengatasi masalah sosial	Mekanisme penilaian berbasis survei dan analisis dampak diterapkan	Kebijakan akademik mendukung keterlibatan evaluasi berbasis multidimensi	Perluasan partisipasi masyarakat dalam memberikan feedback terkait PkM	Peningkatan mekanisme survei kepuasan dan transparansi dalam hasil evaluasi PkM

Evaluasi capaian kinerja PkM IPDN menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah tercapai, didukung oleh kebijakan akademik yang kuat, sistem evaluasi yang berbasis data, serta peningkatan program pemberdayaan, dan pelayanan publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keterlibatan mitra eksternal, digitalisasi pemantauan dampak, serta keberlanjutan program PkM. Rencana tindak lanjut mencakup optimalisasi sistem evaluasi, peningkatan koordinasi dengan mitra, serta penguatan infrastruktur, dan sumber daya teknologi dalam program PkM.

2.1.9. Luaran Tridharma

1. Latar Belakang

IPDN berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang pemerintahan melalui standar kompetensi lulusan, hasil penelitian, dan hasil PkM yang sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini ditetapkan berdasarkan regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran, serta analisis internal dan eksternal yang mencakup kebutuhan pemerintahan daerah, dinamika global, dan daya saing lulusan di bidang pemerintahan. IPDN terus memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan dengan memastikan setiap lulusan memiliki keterampilan analitis, kepemimpinan, serta kemampuan penerapan kebijakan yang efektif di pemerintahan.

Tujuan utama penetapan standar ini adalah untuk menciptakan sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar setiap lulusan memiliki kompetensi akademik dan praktis yang teruji. Penelitian di IPDN diarahkan untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan di pemerintahan, yang kemudian diintegrasikan dalam kurikulum dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan PkM seperti magang, pendampingan desa, dan studi kebijakan daerah memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan nyata di sektor pemerintahan. Rasional dari standar ini terletak pada kebutuhan akan lulusan yang tidak hanya berwawasan akademik tetapi juga mampu menerapkan ilmu mereka dalam konteks sosial dan administratif secara efektif.

Mekanisme penetapan standar di IPDN mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berbasis evaluasi berkelanjutan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan roadmap akademik dan penelitian yang mencerminkan isu-isu pemerintahan terkini, sementara pelaksanaannya melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proyek penelitian serta pengabdian berbasis masyarakat. Hasil dari penelitian dan PkM dilaporkan secara sistematis melalui jurnal akademik, seminar ilmiah, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, IPDN tidak hanya meningkatkan kualitas akademik dan daya saing lulusannya tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan dalam menetapkan standar Luaran Tridharma IPDN mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;dan
 - 5) Peta Jalan Penelitian dan PkM Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Luaran Tridharma
- Strategi pencapaian standar Luaran Tridharma IPDN meliputi Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS), dan Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST).
4. Indikator Kinerja Kriteria Standar (IKKS)

Tabel 28. IKKS Luaran Tridharma

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Persentase kompetensi lulusan sudah dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan	100%	Menyusun kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan pemerintahan dan administrasi publik
2.	Persentase rumusan capaian pembelajaran sudah mengacu pada jenjang kualifikasi pada KKNI	100%	Menyesuaikan kurikulum dengan KKNI dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional
3.	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi	50%	Meningkatkan sistem akademik berbasis monitoring dan pendampingan mahasiswa untuk memastikan kelulusan tepat waktu

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
4.	Rata-rata IPK lulusan D3/S1 $\geq$ 3.25; S2/S3 $\geq$ 3.50;	D3/S1 $\geq$ 3.25; S2/S3 $\geq$ 3.50;	Mengoptimalkan metode pembelajaran berbasis kompetensi dan evaluasi akademik yang berkelanjutan
5.	Rerata masa tunggu lulusan waktu kerja pertama	< 6 bulan	Memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintahan dan sektor swasta untuk mempercepat penyerapan lulusan
6.	Persentase kepuasan pengguna lulusan atas: (1) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (2) Kemampuan berbahasa asing, (3) Penggunaan teknologi informasi	80%	Menyediakan pelatihan bahasa asing dan teknologi informasi sebagai bagian dari kurikulum wajib
7.	Persentase kepuasan pengguna lulusan atas: Etika, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, dan Pengembangan diri	80%	Mengintegrasikan <i>soft skills</i> dalam pembelajaran dan memberikan pelatihan kepemimpinan serta komunikasi
Standar Hasil Penelitian			
8.	Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional (<i>scopus</i>)/tahun untuk semua prodi	$\geq$ 5 artikel	Meningkatkan pendanaan penelitian dan memberikan insentif bagi dosen yang mempublikasikan di jurnal bereputasi
9.	Jumlah publikasi prosiding nasional/internasional <i>scopus</i>	$\geq$ 30 artikel	Mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa dalam konferensi

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			ilmiah nasional dan internasional
10.	Jumlah Paten/Paten Sederhana per dosen per tahun	2	Mendorong inovasi penelitian yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual dan paten
11.	Jumlah Hak Cipta/ Desain Produk Industri / Perlindungan Varietas Tanaman /Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu per tahun	2	Memfasilitasi proses pendaftaran hak cipta dan desain produk industri bagi dosen dan mahasiswa
12.	Jumlah Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial 2 per tahun	2	Mengembangkan penelitian berbasis inovasi yang dapat diterapkan langsung dalam masyarakat
13.	Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> : 2 judul	5	Meningkatkan produksi buku akademik dan mendorong dosen untuk menulis buku berbasis penelitian
Standar Hasil PkM			
14.	Persentase hasil PkM menerapkan TTG	$\geq 25\%$	Mengembangkan program PkM berbasis inovasi teknologi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat
15.	Persentase hasil PkM menerapkan model/prototype	$\geq 20\%$	Mendorong penelitian berbasis pengembangan model dan prototipe yang relevan dengan

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			kebutuhan pemerintahan
16.	Persentase hasil PkM menerapkan desain	$\geq 10\%$	Memastikan desain berbasis penelitian dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan publik
17.	Persentase hasil PkM menerapkan rekayasa sosial	$\geq 10\%$	Mengembangkan program PkM yang berorientasi pada perubahan sosial berbasis akademik
18.	Persentase hasil PkM menjadi buku ajar	$\geq 25\%$	Mewajibkan hasil PkM untuk dikembangkan menjadi bahan ajar bagi mahasiswa
19.	Persentase hasil PkM dipublikasikan di jurnal nasional	$\geq 20\%$	Meningkatkan publikasi hasil PkM dalam jurnal nasional untuk memperkuat dampak akademik
20.	Persentase hasil PkM dipatenkan	$\geq 10\%$	Mendorong inovasi berbasis PkM untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual
21.	Persentase hasil PkM diwujudkan dalam bentuk paten sederhana	$\geq 10\%$	Memfasilitasi proses pendaftaran paten sederhana bagi hasil PkM yang memiliki nilai inovatif
22.	Persentase hasil PkM diusulkan hak cipta	$\geq 20\%$	Memastikan setiap hasil PkM yang memiliki nilai akademik tinggi

No.	IKKS	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			didaftarkan sebagai hak cipta

5. Indikator Kinerja Kriteria Standar Tambahan (IKKST)

Tabel 29. IKKST Luaran Tridharma

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Persentase lulusan dengan minimal TOEFL: S1=450, S2/S3=500	80%	Menyediakan program intensif TOEFL dan ujian sertifikasi bagi mahasiswa sebelum kelulusan
2.	Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi yang dihasilkan per mahasiswa sebagai syarat kelulusan	S1=1 judul nasional bereputasi; S2/S3 = 2 Judul internasional bereputasi	Mewajibkan publikasi ilmiah sebagai bagian dari tugas akhir dan memberikan pendampingan dalam penulisan akademik.
Standar Hasil Penelitian			
3.	Jumlah hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan/tahun untuk semua prodi	≥ 5 buku	Menyediakan hibah penelitian untuk pengembangan bahan ajar berbasis hasil penelitian
4.	Jumlah pemakalah internasional tiap tahun untuk semua prodi	≥ 2 pemakalah	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar dan konferensi internasional dengan dukungan pendanaan
5.	Jumlah pemakalah regional tiap tahun untuk semua prodi	≥ 10 pemakalah	Meningkatkan partisipasi dalam forum akademik regional

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Strategi Pencapaian Standar
			untuk memperluas jejaring penelitian
6.	Persentase hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	100%	Mengintegrasikan penelitian mahasiswa dalam kurikulum dan memastikan relevansi dengan kompetensi lulusan
Standar Hasil PkM			
7.	Persentase PkM diterapkan sebagai desain produk industri	≥ 10%	Mengembangkan kerja sama dengan industri untuk penerapan hasil PkM dalam produk komersial
8.	Persentase hasil PkM didiseminasikan sebagai pemakalah/pembicara forum ilmiah nasional	≥ 30%	Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam forum ilmiah nasional untuk memperluas dampak PkM

6. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Luaran Tridharma

Tabel 30. Evaluasi Capaian Kinerja Luaran Tridharma IPDN

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase kompetensi lulusan dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan	Kurikulum telah sesuai dengan capaian pembelajaran KKNI	Kebijakan akademik mendukung standar capaian pembelajaran	Harmonisasi dengan kebutuhan industri masih perlu penyempurnaan	Penyesuaian kurikulum berbasis evaluasi pengguna lulusan
Persentase rumusan capaian pembelajaran	Struktur capaian pembelajaran	Sinkronisasi regulasi	Perubahan standar KKNI membutuhkan	Evaluasi kurikulum secara berkala

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
sudah mengacu pada KKNi	berbasis KKNi telah diterapkan	pendidikan tinggi	penyesuaian cepat	untuk menyesuaikan perubahan KKNi
Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang	Sebagian mahasiswa membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun	Sistem monitoring akademik yang terstruktur	Beban akademik dan administratif cukup tinggi	Optimalisasi mekanisme bimbingan akademik dan pengurangan hambatan administratif
Rata-rata IPK lulusan D3/S1 ≥ 3.25 , S2/S3 ≥ 3.50	IPK lulusan memenuhi standar akademik	Dukungan akademik melalui sistem pembelajaran berbasis kompetensi	Variasi asesmen perlu diperbaiki	Optimalisasi metode evaluasi berbasis pembelajaran aktif
Rerata masa tunggu lulusan untuk kerja pertama	Sebagian lulusan membutuhkan lebih dari 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Keunggulan IPDN sebagai pencetak ASN	Keterbatasan jaringan kerja di luar pemerintahan	Penguatan jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan
Persentase kepuasan pengguna lulusan atas kompetensi utama, bahasa asing, dan teknologi informasi	Lulusan memiliki kompetensi yang memenuhi standar industri	Pelatihan bahasa asing dan teknologi informasi dalam kurikulum	Kurangnya praktik bahasa asing dalam lingkungan akademik	Penyediaan program intensif bahasa asing dan teknologi digital
Persentase kepuasan pengguna atas <i>soft skills</i> lulusan (Etika, Komunikasi, Kerja Tim, Pengembangan Diri)	Lulusan IPDN memiliki keterampilan interpersonal yang baik	Integrasi <i>soft skills</i> dalam kurikulum dan pelatihan kepemimpinan	Kurangnya program pengembangan karakter mahasiswa	Penguatan workshop dan pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Persentase lulusan dengan minimal TOEFL: S1=450, S2/S3=500	Sebagian lulusan belum mencapai standar minimum TOEFL	Adanya kurikulum bahasa asing sebagai mata kuliah wajib	Kurangnya praktik bahasa asing	Peningkatan program intensif bahasa asing dengan tutor dan simulasi langsung
Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi sebagai syarat kelulusan	Mahasiswa telah menerbitkan jurnal nasional dan internasional	Kebijakan wajib publikasi bagi mahasiswa	Kurangnya pendampingan dalam penulisan akademik	Program mentoring publikasi ilmiah bagi mahasiswa
Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional (Scopus) per tahun	Publikasi jurnal Scopus masih rendah	Pendanaan riset dan insentif publikasi	Kompetisi publikasi tinggi dan akses ke jurnal terbatas	Penyediaan hibah penelitian dan pendampingan penulisan akademik
Jumlah publikasi prosiding nasional/internasional non-Scopus	Publikasi prosiding meningkat dalam konferensi akademik	Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam seminar nasional dan internasional	Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam publikasi ilmiah	Penguatan pelatihan penulisan akademik dan pendampingan publikasi
Jumlah hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan per tahun	Buku ajar berbasis penelitian telah diterbitkan	Dukungan akademik dalam penyusunan bahan ajar	Minimnya insentif bagi dosen untuk menulis buku	Hibah penelitian untuk pengembangan bahan ajar
Jumlah pemakalah internasional tiap tahun	Dosen masih minim menjadi pemakalah internasional	Kesempatan untuk mengikuti konferensi internasional	Biaya partisipasi seminar internasional cukup tinggi	Hibah perjalanan akademik bagi dosen untuk meningkatkan partisipasi dalam

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
				konferensi global
Jumlah pemakalah regional tiap tahun	Dosen aktif dalam seminar regional	Program pendanaan seminar nasional telah tersedia	Kurangnya seminar berkualitas tinggi di tingkat regional	Penguatan program pertukaran akademik antara perguruan tinggi
Persentase hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Penelitian mahasiswa telah sesuai dengan standar akademik	Integrasi penelitian dalam kurikulum dan tugas akhir	Kurangnya akses mahasiswa terhadap hibah penelitian	Penyediaan dana hibah khusus untuk penelitian mahasiswa
Jumlah paten/paten sederhana per dosen per tahun	Jumlah paten masih rendah dibanding standar	Kebijakan akademik mendorong inovasi penelitian	Kurangnya pemahaman dosen dalam proses pendaftaran paten	Pelatihan dan fasilitasi pendaftaran paten untuk dosen
Jumlah Hak Cipta/Desain Produk Industri/Perlindungan Varietas Tanaman per tahun	Hak cipta dan desain produk industri telah dihasilkan	Dukungan akademik dan regulasi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya hak cipta dalam penelitian	Peningkatan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran hak cipta
Jumlah Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial per tahun	Penelitian berbasis inovasi telah menghasilkan produk dan teknologi tepat guna	Kolaborasi dengan industri dan pemerintah dalam riset inovatif	Keterbatasan dana dalam pengembangan teknologi berbasis akademik	Hibah riset dan inovasi untuk penerapan teknologi tepat guna dalam masyarakat
Buku ber-ISBN, Book Chapter	Buku akademik telah diterbitkan	Kebijakan akademik mendukung	Kurangnya minat dosen dalam menulis buku ajar	Insentif bagi dosen yang menerbitkan

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	dalam berbagai bidang	produksi buku ilmiah		buku berbasis penelitian
Persentase hasil PkM menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Sebagian besar program PkM telah berbasis teknologi tepat guna	Kolaborasi dengan industri dan pemerintah	Kurangnya dukungan infrastruktur teknologi dalam PkM	Penguatan hibah penelitian berbasis teknologi dan peningkatan fasilitas pendukung
Persentase hasil PkM menerapkan model/prototipe	Masih sedikit hasil PkM yang menghasilkan model/prototipe	Kebijakan integrasi PkM dalam akademik	Keterbatasan dana pengembangan prototipe	Hibah riset dan inovasi untuk penerapan model berbasis akademik
Persentase hasil PkM menerapkan desain	PkM berbasis desain telah diterapkan dalam beberapa proyek	Dukungan akademik dalam desain berbasis inovasi	Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pendekatan desain dalam PkM	Peningkatan edukasi tentang desain berbasis akademik dan penerapan dalam proyek PkM
Persentase hasil PkM menerapkan rekayasa sosial	Rekayasa sosial telah diterapkan dalam beberapa program PkM	Sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah	Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam penerapan rekayasa sosial	Memperluas kerja sama dengan pihak eksternal untuk pengembangan proyek berbasis rekayasa sosial
Persentase hasil PkM menjadi buku ajar	Masih sedikit hasil PkM yang	Kebijakan akademik mendukung publikasi hasil	Kurangnya insentif bagi dosen dalam menyusun	Hibah penelitian untuk pengembangan

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	menghasilkan bahan ajar	PkM sebagai bahan ajar	buku berbasis PkM	bahan ajar berbasis PkM
Persentase hasil PkM dipublikasikan di jurnal nasional	Publikasi berbasis PkM di jurnal nasional meningkat	Adanya kebijakan wajib publikasi bagi dosen	Kurangnya partisipasi dosen dalam publikasi berbasis PkM	Peningkatan pendampingan dan insentif publikasi berbasis PkM
Persentase hasil PkM dipatenkan	Hanya sebagian kecil hasil PkM yang didaftarkan sebagai paten	Dukungan akademik dalam perlindungan hak kekayaan intelektual	Minimnya pemahaman dosen dalam proses pendaftaran paten	Pelatihan dan fasilitasi pendaftaran paten bagi dosen
Persentase hasil PkM diwujudkan dalam bentuk paten sederhana	Sebagian hasil PkM masih belum dikembangkan menjadi paten sederhana	Kebijakan akademik mendorong inovasi berbasis hak kekayaan intelektual	Kurangnya pendampingan dalam penyusunan dokumen paten	Optimalisasi sistem pendampingan dan konsultasi paten sederhana bagi dosen
Persentase hasil PkM diusulkan hak cipta	Hak cipta berbasis PkM telah meningkat	Regulasi akademik mendukung perlindungan hak cipta	Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya hak cipta dalam penelitian	Peningkatan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran hak cipta
Persentase PkM diterapkan sebagai desain produk industri	Masih sedikit PkM yang menghasilkan desain produk industri	Kolaborasi dengan industri untuk pengembangan desain berbasis akademik	Minimnya akses ke industri dalam penerapan hasil PkM	Peningkatan jejaring kerja sama dengan industri dan penyediaan dana hibah bagi proyek desain
Persentase hasil PkM didiseminasikan sebagai	Dosen dan mahasiswa semakin aktif	Dukungan pendanaan untuk	Kurangnya kesempatan bagi dosen dan mahasiswa	Insentif bagi pemakalah seminar akademik dan

Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
pemakalah/pembicara forum ilmiah nasional	dalam forum ilmiah	partisipasi akademik	untuk menjadi pemakalah utama	penguatan sistem pendampingan penulisan akademik

Evaluasi capaian kinerja Luaran Tridharma IPDN menunjukkan pencapaian signifikan dalam kompetensi lulusan, hasil penelitian, dan hasil PkM. Namun, tantangan masih ada dalam publikasi internasional, pengembangan prototipe berbasis PkM, dan peningkatan standar bahasa asing bagi lulusan. Rencana tindak lanjut mencakup optimalisasi sistem evaluasi, peningkatan kerja sama dengan mitra eksternal, serta penguatan infrastruktur akademik dan teknologi dalam penelitian serta PkM.

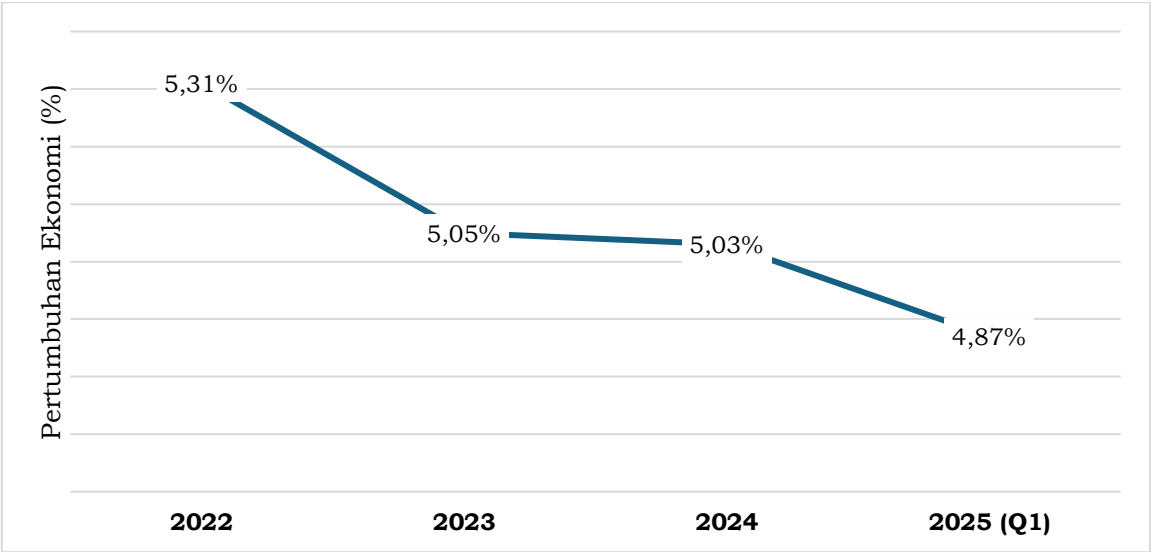
2.2. Kondisi Eksternal

2.2.1. Kondisi Makro

Kondisi eksternal makro merupakan kondisi eksternal yang memiliki dampak tidak langsung terhadap perkembangan IPDN. Kondisi eksternal makro terdiri dari kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, serta teknologi.

A. Kondisi Ekonomi

Kondisi eksternal makro mencakup faktor-faktor ekonomi yang memiliki dampak tidak langsung terhadap perkembangan IPDN. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas nilai tukar, serta kebijakan fiskal dan moneter pemerintah berpengaruh terhadap alokasi anggaran pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, dan pengembangan infrastruktur akademik.



Gambar 10. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 3 Tahun Terakhir

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari 5,31% pada 2022 menjadi 4,87% pada kuartal pertama 2025. Penurunan ini dapat mempengaruhi alokasi dana bagi institusi pendidikan tinggi, termasuk IPDN, dalam hal pengembangan fasilitas, beasiswa, dan program akademik.

Selain itu, stabilitas ekonomi nasional juga berperan dalam menentukan daya saing IPDN di tingkat internasional. Dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil, IPDN dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri, meningkatkan jumlah mahasiswa asing, serta memperkuat program kelas internasional. Namun, tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak pada biaya operasional institusi, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik dan mahasiswa. Oleh karena itu, IPDN perlu menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan dan akademik agar tetap mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi makro Indonesia.

B. Kondisi Politik dan Hukum

Kondisi politik dan hukum di Indonesia memiliki dampak tidak langsung terhadap perkembangan IPDN, terutama dalam aspek kebijakan pendidikan, tata kelola institusi, dan sistem rekrutmen calon aparatur pemerintahan. Stabilitas politik nasional berpengaruh terhadap regulasi pendidikan tinggi, termasuk kebijakan anggaran dan reformasi birokrasi yang diterapkan dalam sistem akademik IPDN. Misalnya, perubahan dalam pemerintahan atau kebijakan politik dapat mempengaruhi alokasi dana bagi institusi pendidikan tinggi, yang berdampak pada pengembangan kurikulum, fasilitas, serta program kerja sama internasional. Selain itu, dinamika politik juga berperan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan kepomongprajaan, yang menjadi inti dari sistem pembelajaran di IPDN.

Tabel 31. Kondisi Politik dan Hukum di Indonesia

No.	Indikator	Tahun	Nilai	Dampak terhadap IPDN
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	2024	74.92	Mempengaruhi kebebasan akademik dan kebijakan pendidikan tinggi
2.	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	2024	18	Menentukan arah kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran bagi IPDN

3.	Indeks Negara Hukum (<i>Rule of Law Index</i>)	2023	0.53	Berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola IPDN
4.	Jumlah Kasus Korupsi yang Ditangani KPK	2023	120	Mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk IPDN
5.	Jumlah Undang-Undang yang Disahkan	2023	15	Menentukan regulasi pendidikan tinggi dan kebijakan akademik IPDN
6.	Jumlah Hakim dan Jaksa yang Terlibat Kasus Hukum	2023	5	Berpengaruh terhadap kredibilitas sistem hukum yang menjadi bagian dari kurikulum IPDN

Di sisi lain, kondisi hukum di Indonesia, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perundang-undangan, turut mempengaruhi citra dan kredibilitas IPDN sebagai lembaga pendidikan bagi calon aparatur pemerintahan. Jika sistem hukum mengalami tantangan seperti meningkatnya kasus korupsi atau ketidakpastian regulasi, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk IPDN, dapat terpengaruh. Sebaliknya, jika sistem hukum semakin kuat dan transparan, maka lulusan IPDN akan lebih dihargai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, IPDN perlu terus menyesuaikan strategi akademik dan administrasi agar tetap relevan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang.

C. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum di IPDN. Sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan, IPDN perlu memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap terintegrasi dalam sistem akademik. Perubahan sosial seperti meningkatnya digitalisasi, globalisasi, serta pergeseran norma sosial mempengaruhi pendekatan pendidikan dan metode pembelajaran yang digunakan. Selain itu, keberagaman etnis dan budaya di Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang bagi IPDN untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, IPDN harus terus

menyesuaikan kebijakan akademiknya dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang berkembang.

Tabel 32. Kondisi Makro Sosial Budaya di Indonesia

No.	Indikator	Tahun	Nilai	Dampak terhadap IPDN
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	2023	57.13	Mempengaruhi integrasi nilai budaya dalam kurikulum dan sistem pendidikan kepomongprajaan
2.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	2023	2.54	Menentukan ketahanan budaya dalam menghadapi globalisasi, yang berdampak pada identitas akademik IPDN
3.	Persentase masyarakat yang masih mempertahankan budaya lokal	2024	73%	Berpengaruh terhadap pengembangan program studi berbasis kearifan lokal di IPDN
4.	Jumlah konflik sosial berbasis budaya	2023	120 kasus	Mempengaruhi stabilitas sosial yang berdampak pada kebijakan pendidikan dan tata kelola IPDN
5.	Persentase penggunaan teknologi dalam pelestarian budaya	2024	65%	Menentukan strategi digitalisasi pendidikan dan pengajaran berbasis budaya di IPDN

Dengan memahami berbagai indikator sosial budaya, IPDN dapat merancang strategi pendidikan yang relevan dan efektif bagi calon aparatur pemerintahan. Kurikulum yang mencerminkan nilai kearifan lokal dan nasional akan membantu mahasiswa memahami dinamika sosial masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam pelayanan publik. Selain itu, kebijakan akademik yang fleksibel perlu dikembangkan agar dapat merespons perubahan sosial dengan cepat dan tepat, termasuk melalui inovasi dalam sistem pembelajaran berbasis teknologi dan pendekatan multidisiplin. Keberlanjutan pendidikan kepomongprajaan yang berbasis sosial budaya akan memastikan bahwa lulusan IPDN memiliki pemahaman

mendalam tentang masyarakat Indonesia dan mampu menjadi pemimpin pemerintahan yang berdaya saing tinggi.

D.Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di tingkat lokal, nasional, dan global memiliki dampak besar terhadap IPDN, terutama dalam aspek kurikulum, kerja sama akademik, serta integrasi teknologi dalam sistem pendidikan kepomongprajaan. Indeks inovasi daerah, misalnya, berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum berbasis inovasi di IPDN, memungkinkan mahasiswa belajar tentang strategi pemerintahan berbasis teknologi. Selain itu, pertumbuhan jumlah startup teknologi di Indonesia membuka peluang kerja sama antara IPDN dan industri teknologi dalam pengembangan riset serta implementasi sistem digitalisasi pemerintahan. Kemajuan daya saing global juga menentukan strategi internasionalisasi pendidikan, di mana IPDN dapat memperkuat kemitraan dengan lembaga luar negeri guna meningkatkan kualitas akademik dan pelatihan kepomongprajaan berbasis teknologi.

Tabel 33. Kondisi Makro IPTEK Lokal, Nasional, dan Global

No.	Indikator	Tingkat	Tahun	Nilai	Dampak terhadap IPDN
1.	Indeks Inovasi Daerah	Lokal	2024	65.2	Mempengaruhi pengembangan kurikulum berbasis inovasi daerah
2.	Jumlah <i>start up</i> teknologi di Indonesia	Nasional	2024	2.500	Meningkatkan kerja sama IPDN dengan industri teknologi untuk riset dan pengembangan
3.	Indeks Daya Saing Global (GCI)	Global	2023	64.5	Menentukan strategi internasionalisasi pendidikan dan kerja sama akademik IPDN
4.	Persentase penggunaan teknologi dalam pendidikan tinggi	Nasional	2024	85%	Mendorong digitalisasi pembelajaran dan sistem administrasi akademik IPDN
5.	Jumlah publikasi ilmiah	Nasional	2023	12.500	Meningkatkan kontribusi akademik

No.	Indikator	Tingkat	Tahun	Nilai	Dampak terhadap IPDN
	Indonesia yang terindeks scopus				IPDN dalam penelitian dan publikasi internasional
6.	Persentase penggunaan AI dalam administrasi pemerintahan	Global	2024	40%	Mendorong integrasi teknologi AI dalam sistem kepomongprajaan yang diajarkan di IPDN

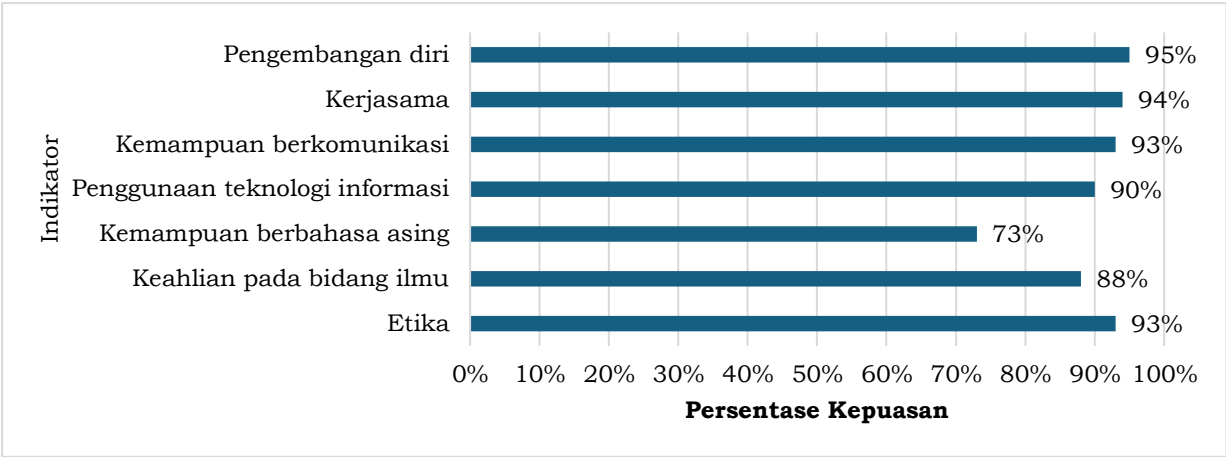
Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tinggi yang mencapai 85% menunjukkan urgensi bagi IPDN untuk mengintegrasikan sistem pembelajaran digital guna meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan metode pembelajaran. Publikasi ilmiah yang semakin meningkat menjadi indikator penting dalam memperkuat kontribusi akademik IPDN dalam penelitian dan publikasi ilmiah internasional. Selain itu, tren global yang mengarah pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi pemerintahan mendorong IPDN untuk memasukkan konsep AI dalam kurikulum kepomongprajaan. Dengan memahami indikator-indikator ini, IPDN dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis dan menyesuaikan strategi pendidikannya agar relevan dengan tantangan birokrasi modern.

2.2.2. Kondisi Mikro

Kondisi eksternal mikro merupakan kondisi eksternal yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan IPDN. Kondisi eksternal mikro terdiri dari pengguna lulusan, pesaing, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, dan sumber calon tenaga kependidikan, *e-learning*, *massive open online course*, dan kerjasama.

A. Pengguna

Pada aspek kepuasan pengguna, kondisi eksternal mikro berperan langsung dalam menentukan persepsi terhadap kualitas lulusan IPDN.



Gambar 11. Kepuasan Pengguna IPDN

Berdasarkan data, tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap alumni IPDN menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pengguna dan kinerja yang ditunjukkan oleh lulusan. Beberapa aspek seperti kemampuan komunikasi, keterampilan organisasi, kepemimpinan, serta etika menjadi faktor utama yang dinilai oleh pengguna. Meskipun secara umum alumni IPDN dianggap memiliki kompetensi yang baik, masih terdapat perbedaan antara ekspektasi *stakeholder* dan performa aktual yang ditunjukkan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa IPDN perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar lulusan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, IPDN perlu menerapkan strategi yang berfokus pada peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penguatan kurikulum yang lebih aplikatif dan berbasis praktik dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, program pelatihan kepemimpinan dan komunikasi yang lebih intensif dapat meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. IPDN juga perlu memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintahan guna memastikan bahwa lulusan memiliki akses lebih baik ke peluang karier serta mendapatkan bimbingan langsung dari para praktisi di bidang kepamongprajaan. Dengan strategi ini, IPDN dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi dalam sistem pemerintahan.

B. Pesaing

Pada aspek pesaing, IPDN menghadapi persaingan ketat dengan berbagai perguruan tinggi kedinasan yang menawarkan program studi menarik dan memiliki daya tarik tinggi bagi calon mahasiswa. Institusi seperti Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug memiliki

keunggulan dalam bidang spesifik yang diminati oleh banyak calon mahasiswa. PKN STAN, misalnya, memiliki tingkat pendaftar yang sangat tinggi setiap tahunnya karena prospek karier yang jelas di bidang keuangan negara. Sementara itu, STIP telah memperoleh akreditasi "Unggul", yang menunjukkan kualitas pendidikan dan daya saing akademik yang kuat. Dengan adanya perguruan tinggi kedinasan lain yang terus berkembang, IPDN harus memastikan bahwa sistem pendidikan kepamongprajaan tetap relevan dan kompetitif.

Tabel 34. Pesaing IPDN

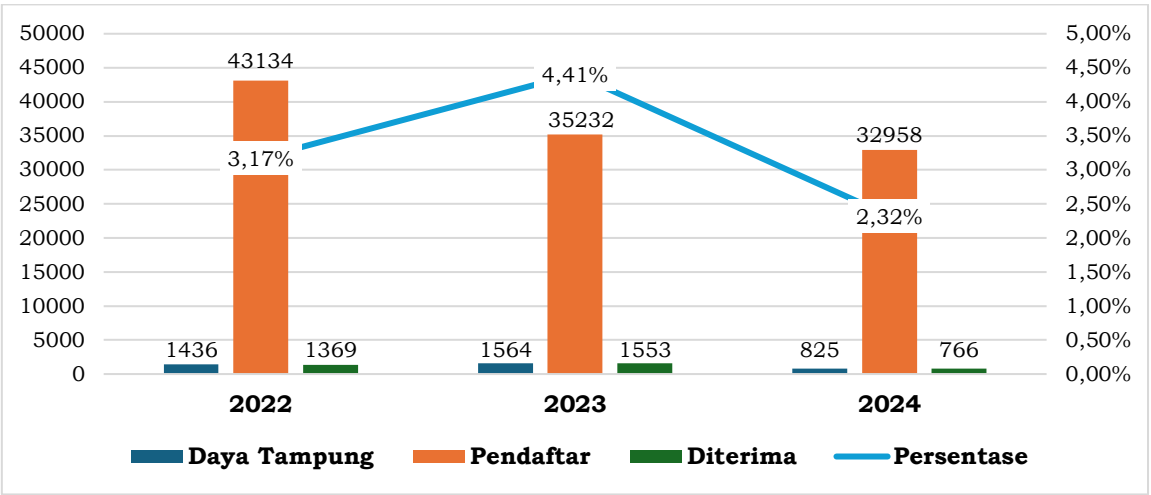
Nama Institusi	Jumlah Jurusan	Akreditasi Perguruan Tinggi	Kementerian/Lembaga
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)	3	Baik	Kementerian Hukum dan HAM
Politeknik Imigrasi (Poltekim)	4	-	Kementerian Hukum dan HAM
Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN	3	Baik Sekali	Kementerian Keuangan
Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug	10	Baik Sekali	Kementerian Perhubungan
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI)	4	Baik Sekali	Kementerian Perhubungan
Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)	3	Baik Sekali	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS)	3	Baik	Badan Pusat Statistik (BPS)
Politeknik STIA LAN Bandung	4	Baik Sekali	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Politeknik STIA LAN Jakarta	5	B	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Politeknik STIA LAN Makassar	2	-	Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Nama Institusi	Jumlah Jurusan	Akreditasi Perguruan Tinggi	Kementerian/Lembaga
Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)	3	Baik Sekali	Kementerian Perhubungan
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	3	Unggul	Kementerian Perhubungan
Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)	4	Unggul	Badan Intelijen Negara (BIN)
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)	4	Baik Sekali	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Untuk menghadapi persaingan ini, IPDN perlu meningkatkan kualitas akademik dan daya saing institusional melalui berbagai strategi. Peningkatan akreditasi program studi menjadi langkah penting untuk memastikan standar pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Selain itu, pengembangan kurikulum berbasis teknologi dan inovasi akan memberikan nilai tambah bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan modern dan aplikatif. IPDN juga dapat memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan lulusan memiliki akses lebih baik ke penempatan kerja serta peluang pengembangan karier. Dengan strategi ini, IPDN dapat mempertahankan posisinya sebagai institusi pendidikan kepamongprajaan terdepan di Indonesia dan tetap unggul di tengah persaingan perguruan tinggi kedinasan lainnya.

C. Sumber Calon Mahasiswa

Minat calon mahasiswa terhadap IPDN telah mengalami berbagai perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan seleksi ASN dan dinamika pendidikan tinggi. Ketatnya persyaratan penerimaan dalam sistem seleksi nasional membuat banyak calon mahasiswa mempertimbangkan pilihan lain, termasuk perguruan tinggi kedinasan dengan jalur penerimaan yang berbeda. Selain itu, perubahan preferensi terhadap bidang pemerintahan serta peningkatan persaingan dengan institusi pendidikan lain turut memengaruhi jumlah pendaftar yang berminat melanjutkan studi di IPDN. Tidak hanya jumlah pendaftar yang berfluktuasi, daya tampung institusi juga mengalami penyesuaian, menandakan adanya strategi penerimaan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan akademik dan kebijakan pemerintah.

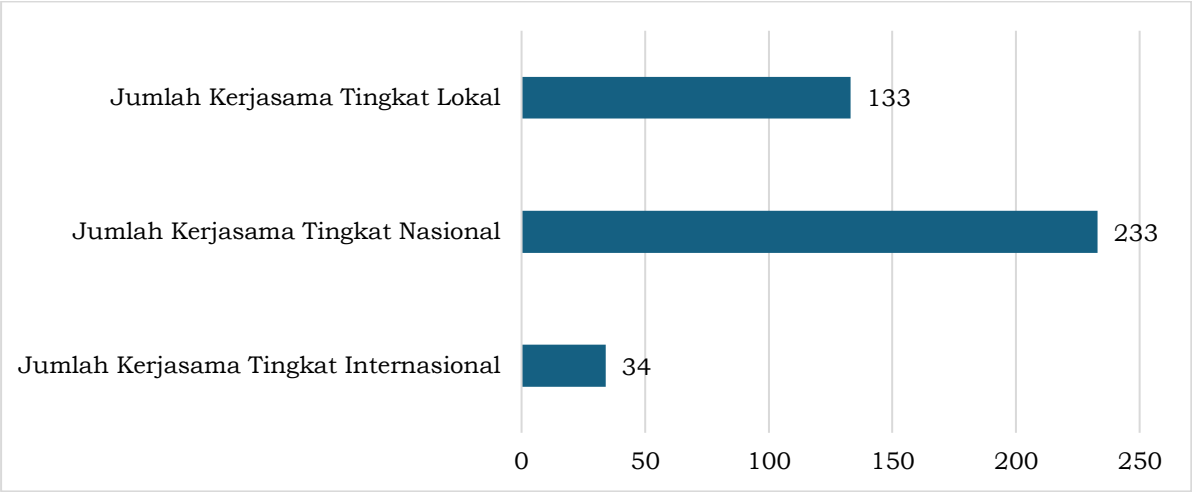


Gambar 12. Animo Pendaftar IPDN 3 Tahun Terakhir

Untuk menghadapi tantangan ini, IPDN perlu mengambil langkah strategis guna mempertahankan daya tariknya di kalangan calon mahasiswa. Meningkatkan promosi dan sosialisasi program studi menjadi salah satu kunci utama, terutama bagi Program Magister dan Program Doktor yang memiliki jalur penerimaan lebih fleksibel dibandingkan program sarjana. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga akademik juga dapat membantu memperluas akses informasi mengenai peluang pendidikan kepomongprajaan. Selain itu, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern akan memastikan lulusan IPDN memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan birokrasi masa kini. Dengan pendekatan yang tepat, IPDN dapat terus menarik calon mahasiswa berkualitas dan menjaga posisinya sebagai institusi pendidikan unggulan.

D. Kerja sama

Kerjasama yang dijalin oleh IPDN dengan berbagai pihak menjadi salah satu faktor eksternal mikro yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan institusi.



Berdasarkan data, IPDN telah menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintahan, perguruan tinggi, serta organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kepomongprajaan. Kemitraan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan pemerintahan, program pertukaran akademik, serta pelatihan bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga berperan dalam mendukung digitalisasi sistem pendidikan dan administrasi akademik di IPDN. Dengan adanya kolaborasi ini, IPDN dapat memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan kepomongprajaan yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan pemerintahan modern.

Untuk memastikan efektivitas kerja sama yang telah terjalin, IPDN perlu terus mengembangkan strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme lulusan. Salah satu langkah penting adalah memperluas jaringan kemitraan dengan institusi internasional guna meningkatkan daya saing global dan memperkaya pengalaman akademik mahasiswa. Selain itu, optimalisasi kerja sama dengan instansi pemerintahan dalam negeri dapat membantu IPDN dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan birokrasi yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang tepat, IPDN dapat memanfaatkan kerja sama sebagai alat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kompetensi lulusan, serta memastikan bahwa institusi tetap relevan dalam menghadapi tantangan pemerintahan di masa depan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat yang penting dalam merumuskan strategi pengembangan organisasi, khususnya bagi IPDN. Dengan mempertimbangkan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, IPDN dapat menentukan langkah-langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan. Kekuatan organisasi berkontribusi dalam pencapaian tujuan, sementara kelemahan menjadi fokus perbaikan agar tidak menghambat pertumbuhan. Peluang dari lingkungan eksternal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi IPDN, sedangkan ancaman perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keberlanjutan. Semua aspek ini dirangkum dalam tabel SWOT sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan penilaian dan analisis SWOT IPDN tersaji pada tabel 35-38 berikut:

Tabel 35. Analisis Faktor Internal *Strength*/Kekuatan

No.	<i>Strength</i> /Kekuatan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1.	Visi, misi, dan tujuan IPDN telah selaras dengan standar PCMEA (<i>Periodic, Clear, Measurable, Easy to achieve, Appropriate</i>).	0,03	4	0,11
2.	Evaluasi rutin terhadap VMTS dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terkini dan kebutuhan <i>stakeholders</i> .	0,03	3	0,09
3.	Strategi pencapaian standar telah dirancang dengan sosialisasi berkala untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika.	0,01	3	0,03
4.	Capaian VMTS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024.	0,02	3	0,05

No.	<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
5.	IPDN telah memiliki dokumen formal terkait SPMI yang mencakup kebijakan, pedoman, standar, dokumentasi, dan perangkat SPMI.	0,02	4	0,09
6.	Implementasi prinsip <i>Good University Governance</i> dengan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.	0,02	3	0,07
7.	Struktur organisasi dan tata kerja telah terdokumentasi secara formal serta diperbarui sesuai kebutuhan kelembagaan.	0,02	4	0,09
8.	Keberfungsian lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas akademik.	0,01	3	0,03
9.	Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	0,01	3	0,03
10.	Seleksi mahasiswa berbasis kompetensi yang ketat, memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima.	0,03	4	0,11
11.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik tinggi, mendukung pengalaman pendidikan yang optimal.	0,02	4	0,09
12.	<i>Tracer study</i> lulusan dilakukan secara berkala, memastikan evaluasi terhadap relevansi kompetensi dengan dunia kerja.	0,03	4	0,11
13.	Penerapan sertifikasi kompetensi bagi lulusan, meningkatkan daya saing alumni di sektor pemerintahan dan profesional.	0,02	4	0,07
14.	Program MBKM yang mendorong mahasiswa berkegiatan di luar kampus.	0,02	4	0,07
15.	Komitmen tinggi dari pengelola dalam mencapai target kinerja.	0,02	4	0,09

No.	<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
16.	Rasio dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar pendidikan tinggi, memastikan efektivitas pembelajaran.	0,01	3	0,03
17.	Tingginya persentase dosen bersertifikat profesi (Serdos) meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme akademik.	0,02	3	0,05
18.	Program pengembangan akademik mendorong dosen untuk meraih gelar doktor, memperkuat kapasitas penelitian dan pendidikan.	0,03	4	0,11
19.	Tingginya persentase dosen yang mampu menggunakan media pembelajaran modern meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar.	0,03	3	0,09
20.	Keberadaan dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memperkuat kualitas keilmuan dan reputasi institusi.	0,02	3	0,07
21.	Kelengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah memenuhi standar dengan kepuasan <i>stakeholder</i> mencapai 85%.	0,02	3	0,07
22.	Sistem keuangan yang transparan dengan pelaksanaan audit internal tiap semester dan eksternal tiap tahun untuk memastikan akuntabilitas.	0,03	4	0,11
23.	Tersedianya alokasi dana operasional pembelajaran dengan standar perencanaan dan evaluasi berkala guna meningkatkan efektivitas pembiayaan akademik.	0,02	4	0,09
24.	Fasilitas laboratorium untuk riset dan PkM telah memenuhi standar dan tersedia di seluruh program studi.	0,03	3	0,09
25.	Dukungan terhadap publikasi dan kekayaan intelektual melalui alokasi dana khusus	0,02	4	0,07

No.	<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
26.	Kurikulum berbasis KKNi dan OBE telah ditetapkan sebagai standar utama, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan akademik dan profesional.	0,02	4	0,09
27.	Evaluasi dan peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala, memastikan relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri.	0,02	4	0,07
28.	Sistem pembelajaran berbasis interaktif dan saintifik, dengan integrasi metode <i>Student-Centered Learning, Case Method, dan Project-Based Learning</i> .	0,02	4	0,07
29.	Proses asesmen berbasis kompetensi yang mendukung pemetaan capaian pembelajaran dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.	0,03	4	0,11
30.	Penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi sistematis dengan survei kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan eksternal.	0,02	3	0,05
31.	Atmosfer budaya penelitian berkembang, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penelitian dasar dengan pendanaan kompetitif.	0,02	3	0,07
32.	MoU dan kerja sama penelitian dengan mitra eksternal, meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam penelitian terapan.	0,03	4	0,11
33.	Repositori digital IPDN telah diimplementasikan, memungkinkan akses terbuka terhadap hasil penelitian.	0,03	3	0,09
34.	Evaluasi penelitian dilakukan oleh akademisi dan praktisi eksternal, memastikan kualitas, dan relevansi penelitian.	0,02	4	0,09

No.	<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
35.	Hasil penelitian mencakup publikasi dan rekomendasi kebijakan, memperkuat kontribusi akademik, dan implementasi nyata di sektor publik.	0,02	3	0,05
36.	Kebijakan akademik yang mendorong integrasi penelitian dan PkM, memastikan keberlanjutan program berbasis riset.	0,01	4	0,05
37.	Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik.	0,03	4	0,11
38.	Pedoman pelaksanaan PkM telah mengakomodasi standar mutu dan keselamatan kerja, memastikan kenyamanan pelaksana, dan masyarakat.	0,02	3	0,07
39.	Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data telah diterapkan, memperkuat pengukuran dampak, dan efektivitas program PkM.	0,02	3	0,07
40.	Integrasi PkM dengan capaian pembelajaran lulusan, memastikan keterkaitan antara pendidikan akademik dan keterlibatan sosial.	0,02	3	0,07
41.	Kurikulum telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran KKNI, memastikan kesesuaian standar pendidikan tinggi.	0,02	3	0,07
42.	Publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan, mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam penelitian akademik.	0,03	3	0,09
43.	Persentase kepuasan pengguna lulusan dalam kompetensi utama, bahasa asing, dan teknologi informasi tinggi, memperkuat daya saing alumni.	0,03	4	0,11
44.	Integrasi penelitian dalam kurikulum dan tugas akhir, memastikan keterkaitan antara teori dan penerapan akademik.	0,02	4	0,07

No.	<i>Strength/Kekuatan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
45.	Keunggulan IPDN dalam mencetak ASN, meningkatkan peluang lulusan dalam sektor pemerintahan.	0,03	3	0,09
	Total	1,00		3,53

Tabel 36. Analisis Faktor Internal *Weakness/Kelemahan*

No	<i>Weakness/Kelemahan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1.	Capaian VMTS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024.	0,04	2	0,08
2.	Pemahaman dan internalisasi VMTS oleh sivitas akademika, alumni, dan mitra masih belum optimal.	0,02	2	0,05
3.	Keterlibatan alumni dan mitra eksternal dalam penguatan VMTS masih rendah.	0,02	2	0,03
4.	Sosialisasi VMTS belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif.	0,04	2	0,08
5.	Mekanisme sosialisasi dan internalisasi SPMI belum sepenuhnya menjangkau seluruh unit akademik dan administratif.	0,04	2	0,08
6.	Sistem kepemimpinan dan tata pamong masih memiliki tantangan dalam efisiensi pengambilan keputusan.	0,02	2	0,03
7.	Keterlibatan mitra eksternal dalam pengembangan kebijakan dan evaluasi institusi masih terbatas.	0,04	1	0,04
8.	Sistem penjaminan mutu belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dan merata di semua unit kerja.	0,02	1	0,02
9.	Daya saing internasional IPDN masih perlu ditingkatkan, terutama dalam publikasi ilmiah dan kolaborasi akademik global.	0,04	2	0,08

No	Weakness/Kelemahan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
10.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program kredit internasional masih rendah, menghambat pengalaman akademik global.	0,04	2	0,08
11.	Kurangnya optimalisasi sistem informasi alumni, meskipun telah ditetapkan sebagai standar evaluasi lulusan.	0,02	2	0,05
12.	Pengembangan minat dan bakat belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengurangi potensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik.	0,02	2	0,03
13.	Proporsi dosen dengan jabatan akademik Guru Besar masih rendah, menantang dalam peningkatan reputasi akademik.	0,04	2	0,08
14.	Keterbatasan anggaran dalam mendukung penelitian dan pengembangan karir dosen dapat menghambat inovasi akademik.	0,04	2	0,08
15.	Keterlibatan dosen dalam organisasi akademik dan profesi internasional masih terbatas, menghambat jejaring keilmuan global.	0,04	2	0,08
16.	Pemanfaatan dana penelitian yang masih rendah, dengan hanya 5% bersumber dari APBN, menghambat inovasi dan publikasi ilmiah.	0,04	2	0,08
17.	Kurangnya pendampingan akademik dalam penyusunan paten dan publikasi internasional, membatasi capaian riset yang bereputasi.	0,02	1	0,02
18.	Minimnya keterlibatan industri dalam pendanaan dan kerja sama penelitian, menyebabkan terbatasnya dukungan eksternal terhadap inovasi akademik.	0,02	2	0,03

No	<i>Weakness/Kelemahan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
19.	Minimnya keterlibatan industri dalam kurikulum, menyebabkan kesenjangan antara akademik dan kebutuhan profesional.	0,03	1	0,03
20.	Belum optimalnya implementasi digitalisasi pendidikan, terutama dalam pengelolaan perangkat pembelajaran berbasis sistem informasi.	0,04	2	0,08
21.	Evaluasi kinerja dosen berbasis masukan mahasiswa masih perlu diperluas, terutama dalam mendapatkan umpan balik dari alumni dan pemangku kepentingan eksternal.	0,04	2	0,08
22.	Kurangnya publikasi penelitian dasar di jurnal internasional, menyebabkan keterbatasan dampak ilmiah global.	0,02	1	0,02
23.	Belum optimalnya implementasi hasil penelitian terapan, membatasi penerapan nyata dalam kebijakan dan industri.	0,02	2	0,05
24.	Keterbatasan akses ke jurnal internasional bereputasi, menghambat visibilitas global penelitian IPDN.	0,02	2	0,05
25.	Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang dapat digunakan dalam PkM, menghambat penerapan inovasi akademik berbasis riset.	0,04	2	0,08
26.	Terbatasnya program pendampingan untuk dosen dan mahasiswa dalam interaksi langsung dengan masyarakat, menyebabkan kurang optimalnya implementasi.	0,03	1	0,03
27.	Kurangnya keberlanjutan program pasca intervensi PkM, mengakibatkan kurangnya dampak jangka panjang terhadap masyarakat.	0,04	2	0,08
28.	Minimnya monitoring jangka panjang terhadap dampak pemberdayaan	0,03	1	0,03

No	<i>Weakness/Kelemahan</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	masyarakat, menghambat evaluasi efektivitas program.			
29.	Minimnya publikasi internasional dalam jurnal bereputasi (Scopus), membatasi visibilitas global hasil penelitian.	0,04	2	0,08
30.	Kurangnya praktik bahasa asing dalam lingkungan akademik, menyebabkan keterbatasan dalam daya saing internasional lulusan.	0,03	1	0,03
31.	Variasi metode asesmen masih perlu diperbaiki, agar lebih selaras dengan standar pembelajaran berbasis kompetensi.	0,02	2	0,05
32.	Kurangnya partisipasi dosen dalam konferensi ilmiah internasional, menghambat peningkatan standar penelitian dan akademik.	0,04	1	0,04
	Total	1,00		1,74

Tabel 37. Analisis Faktor Eksternal *Opportunities/Peluang*

No.	<i>Opportunities/Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1.	Penguatan strategi komunikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman VMTS di seluruh elemen akademik.	0,03	4	0,14
2.	Peningkatan keterlibatan alumni dan mitra eksternal dalam implementasi dan evaluasi VMTS.	0,03	3	0,08
3.	Integrasi VMTS dalam berbagai aspek kurikulum dan kegiatan akademik untuk memastikan internalisasi yang lebih kuat.	0,03	4	0,11
4.	Penyesuaian kebijakan internal agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan tantangan eksternal.	0,02	3	0,06

No.	<i>Opportunities/Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
5.	Penyempurnaan sistem tata kelola berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit kerja.	0,03	3	0,10
6.	Ekspansi kerjasama akademik internasional dalam bidang riset, pengabdian, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing global.	0,03	4	0,14
7.	Peningkatan kerja sama dengan universitas luar negeri, guna memperluas kesempatan <i>credit earning</i> dan <i>joint degree</i> .	0,03	4	0,14
8.	Optimalisasi sistem digital untuk layanan akademik dan non-akademik, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan.	0,03	3	0,08
9.	Penguatan program pengembangan <i>soft skills</i> dan minat bakat, memastikan mahasiswa memiliki kompetensi non-akademik yang lebih baik.	0,03	4	0,11
10.	Penguatan sistem <i>tracer study</i> untuk memonitor perkembangan karir alumni, mendukung evaluasi keberhasilan	0,02	3	0,06
11.	Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penyelenggaraan program kelas internasional dan pemanfaatan referensi global.	0,03	4	0,11
12.	Penguatan hubungan dengan mitra strategis melalui program kolaboratif yang melibatkan akademisi dan industri.	0,03	4	0,11
13.	Peningkatan program beasiswa dan insentif akademik bagi dosen untuk meraih gelar doktor dan jabatan fungsional lebih tinggi.	0,03	3	0,10
14.	Perluasan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional guna meningkatkan peluang penelitian dan publikasi ilmiah.	0,03	3	0,08

No.	<i>Opportunities/Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
15.	Optimalisasi program sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan daya saing akademik.	0,03	4	0,14
16.	Penguatan program pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan keterlibatan dosen dalam sektor publik.	0,02	3	0,06
17.	Ekspansi kerja sama dengan institusi dan industri dalam pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan daya saing akademik.	0,03	3	0,08
18.	Peningkatan alokasi dana untuk penelitian dan inovasi melalui hibah riset dan mekanisme insentif bagi dosen dan mahasiswa.	0,02	3	0,06
19.	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.	0,02	4	0,08
20.	Implementasi program inkubator bisnis di setiap fakultas untuk mendukung pengembangan inovasi dan entrepreneurship akademik.	0,03	4	0,14
21.	Penguatan kerja sama dengan industri dan pemerintah, untuk meningkatkan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan.	0,02	3	0,06
22.	Digitalisasi sistem pembelajaran dan asesmen, untuk meningkatkan efisiensi penyampaian materi dan monitoring capaian akademik.	0,03	4	0,11
23.	Ekspansi program studi berbasis penelitian dan inovasi, dengan meningkatkan integrasi riset dalam pembelajaran.	0,03	4	0,14
24.	Peningkatan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan, guna memastikan	0,03	4	0,14

No.	<i>Opportunities/Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	lulusan memiliki daya saing tinggi di sektor publik maupun swasta.			
25.	Penyediaan hibah riset untuk penelitian yang berorientasi publikasi internasional, meningkatkan visibilitas dan dampak akademik.	0,03	4	0,11
26.	Penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan industri, mendukung implementasi hasil penelitian terapan.	0,02	4	0,08
27.	Optimalisasi sistem pendampingan penelitian bagi mahasiswa, memastikan kualitas penelitian dan keterlibatan aktif dalam riset.	0,01	3	0,04
28.	Digitalisasi dan integrasi sistem penelitian dengan jurnal akademik nasional, memperkuat akses dan publikasi ilmiah.	0,03	3	0,10
29.	Meningkatkan kolaborasi dengan sektor industri dan pemerintah, guna mendukung implementasi ilmu dan teknologi dalam PkM.	0,03	4	0,11
30.	Optimalisasi sistem pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa, untuk meningkatkan efektivitas interaksi dengan masyarakat.	0,03	3	0,08
31.	Penyediaan dana dan fasilitas riset untuk mendukung penerapan teknologi berbasis akademik, meningkatkan daya saing program PkM.	0,03	4	0,11
32.	Pengembangan model PkM berkelanjutan dengan evaluasi dampak secara berkala, memastikan kesinambungan manfaat program bagi masyarakat.	0,03	3	0,08
33.	Penguatan jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan, guna meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan.	0,03	4	0,11

No.	<i>Opportunities/Peluang</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
34.	Peningkatan program intensif bahasa asing dan teknologi digital, memperkuat daya saing akademik dan profesional mahasiswa.	0,03	4	0,14
35.	Hibah riset dan insentif publikasi bagi mahasiswa dan dosen, guna meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi internasional.	0,03	4	0,14
36.	Penguatan pendampingan penulisan akademik dan mentoring publikasi, agar lebih banyak karya ilmiah memenuhi standar global.	0,03	3	0,08
Total		1,00		3,59

Tabel 38. Analisis Faktor Eksternal *Threats/Ancaman*

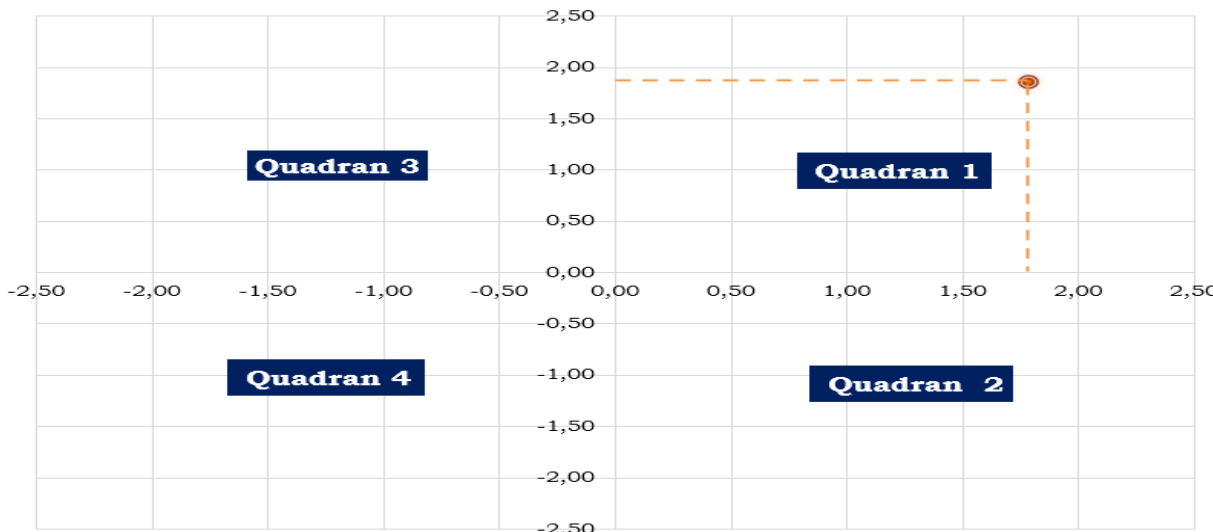
No.	<i>Threats/Ancaman</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1.	Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi pencapaian dan implementasi VMTS.	0,05	2	0,09
2.	Rendahnya partisipasi pengguna lulusan dalam implementasi strategi VMTS.	0,04	2	0,07
3.	Perubahan regulasi nasional dan internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan tata pamong dan tata kelola IPDN.	0,05	2	0,09
4.	Kompleksitas birokrasi yang berpotensi menghambat efektivitas pengambilan keputusan dalam institusi.	0,04	2	0,07
5.	Persaingan akademik yang semakin ketat dengan perguruan tinggi lainnya, baik dalam negeri maupun internasional.	0,05	2	0,09
6.	Kompetisi antar perguruan tinggi dalam menarik mahasiswa berkualitas semakin meningkat, menuntut inovasi strategi akademik.	0,05	2	0,09

No.	<i>Threats/Ancaman</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
7.	Minimnya keterlibatan mitra industri dalam mendukung pengembangan mahasiswa, menghambat koneksi dengan dunia profesional.	0,04	2	0,07
8.	Tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis digital, membutuhkan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen serta mahasiswa.	0,05	2	0,09
9.	Kompetisi yang semakin ketat dengan perguruan tinggi lain dalam hal perekrutan dosen berkualitas dan peningkatan akreditasi institusi.	0,03	1	0,03
10.	Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen.	0,05	2	0,09
11.	Kompetisi dengan perguruan tinggi lain dalam perekrutan SDM berkualitas dan peningkatan daya saing global.	0,05	1	0,05
12.	Minimnya partisipasi alumni dan mitra eksternal dalam mendukung penguatan sarana dan prasarana akademik serta riset.	0,05	2	0,09
13.	Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran dan keuangan, memerlukan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.	0,05	2	0,09
14.	Perubahan regulasi pendidikan tinggi yang dapat berdampak pada standar kurikulum dan metode evaluasi pembelajaran.	0,02	1	0,02
15.	Kompetisi akademik yang semakin ketat, menuntut peningkatan kualitas lulusan dan akreditasi institusi.	0,02	2	0,04
16.	Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran, membutuhkan kesiapan	0,04	2	0,07

No.	<i>Threats/Ancaman</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen.			
17.	Keterbatasan dana penelitian bagi mahasiswa pascasarjana, menghambat inovasi dan produktivitas akademik.	0,05	2	0,09
18.	Rendahnya keterlibatan mitra eksternal dalam mendukung penelitian, membatasi peluang pendanaan dan penerapan hasil riset.	0,05	1	0,05
19.	Kompetisi akademik yang semakin ketat, menuntut peningkatan standar penelitian dan publikasi ilmiah.	0,02	2	0,04
20.	Kompetisi akademik yang semakin ketat dalam program pemberdayaan masyarakat, menuntut peningkatan inovasi dan strategi implementasi.	0,03	1	0,03
21.	Kurangnya partisipasi mitra eksternal dalam mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat, menyebabkan terbatasnya dukungan finansial dan teknis.	0,03	2	0,06
22.	Minimnya keterlibatan evaluator eksternal dalam penilaian PkM, berpotensi mempengaruhi akurasi dan kredibilitas evaluasi dampak program.	0,05	1	0,05
23.	Kompetisi akademik yang semakin ketat dalam publikasi dan paten, menuntut peningkatan daya saing penelitian IPDN.	0,04	2	0,07
24.	Kurangnya hibah penelitian bagi mahasiswa, membatasi peluang mereka untuk menghasilkan riset inovatif.	0,05	1	0,05
25.	Minimnya keterlibatan evaluator eksternal dalam penilaian PkM, berpotensi mempengaruhi kredibilitas akademik.	0,04	2	0,07

No.	Threats/Ancaman	Bobot	Rating	Bobot x Rating
26.	Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur akademik dan teknologi, memerlukan investasi lebih lanjut untuk integrasi digitalisasi.	0,05	2	0,09
Total		2,00		1,74

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor internal organisasi IPDN memiliki nilai sebesar 1,79, menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi operasional institusi. Sementara itu, faktor eksternal memperoleh nilai 1,85, yang mencerminkan peluang dan ancaman dari lingkungan luar yang berdampak pada pengembangan IPDN. Dengan demikian, posisi organisasi IPDN dapat dikategorikan dalam Kuadran 1, yang berarti organisasi berada dalam kondisi yang memungkinkan pertumbuhan optimal, dengan strategi yang berorientasi pada ekspansi dan penguatan kompetensi internal serta pemanfaatan peluang eksternal secara maksimal untuk mencapai visi dan misi institusi.



Gambar 13. Diagram SWOT IPDN

Gambar 13 menunjukkan posisi IPDN dalam Kuadran 1 yang merepresentasikan institusi berada dalam kondisi strategis yang menguntungkan, ditandai oleh kekuatan internal yang solid serta peluang eksternal yang dapat dioptimalkan secara proaktif. Dalam dimensi akademik, IPDN telah mengembangkan sistem pendidikan berbasis kompetensi, seleksi mahasiswa yang ketat, serta kurikulum yang terstandarisasi secara nasional

dan terarah menuju pengakuan internasional. Hal ini menjadi fondasi utama bagi IPDN dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan siap berkontribusi aktif di sektor pemerintahan dan kebijakan publik.

Namun, posisi di Kuadran 1 tetap menuntut respon strategis terhadap tantangan kontemporer, seperti meningkatnya persaingan dalam penerimaan mahasiswa dan tuntutan pengembangan kapasitas infrastruktur akademik yang lebih inklusif tanpa mengurangi mutu pendidikan. Di samping itu, rendahnya keterlibatan sektor industri dalam pengembangan mahasiswa perlu segera diatasi agar ekosistem pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang terkoneksi dengan kebutuhan profesional dan praktik pemerintahan modern.

Dalam kerangka strategi pertumbuhan dan ekspansi yang relevan dengan posisi Kuadran 1, IPDN perlu menetapkan agenda peningkatan daya saing akademik secara komprehensif. Salah satu langkah paling krusial adalah pembukaan program magister pada seluruh fakultas, yang tidak hanya memperkuat fungsi pendidikan pascasarjana tetapi juga menjadi katalisator internasionalisasi kurikulum, pendalaman riset tematik, dan perluasan jejaring global. Program magister akan mempercepat peningkatan kapabilitas dosen, akreditasi internasional, dan kontribusi riset institusional terhadap isu-isu *global governance*.

Melalui digitalisasi pembelajaran, optimalisasi sistem informasi alumni, dan ekspansi program magister lintas fakultas, IPDN diyakini mampu menciptakan lompatan kualitas akademik dan memperkuat posisi institusi sebagai pusat unggulan pendidikan kepamongprajaan di kawasan Asia Tenggara. Langkah-langkah strategis ini menjamin bahwa layanan akademik dan non-akademik yang diberikan kepada mahasiswa dan lulusan bersifat adaptif terhadap dinamika global serta mampu menjawab tuntutan profesionalisme pemerintahan abad ke-21.

Tabel 39. Matriks SWOT VMTS

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Visi, misi, dan tujuan IPDN telah selaras dengan standar PCMEA (<i>Periodic, Clear, Measurable, Easy to achieve, Appropriate</i>). ❖ Evaluasi rutin terhadap VMTS dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terkini dan kebutuhan <i>stakeholders</i>. ❖ Strategi pencapaian standar telah dirancang dengan sosialisasi berkala untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika. ❖ Capaian VMTS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024.	❖ Pemahaman dan internalisasi VMTS oleh sivitas akademika, alumni, dan mitra masih belum optimal. ❖ Keterlibatan alumni dan mitra eksternal dalam penguatan VMTS masih rendah. ❖ Sosialisasi VMTS belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif. ❖ Evaluasi berkelanjutan masih kurang optimal dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan pencapaian VMTS.
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
<i>Opportunity</i> ❖ Penguatan strategi komunikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman VMTS di seluruh elemen akademik. ❖ Peningkatan keterlibatan alumni dan mitra eksternal dalam implementasi dan evaluasi VMTS. ❖ Integrasi VMTS dalam berbagai aspek kurikulum dan kegiatan akademik untuk memastikan internalisasi yang lebih kuat. ❖ Penyesuaian kebijakan internal agar lebih adaptif	❖ Optimalisasi evaluasi VMTS untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan sosialisasi agar lebih efektif bagi pemangku kepentingan. ❖ Penguatan keterlibatan alumni dan mitra eksternal melalui forum akademik, seminar, dan diskusi strategis berbasis visi dan misi. ❖ Integrasi VMTS dalam kurikulum dan akademik dengan pendekatan berbasis kompetensi serta penelitian.	❖ Kampanye sosialisasi inovatif, dengan pendekatan digital dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman VMTS. ❖ Penguatan peran alumni dan mitra eksternal, melalui kerja sama formal dan informal dalam penyusunan serta evaluasi VMTS. ❖ Pelatihan dan workshop bagi sivitas akademika, guna memperdalam pemahaman dan internalisasi VMTS. ❖ Evaluasi berbasis data secara berkelanjutan, untuk mengidentifikasi hambatan dan

terhadap perubahan regulasi dan tantangan eksternal.	❖ Fleksibilitas kebijakan internal sesuai standar PCMEA agar VMTS tetap selaras dengan regulasi terkini.	merumuskan solusi yang lebih efektif.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi pencapaian dan implementasi VMTS. ❖ Keterbatasan anggaran dalam mendukung program sosialisasi dan internalisasi VMTS. ❖ Minimnya mekanisme evaluasi berkelanjutan yang dapat menghambat perbaikan strategi pencapaian. ❖ Rendahnya partisipasi pengguna lulusan dalam implementasi strategi VMTS.	❖ Adaptasi VMTS terhadap regulasi melalui kajian akademik dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. ❖ Optimalisasi anggaran dengan evaluasi rutin agar sosialisasi VMTS tetap berjalan meskipun dana terbatas. ❖ Pemanfaatan capaian VMTS sebelumnya sebagai dasar peningkatan standar dan efektivitas strategi implementasi. ❖ Penguatan peran alumni melalui program keterlibatan dan diskusi dengan <i>stakeholders</i> untuk mendukung VMTS.	❖ Digitalisasi sosialisasi VMTS, memperluas jangkauan pemangku kepentingan dengan efisiensi anggaran. ❖ Evaluasi sistematis, mengidentifikasi kelemahan internalisasi VMTS dan meningkatkan efektivitas perbaikan. ❖ Keterlibatan alumni, melalui kerja sama dan insentif berbasis kinerja akademik untuk mendukung implementasi VMTS. ❖ Kebijakan adaptif, memastikan relevansi VMTS terhadap perubahan regulasi dan dinamika eksternal.

Matriks SWOT Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

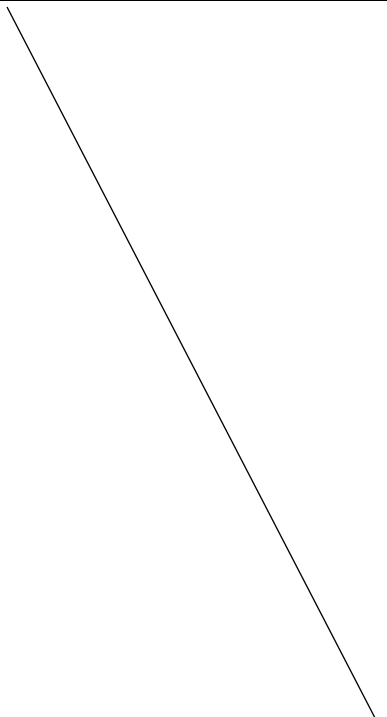
Faktor Internal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	❖ IPDN telah memiliki dokumen formal terkait SPMI yang mencakup kebijakan, pedoman, standar, dokumentasi, dan perangkat SPMI. ❖ Implementasi prinsip Good University Governance dengan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. ❖ Struktur organisasi dan tata kerja telah	❖ Mekanisme sosialisasi dan internalisasi SPMI belum sepenuhnya menjangkau seluruh unit akademik dan administratif. ❖ Sistem kepemimpinan dan tata pamong masih memiliki tantangan dalam efisiensi pengambilan keputusan. ❖ Keterlibatan mitra eksternal dalam pengembangan kebijakan dan evaluasi institusi masih terbatas. Sistem penjaminan mutu

Faktor Eksternal	terdokumentasi secara formal serta diperbarui sesuai kebutuhan kelembagaan. ❖ Keberfungsian lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas akademik. ❖ Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dan merata di semua unit kerja. ❖ Daya saing internasional IPDN masih perlu ditingkatkan, terutama dalam publikasi ilmiah dan kolaborasi akademik global.
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
❖ Optimalisasi strategi sosialisasi SPMI menggunakan platform digital untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika. Penyempurnaan sistem tata kelola berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit kerja. ❖ Ekspansi kerjasama akademik internasional dalam bidang riset, pengabdian, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing global. ❖ Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penyelenggaraan program kelas internasional dan pemanfaatan referensi global.	❖ Memanfaatkan dokumen formal SPMI sebagai dasar pengembangan sistem tata kelola berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas administrasi. ❖ Mengoptimalkan penerapan Good University Governance untuk memperkuat daya saing IPDN dalam kerja sama akademik global. ❖ Meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama internasional dengan berbagai institusi guna memperluas peluang penelitian dan inovasi akademik. ❖ Mengembangkan sistem penegakan kode etik berbasis digital agar lebih transparan dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. ❖ Memanfaatkan peningkatan jumlah	❖ Menggunakan platform digital sebagai solusi untuk meningkatkan sosialisasi dan internalisasi SPMI secara lebih luas. ❖ Mengembangkan kebijakan tata pamong yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. ❖ Menjalin lebih banyak kerja sama dengan mitra eksternal untuk mempercepat pengembangan kebijakan akademik dan peningkatan kualitas pendidikan. ❖ Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi untuk memastikan pemerataan implementasi di seluruh unit kerja. ❖ Memanfaatkan kerja sama dengan institusi internasional untuk meningkatkan publikasi ilmiah dan daya saing global IPDN.

❖ Penguatan hubungan dengan mitra strategis melalui program kolaboratif yang melibatkan akademisi dan industri.	kerja sama dengan mitra strategis untuk memperkuat program pembelajaran berbasis internasional.	
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Perubahan regulasi nasional dan internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan tata pamong dan tata kelola IPDN. ❖ Kompleksitas birokrasi yang berpotensi menghambat efektivitas pengambilan keputusan dalam institusi. Persaingan akademik yang semakin ketat dengan perguruan tinggi lainnya, baik dalam negeri maupun internasional.	❖ Adaptasi kebijakan tata kelola, melalui tim evaluasi regulasi untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan. ❖ Digitalisasi tata pamong, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas birokrasi dalam pengambilan keputusan. ❖ Penguatan kerja sama internasional, sebagai strategi meningkatkan daya saing IPDN terhadap perguruan tinggi lain. ❖ Optimalisasi <i>Good University Governance</i>, untuk menghadapi tantangan regulasi dan birokrasi yang semakin kompleks. ❖ Penerapan sistem penegakan kode etik, guna menjaga transparansi dan integritas akademik.	❖ Mengembangkan kebijakan tata pamong yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan regulasi pendidikan tinggi. ❖ Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan efektivitas pengambilan keputusan melalui pelatihan manajerial bagi pejabat akademik. ❖ Memperkuat mekanisme evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan konsistensi implementasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja. ❖ Mengadakan forum akademik internasional untuk meningkatkan keterlibatan mitra eksternal dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan IPDN. ❖ Membangun sistem tata kelola berbasis data guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 40. Matriks SWOT Kriteria Mahasiswa IPDN

Faktor Internal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	❖ Seleksi mahasiswa berbasis kompetensi yang ketat, memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima. ❖ Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap	❖ Jumlah mahasiswa yang mengikuti program kredit internasional masih rendah, menghambat pengalaman akademik global.

 Faktor Eksternal	layanan akademik dan non-akademik tinggi, mendukung pengalaman pendidikan yang optimal. ❖ <i>Tracer study</i> lulusan dilakukan secara berkala, memastikan evaluasi terhadap relevansi kompetensi dengan dunia kerja. ❖ Penerapan sertifikasi kompetensi bagi lulusan, meningkatkan daya saing alumni di sektor pemerintahan dan profesional.	❖ Kurangnya optimalisasi sistem informasi alumni, meskipun telah ditetapkan sebagai standar evaluasi lulusan. ❖ Pengembangan minat dan bakat belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengurangi potensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik.
	<i>Opportunity</i>	Strategi SO
❖ Peningkatan kerja sama dengan universitas luar negeri, guna memperluas kesempatan kredit earning dan <i>joint degree</i>. ❖ Optimalisasi sistem digital untuk layanan akademik dan non-akademik, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. ❖ Penguatan program pengembangan <i>soft skills</i> dan minat bakat, memastikan mahasiswa memiliki kompetensi non-akademik yang lebih baik. ❖ Penguatan sistem <i>tracer study</i> untuk memonitor perkembangan karir alumni, mendukung evaluasi keberhasilan lulusan di dunia kerja.	❖ Memanfaatkan seleksi berbasis kompetensi untuk meningkatkan kerja sama dengan universitas luar negeri dalam program kredit earning dan <i>joint degree</i>. ❖ Mengintegrasikan <i>tracer study</i> dengan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas evaluasi lulusan dan koneksi dengan dunia kerja. ❖ Mengembangkan program sertifikasi kompetensi yang terhubung dengan industri global guna meningkatkan daya saing mahasiswa. ❖ Memanfaatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik untuk memperkuat program pengembangan <i>soft skills</i> dan minat bakat.	❖ Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program kredit internasional dengan memperluas kerja sama akademik global. ❖ Mengoptimalkan sistem informasi alumni dengan integrasi <i>tracer study</i> berbasis digital untuk meningkatkan pemantauan karir lulusan. ❖ Mengembangkan program minat dan bakat berbasis teknologi dan kolaborasi dengan mitra eksternal untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. ❖
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Kompetisi antar perguruan tinggi dalam menarik mahasiswa	❖ Memanfaatkan seleksi berbasis kompetensi untuk meningkatkan	❖ Meningkatkan keterlibatan mitra industri dalam program kredit

berkualitas semakin meningkat, menuntut inovasi strategi akademik.	daya saing mahasiswa dalam menghadapi kompetisi antar perguruan tinggi.	internasional dan <i>tracer study</i> untuk memperkuat koneksi mahasiswa dengan dunia kerja.
❖ Minimnya keterlibatan mitra industri dalam mendukung pengembangan mahasiswa, menghambat koneksi dengan dunia profesional.	❖ Mengembangkan sistem <i>tracer study</i> yang lebih kuat untuk meningkatkan koneksi mahasiswa dengan dunia profesional dan industri.	❖ Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital yang lebih inklusif untuk memastikan kesiapan mahasiswa dan dosen dalam menghadapi tantangan teknologi.
❖ Tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis digital, membutuhkan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen serta mahasiswa.	❖ Memanfaatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik untuk memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan pembelajaran berbasis digital.	❖ Mengoptimalkan program pengembangan minat dan bakat dengan pendekatan berbasis industri dan akademik untuk meningkatkan daya saing mahasiswa.

Tabel 41. Matriks SWOT Kriteria Sumber Daya Manusia IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Rasio dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar pendidikan tinggi, memastikan efektivitas pembelajaran. ❖ Tingginya persentase dosen bersertifikat profesi (Serdos) meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme akademik. ❖ Program pengembangan akademik mendorong dosen untuk meraih gelar doktor, memperkuat kapasitas penelitian dan pendidikan. ❖ Tingginya persentase dosen yang mampu menggunakan media pembelajaran modern meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar. ❖ Keberadaan dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar	❖ Proporsi dosen dengan jabatan akademik Guru Besar masih rendah, menantang dalam peningkatan reputasi akademik. ❖ Keterbatasan anggaran dalam mendukung penelitian dan pengembangan karir dosen dapat menghambat inovasi akademik. ❖ Mekanisme evaluasi kinerja SDM belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal di seluruh unit akademik. ❖ Keterlibatan dosen dalam organisasi akademik dan profesi internasional masih terbatas, menghambat jejaring keilmuan global. ❖ Sistem monitoring tugas pokok dan tambahan dosen masih perlu diperbaiki untuk memastikan

Faktor Eksternal	dan Lektor Kepala memperkuat kualitas keilmuan dan reputasi institusi.	keseimbangan beban kerja.
<i>Opportunity</i>	Strategi SO	Strategi WO
❖ Peningkatan program beasiswa dan insentif akademik bagi dosen untuk meraih gelar doktor dan jabatan fungsional lebih tinggi. ❖ Digitalisasi sistem pembelajaran dan administrasi SDM untuk meningkatkan efisiensi tata kelola akademik. ❖ Perluasan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional guna meningkatkan peluang penelitian dan publikasi ilmiah. ❖ Optimalisasi program sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan daya saing akademik. ❖ Penguatan program pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan keterlibatan dosen dalam sektor publik.	❖ Memanfaatkan rasio dosen-mahasiswa yang ideal untuk meningkatkan efektivitas program sertifikasi kompetensi dan beasiswa akademik. ❖ Menggunakan dosen bersertifikat profesi sebagai penggerak utama dalam digitalisasi sistem pembelajaran dan administrasi SDM. ❖ Mengembangkan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional guna mempercepat peningkatan jumlah dosen dengan gelar doktor. ❖ Memanfaatkan keahlian dosen dalam teknologi pembelajaran untuk memperkuat program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi akademik.	❖ Mengembangkan sistem evaluasi kinerja SDM berbasis digital untuk meningkatkan integrasi dan efektivitas mekanisme pemantauan akademik. ❖ Memanfaatkan kerja sama dengan institusi internasional untuk memperkuat keterlibatan dosen dalam organisasi akademik dan profesi global. ❖ Menggunakan program pengabdian masyarakat sebagai wadah untuk meningkatkan jejaring keilmuan global bagi dosen. ❖ Mengembangkan mekanisme monitoring tugas pokok dan tambahan dosen melalui platform digital guna meningkatkan keseimbangan beban kerja.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Perubahan regulasi dalam bidang pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi standar SDM IPDN dan kebijakan akademik. ❖ Kompetisi yang semakin ketat dengan perguruan tinggi lain dalam hal perekrutan dosen berkualitas dan peningkatan akreditasi institusi. ❖ Kurangnya partisipasi alumni dan mitra	❖ Menyesuaikan kebijakan akademik dengan perubahan regulasi melalui penguatan keterlibatan dosen dalam pengambilan kebijakan institusi. ❖ Memanfaatkan dosen dengan sertifikasi profesi sebagai instruktur utama dalam pelatihan SDM untuk meningkatkan daya saing akademik.	❖ Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif untuk mendukung penelitian dan pengembangan karir dosen guna menghadapi kompetisi akademik. ❖ Mengembangkan program mentoring akademik bagi dosen muda untuk meningkatkan keterlibatan dalam organisasi akademik global. ❖ Memanfaatkan hibah internasional untuk mengatasi keterbatasan

eksternal dalam mendukung pengembangan SDM dan penelitian IPDN.	❖ Mengoptimalkan kerja sama nasional dan internasional untuk mengatasi tantangan perekrutan dosen berkualitas dan peningkatan akreditasi.	dana dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan.
❖ Keterbatasan dana institusi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan.	❖ Memanfaatkan tenaga akademik senior dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat posisi IPDN dalam kompetisi akademik.	❖ Mengoptimalkan kolaborasi dengan alumni dan mitra eksternal dalam penelitian dan peningkatan kapasitas dosen.
❖ Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen.	❖ Mengembangkan sistem digital untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi.	❖ Mengembangkan sistem pelatihan berbasis teknologi guna meningkatkan kompetensi dosen dalam integrasi digitalisasi pembelajaran.

Tabel 42. Matriks SWOT Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Kelengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah memenuhi standar dengan kepuasan <i>stakeholder</i> mencapai 85%. ❖ Sistem keuangan yang transparan dengan pelaksanaan audit internal tiap semester dan eksternal tiap tahun untuk memastikan akuntabilitas. ❖ Tersedianya alokasi dana operasional pembelajaran dengan standar perencanaan dan evaluasi berkala guna meningkatkan efektivitas pembiayaan akademik. ❖ Fasilitas laboratorium untuk riset dan PkM telah memenuhi standar dan tersedia di seluruh program studi.	❖ Pemanfaatan dana penelitian yang masih rendah, dengan hanya 5% bersumber dari APBN, menghambat inovasi dan publikasi ilmiah. ❖ Kurangnya pendampingan akademik dalam penyusunan paten dan publikasi internasional, membatasi capaian riset yang bereputasi. ❖ Digitalisasi sistem keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan efisiensi alokasi anggaran. ❖ Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium penelitian, dengan tingkat penggunaan hanya 80% untuk riset akademik. ❖ Minimnya keterlibatan industri dalam

Faktor Eksternal	❖ Dukungan terhadap publikasi dan kekayaan intelektual melalui alokasi dana khusus untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	pendanaan dan kerja sama penelitian, menyebabkan terbatasnya dukungan eksternal terhadap inovasi akademik.
<i>Opportunity</i>	Strategi SO	Strategi WO
❖ Optimalisasi sistem digital dalam manajemen keuangan dan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. ❖ Ekspansi kerja sama dengan institusi dan industri dalam pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan daya saing akademik. ❖ Peningkatan alokasi dana untuk penelitian dan inovasi melalui hibah riset dan mekanisme insentif bagi dosen dan mahasiswa. ❖ Penguatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. ❖ Implementasi program inkubator bisnis di setiap fakultas untuk mendukung pengembangan inovasi dan entrepreneurship akademik.	❖ Memanfaatkan sistem keuangan yang transparan untuk meningkatkan optimalisasi digitalisasi manajemen keuangan guna efisiensi alokasi anggaran. ❖ Menggunakan alokasi dana penelitian sebagai modal dalam memperkuat kerja sama dengan industri dan institusi dalam pendanaan riset. ❖ Memaksimalkan pemanfaatan laboratorium yang telah memenuhi standar untuk mendukung inkubator bisnis di setiap fakultas dan program studi. ❖ Meningkatkan efektivitas sistem evaluasi keuangan agar hibah riset dapat digunakan lebih optimal dalam inovasi akademik. ❖ Memanfaatkan tingginya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana-prasarana untuk menarik lebih banyak mitra industri dalam kerja sama strategis.	❖ Mengembangkan program pelatihan akademik dalam penyusunan paten dan publikasi internasional guna meningkatkan capaian riset berkualitas. ❖ Memanfaatkan ekspansi kerja sama dengan institusi dalam meningkatkan keterlibatan industri untuk pendanaan dan inovasi akademik. ❖ Mengembangkan sistem keuangan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi, efisiensi alokasi anggaran, dan monitoring penggunaan dana. ❖ Menyesuaikan strategi pemanfaatan laboratorium riset dengan kebutuhan penelitian berbasis inovasi agar lebih optimal. ❖ Memanfaatkan hibah riset untuk memperluas penggunaan dana penelitian dan meningkatkan tingkat publikasi akademik internasional.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Perubahan regulasi pendidikan tinggi dan keuangan yang dapat	❖ Menggunakan sistem audit keuangan sebagai mekanisme adaptasi	❖ Mengoptimalkan mekanisme alokasi anggaran untuk

mempengaruhi kebijakan pembiayaan serta alokasi dana akademik. ❖ Kompetisi dengan perguruan tinggi lain dalam perekrutan SDM berkualitas dan peningkatan daya saing global. ❖ Keterbatasan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat, menghambat publikasi internasional dan pengembangan inovasi akademik. ❖ Minimnya partisipasi alumni dan mitra eksternal dalam mendukung penguatan sarana dan prasarana akademik serta riset. ❖ Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran dan keuangan, memerlukan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.	terhadap perubahan regulasi pendidikan tinggi dan kebijakan pembiayaan. ❖ Memaksimalkan kerja sama dengan mitra akademik internasional guna meningkatkan daya saing global dan perekrutan SDM berkualitas. ❖ Memanfaatkan fasilitas laboratorium standar sebagai daya tarik bagi industri agar lebih terlibat dalam pendanaan dan kerja sama penelitian. ❖ Mengembangkan sistem evaluasi keuangan yang lebih kuat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Menyesuaikan strategi digitalisasi keuangan untuk menghadapi tantangan integrasi teknologi pembelajaran dan administrasi akademik.	menghadapi keterbatasan dana penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan inovasi. ❖ Memanfaatkan kerja sama dengan alumni dan mitra eksternal untuk penguatan sarana dan prasarana akademik serta riset. ❖ Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan industri dalam mendukung program penelitian dengan menghubungkan riset akademik ke dunia bisnis. ❖ Mengembangkan strategi efisiensi keuangan guna mengatasi tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran dan administrasi akademik. ❖ Memanfaatkan mekanisme hibah riset dan pendanaan eksternal untuk mengoptimalkan laboratorium penelitian dan program inkubator bisnis.
--	---	--

Tabel 43. Matriks SWOT Kriteria Pendidikan IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Kurikulum berbasis KKNi dan OBE telah ditetapkan sebagai standar utama, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan akademik dan profesional. ❖ Evaluasi dan peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala, memastikan relevansi dengan perkembangan	❖ Minimnya keterlibatan industri dalam kurikulum, menyebabkan kesenjangan antara akademik dan kebutuhan profesional. ❖ Belum optimalnya implementasi digitalisasi pendidikan, terutama dalam pengelolaan perangkat pembelajaran berbasis sistem informasi.

Faktor Eksternal	ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. ❖ Sistem pembelajaran berbasis interaktif dan saintifik, dengan integrasi metode <i>Student-Centered Learning</i>, <i>Case Method</i>, dan <i>Project-Based Learning</i>. ❖ Proses asesmen berbasis kompetensi yang mendukung pemetaan capaian pembelajaran dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. ❖ Penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi sistematis dengan survei kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan eksternal.	❖ Evaluasi kinerja dosen berbasis masukan mahasiswa masih perlu diperluas, terutama dalam mendapatkan umpan balik dari alumni dan pemangku kepentingan eksternal.
<i>Opportunity</i>	Strategi SO	Strategi WO
❖ Penguatan kerja sama dengan industri dan pemerintah, untuk meningkatkan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan. ❖ Digitalisasi sistem pembelajaran dan asesmen, untuk meningkatkan efisiensi penyampaian materi dan monitoring capaian akademik. Ekspansi program studi berbasis penelitian dan inovasi, dengan meningkatkan integrasi riset dalam pembelajaran. ❖ Peningkatan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan, guna memastikan lulusan memiliki daya saing tinggi di sektor publik maupun swasta.	❖ Mengoptimalkan kurikulum berbasis KKNI dan OBE untuk memperkuat relevansi akademik dengan kebutuhan industri dan pemerintahan. ❖ Memanfaatkan evaluasi dan peninjauan kurikulum berkala untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pasar kerja. ❖ Mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis interaktif dan saintifik dengan program digitalisasi guna meningkatkan efektivitas penyampaian materi. ❖ Memanfaatkan asesmen berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan serta meningkatkan kesiapan	❖ Mengembangkan kerja sama dengan industri dan pemerintah untuk mempercepat integrasi kurikulum dengan dunia profesional guna mengurangi kesenjangan akademik. ❖ Memanfaatkan digitalisasi sistem pembelajaran dan asesmen untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan perangkat pembelajaran berbasis sistem informasi. ❖ Menggunakan feedback dari alumni dan <i>stakeholder</i> eksternal untuk memperluas cakupan evaluasi kinerja dosen dan meningkatkan efektivitas pengajaran. ❖ Mengembangkan platform pembelajaran digital guna mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa

	lulusan dalam dunia kerja. ❖ Menggunakan hasil survei kepuasan mahasiswa dan <i>stakeholder</i> sebagai dasar peningkatan inovasi dalam pembelajaran dan asesmen akademik.	dan meningkatkan akses terhadap materi akademik.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Perubahan regulasi pendidikan tinggi yang dapat berdampak pada standar kurikulum dan metode evaluasi pembelajaran. ❖ Kompetisi akademik yang semakin ketat, menuntut peningkatan kualitas lulusan dan akreditasi institusi. ❖ Tantangan dalam integrasi teknologi pembelajaran, membutuhkan kesiapan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dosen.	❖ Mengadaptasi kurikulum berbasis standar global guna menghadapi perubahan regulasi pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi metode evaluasi pembelajaran. ❖ Menggunakan metode pembelajaran interaktif dan asesmen berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam kompetisi akademik yang semakin ketat. ❖ Memanfaatkan evaluasi kurikulum berkala untuk memastikan kesiapan IPDN dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan standar akreditasi nasional dan internasional. ❖ Mengembangkan digitalisasi sistem pembelajaran sebagai respons terhadap tantangan integrasi teknologi pembelajaran dan kesiapan infrastruktur akademik. ❖ Memperkuat penjaminan mutu berbasis survei kepuasan mahasiswa dan <i>stakeholder</i> guna meningkatkan efektivitas asesmen akademik di tengah kompetisi akademik.	❖ Memanfaatkan kerja sama dengan industri dan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan mengatasi kesenjangan akademik dengan kebutuhan profesional. ❖ Mengembangkan strategi digitalisasi pendidikan guna memastikan kesiapan sistem pembelajaran menghadapi tantangan integrasi teknologi akademik. ❖ Mengadaptasi sistem evaluasi berbasis masukan <i>stakeholder</i> eksternal untuk memperbaiki implementasi kurikulum dan meningkatkan daya saing lulusan. ❖ Menyesuaikan platform pembelajaran digital guna mengatasi keterbatasan dalam pengelolaan perangkat akademik berbasis sistem informasi. ❖ Mengembangkan program penguatan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi dan kesiapan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Tabel 44. Matriks SWOT Kriteria Penelitian IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Atmosfer budaya penelitian berkembang, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penelitian dasar dengan pendanaan kompetitif. ❖ MoU dan kerja sama penelitian dengan mitra eksternal, meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam penelitian terapan. ❖ Repositori digital IPDN telah diimplementasikan, memungkinkan akses terbuka terhadap hasil penelitian. ❖ Evaluasi penelitian dilakukan oleh akademisi dan praktisi eksternal, memastikan kualitas dan relevansi penelitian. ❖ Hasil penelitian mencakup publikasi dan rekomendasi kebijakan, memperkuat kontribusi akademik dan implementasi nyata di sektor publik.	❖ Kurangnya publikasi penelitian dasar di jurnal internasional, menyebabkan keterbatasan dampak ilmiah global. ❖ Belum optimalnya implementasi hasil penelitian terapan, membatasi penerapan nyata dalam kebijakan dan industri. ❖ Keterbatasan akses ke jurnal internasional bereputasi, menghambat visibilitas global penelitian IPDN.
Faktor Eksternal	Opportunity	Strategi SO
	❖ Menyediakan hibah riset untuk penelitian yang berorientasi publikasi internasional, meningkatkan visibilitas dan dampak akademik. ❖ Penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan industri, mendukung implementasi hasil penelitian terapan. ❖ Optimalisasi sistem pendampingan penelitian bagi mahasiswa,	❖ Menyediakan hibah riset yang lebih luas guna meningkatkan jumlah publikasi penelitian dasar di jurnal internasional bereputasi. ❖ Memanfaatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan industri untuk mempercepat penerapan hasil penelitian terapan dalam kebijakan publik dan sektor bisnis. ❖ Mengembangkan sistem pendampingan penelitian bagi mahasiswa untuk memastikan kualitas riset

memastikan kualitas penelitian dan keterlibatan aktif dalam riset. ❖ Digitalisasi dan integrasi sistem penelitian dengan jurnal akademik nasional, memperkuat akses dan publikasi ilmiah.	terintegrasi dengan jurnal akademik nasional dan internasional guna meningkatkan akses publikasi. ❖ Memanfaatkan evaluasi penelitian oleh akademisi dan praktisi eksternal untuk meningkatkan kualitas riset serta daya saing akademik secara global. ❖ Menggunakan hasil penelitian yang mencakup publikasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan sektor industri.	serta peningkatan publikasi ilmiah. ❖ Mengoptimalkan digitalisasi dan integrasi sistem penelitian guna memperluas akses ke jurnal internasional serta meningkatkan visibilitas global penelitian IPDN. ❖ Menjalin kemitraan dengan penerbit jurnal bereputasi internasional guna meningkatkan akses penelitian IPDN di level global.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Keterbatasan dana penelitian bagi mahasiswa pascasarjana, menghambat inovasi dan produktivitas akademik. ❖ Rendahnya keterlibatan mitra eksternal dalam mendukung penelitian, membatasi peluang pendanaan dan penerapan hasil riset. ❖ Kompetisi akademik yang semakin ketat, menuntut peningkatan standar penelitian dan publikasi ilmiah.	❖ Mengalokasikan pendanaan kompetitif untuk mengatasi keterbatasan dana penelitian bagi mahasiswa pascasarjana, sehingga inovasi akademik tetap berkembang. ❖ Memaksimalkan MoU dan kerja sama penelitian dengan mitra eksternal untuk meningkatkan dukungan pendanaan dan implementasi hasil penelitian dalam sektor industri. ❖ Menggunakan repositori digital penelitian IPDN sebagai sarana promosi riset kepada mitra eksternal agar lebih banyak pihak terlibat dalam pendanaan penelitian. ❖ Memanfaatkan evaluasi penelitian oleh akademisi dan praktisi eksternal untuk memperkuat standar	❖ Mengembangkan mekanisme insentif dan pendanaan bagi mahasiswa pascasarjana untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional serta inovasi penelitian. ❖ Menjalin lebih banyak kemitraan dengan sektor industri dan akademik global guna mengatasi keterbatasan dukungan eksternal terhadap penelitian IPDN. ❖ Mengintegrasikan pendampingan penelitian dengan sistem evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan kualitas riset dan mengatasi hambatan dalam akses jurnal internasional. ❖ Memaksimalkan penggunaan platform penelitian terbuka untuk mengatasi keterbatasan akses jurnal bereputasi internasional bagi dosen dan mahasiswa.

	penelitian IPDN guna bersaing dengan institusi akademik lainnya. ❖ Memaksimalkan publikasi dan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan daya saing IPDN dalam kompetisi akademik global.	❖ Mengembangkan strategi kolaboratif antara akademisi, mahasiswa, dan mitra eksternal guna meningkatkan efektivitas penelitian serta mitigasi terhadap kompetisi akademik yang semakin ketat.
--	--	--

Tabel 45. Matriks SWOT Kriteria PkM IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Kebijakan akademik yang mendorong integrasi penelitian dan PkM, memastikan keberlanjutan program berbasis riset. ❖ Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. ❖ Pedoman pelaksanaan PkM telah mengakomodasi standar mutu dan keselamatan kerja, memastikan kenyamanan pelaksana dan masyarakat. ❖ Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data telah diterapkan, memperkuat pengukuran dampak dan efektivitas program PkM. ❖ Integrasi PkM dengan capaian pembelajaran lulusan, memastikan keterkaitan antara pendidikan akademik dan keterlibatan sosial.	❖ Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang dapat digunakan dalam PkM, menghambat penerapan inovasi akademik berbasis riset. ❖ Terbatasnya program pendampingan untuk dosen dan mahasiswa dalam interaksi langsung dengan masyarakat, menyebabkan kurang optimalnya implementasi. ❖ Kurangnya keberlanjutan program pasca intervensi PkM, mengakibatkan kurangnya dampak jangka panjang terhadap masyarakat. ❖ Minimnya monitoring jangka panjang terhadap dampak pemberdayaan masyarakat, menghambat evaluasi efektivitas program.
Faktor Eksternal		
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
❖ Meningkatkan kolaborasi dengan	❖ Mengoptimalkan integrasi penelitian dan	❖ Mengembangkan infrastruktur dan

sektor industri dan pemerintah, guna mendukung implementasi ilmu dan teknologi dalam PkM. Optimalisasi sistem pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa, untuk meningkatkan efektivitas interaksi dengan masyarakat. ❖ Penyediaan dana dan fasilitas riset untuk mendukung penerapan teknologi berbasis akademik, meningkatkan daya saing program PkM. ❖ Pengembangan model PkM berkelanjutan dengan evaluasi dampak secara berkala, memastikan kesinambungan manfaat program bagi masyarakat.	PkM dengan kolaborasi sektor industri dan pemerintah guna meningkatkan penerapan inovasi berbasis akademik. ❖ Memanfaatkan tingginya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dengan mitra eksternal. ❖ Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan kesinambungan manfaat PkM bagi masyarakat. ❖ Memanfaatkan pedoman pelaksanaan PkM yang sudah sesuai standar untuk mendukung program berkelanjutan dengan evaluasi dampak berkala. ❖ Menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan agar lebih terintegrasi dengan program PkM, sehingga kompetensi akademik dan keterlibatan sosial dapat meningkat.	teknologi yang lebih maju guna meningkatkan efektivitas implementasi PkM berbasis riset. ❖ Memanfaatkan program pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat. ❖ Mengoptimalkan dukungan dana dan fasilitas riset untuk memperkuat penerapan teknologi akademik dalam PkM. ❖ Menjalin kerja sama dengan mitra industri dan pemerintah untuk memastikan kesinambungan program pasca intervensi PkM. ❖ Mengembangkan model PkM berbasis evaluasi dampak berkala guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Kompetisi akademik yang semakin ketat dalam program pemberdayaan masyarakat, menuntut peningkatan inovasi dan strategi implementasi. ❖ Kurangnya partisipasi mitra eksternal dalam mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat, menyebabkan terbatasnya	❖ Mengoptimalkan integrasi PkM dengan penelitian akademik agar IPDN tetap unggul dalam kompetisi akademik di bidang pemberdayaan masyarakat. ❖ Memanfaatkan sistem monitoring berbasis data untuk meningkatkan keterlibatan mitra eksternal dalam mendukung PkM. ❖ Mengembangkan pedoman pelaksanaan PkM berbasis evaluasi	❖ Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan teknologi guna memastikan kesiapan menghadapi kompetisi akademik dalam pemberdayaan masyarakat. ❖ Memanfaatkan mekanisme pendampingan berbasis digital untuk memperkuat interaksi dosen dan mahasiswa dengan masyarakat secara efektif.

dukungan finansial dan teknis. ❖ Minimnya keterlibatan evaluator eksternal dalam penilaian PkM, berpotensi mempengaruhi akurasi dan kredibilitas evaluasi dampak program.	eksternal guna meningkatkan kredibilitas dan akurasi dampak program. ❖ Memanfaatkan tingginya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam PkM untuk memperkuat daya saing IPDN dalam inovasi akademik. ❖ Menyesuaikan strategi kebijakan PkM agar lebih fleksibel terhadap perubahan tren dan kompetisi akademik yang semakin ketat.	❖ Mengembangkan sistem evaluasi jangka panjang untuk meningkatkan kredibilitas program PkM dan keterlibatan mitra eksternal. ❖ Menjalin lebih banyak kerja sama dengan lembaga eksternal guna mendukung pendanaan dan penelitian berbasis PkM. ❖ Mengembangkan strategi inovasi program berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga PkM memiliki dampak lebih luas dan berkelanjutan.
---	---	--

Tabel 46. Matriks SWOT Kriteria Luaran Tridharma IPDN

Faktor Internal	Strength	Weakness
	❖ Kurikulum telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran KKNI, memastikan kesesuaian standar pendidikan tinggi. ❖ Publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan, mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam penelitian akademik. ❖ Persentase kepuasan pengguna lulusan dalam kompetensi utama, bahasa asing, dan teknologi informasi tinggi, memperkuat daya saing alumni. ❖ Integrasi penelitian dalam kurikulum dan tugas akhir, memastikan keterkaitan antara teori dan penerapan akademik. ❖ Keunggulan IPDN dalam mencetak ASN, meningkatkan peluang lulusan dalam sektor pemerintahan.	❖ Minimnya publikasi internasional dalam jurnal bereputasi (Scopus), membatasi visibilitas global hasil penelitian. ❖ Kurangnya praktik bahasa asing dalam lingkungan akademik, menyebabkan keterbatasan dalam daya saing internasional lulusan. ❖ Variasi metode asesmen masih perlu diperbaiki, agar lebih selaras dengan standar pembelajaran berbasis kompetensi. ❖ Kurangnya partisipasi dosen dalam konferensi ilmiah internasional, menghambat peningkatan standar penelitian dan akademik.
Faktor Eksternal		

<i>Opportunity</i>	Strategi SO	Strategi WO
❖ Penguatan jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan, guna meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan. ❖ Peningkatan program intensif bahasa asing dan teknologi digital, memperkuat daya saing akademik dan profesional mahasiswa. ❖ Hibah riset dan insentif publikasi bagi mahasiswa dan dosen, guna meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi internasional. ❖ Penguatan pendampingan penulisan akademik dan mentoring publikasi, agar lebih banyak karya ilmiah memenuhi standar global.	❖ Memanfaatkan kurikulum berbasis KKNI untuk memperkuat jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan, guna meningkatkan peluang karir lulusan. ❖ Mengoptimalkan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan agar mahasiswa lebih terlibat dalam riset yang berorientasi publikasi internasional. ❖ Memanfaatkan kepuasan pengguna lulusan untuk menarik lebih banyak mitra eksternal dalam program pengembangan akademik dan profesional mahasiswa. ❖ Mengintegrasikan penelitian dalam kurikulum dan tugas akhir dengan program pendampingan penulisan akademik guna meningkatkan standar publikasi global. ❖ Memaksimalkan keunggulan IPDN dalam mencetak ASN untuk memperkuat daya saing lulusan dalam dunia pemerintahan dan kebijakan publik.	❖ Mengembangkan program intensif bahasa asing dan teknologi digital guna meningkatkan daya saing akademik dan profesional mahasiswa di tingkat global. ❖ Memanfaatkan hibah riset dan insentif publikasi bagi mahasiswa dan dosen untuk mengatasi rendahnya jumlah publikasi internasional. ❖ Memperkuat pendampingan penulisan akademik dan mentoring publikasi guna meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam konferensi ilmiah internasional. ❖ Menyesuaikan variasi metode asesmen dengan standar pembelajaran berbasis kompetensi guna meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri dan akademik. ❖ Mengembangkan program pelatihan akademik berbasis internasional untuk meningkatkan keterlibatan dalam riset global dan memperbaiki praktik bahasa asing.
<i>Threats</i>	Strategi ST	Strategi WT
❖ Kompetisi akademik yang semakin ketat dalam publikasi dan paten, menuntut peningkatan daya saing penelitian IPDN. ❖ Kurangnya hibah penelitian bagi mahasiswa, membatasi peluang mereka untuk	❖ Mengoptimalkan kurikulum berbasis KKNI untuk menghadapi kompetisi akademik dalam publikasi dan paten, dengan memastikan kesesuaian standar global. ❖ Memaksimalkan integrasi penelitian dalam kurikulum agar mahasiswa lebih siap	❖ Memanfaatkan hibah penelitian internasional untuk meningkatkan jumlah publikasi dan mengatasi minimnya keterlibatan mahasiswa dalam riset inovatif. ❖ Mengembangkan pendekatan digitalisasi dalam asesmen akademik guna meningkatkan kualitas evaluasi dan

menghasilkan riset inovatif. ❖ Minimnya keterlibatan evaluator eksternal dalam penilaian PkM, berpotensi mempengaruhi kredibilitas akademik. ❖ Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur akademik dan teknologi, memerlukan investasi lebih lanjut untuk integrasi digitalisasi.	berkontribusi dalam inovasi akademik dan riset global. ❖ Menyesuaikan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan dengan standar jurnal internasional, guna meningkatkan visibilitas penelitian IPDN. ❖ Memanfaatkan keunggulan IPDN dalam mencetak ASN untuk memperkuat daya saing lulusan dalam birokrasi pemerintahan dan sektor kebijakan publik. ❖ Mengembangkan program <i>tracer study</i> yang lebih komprehensif guna menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur akademik dan teknologi.	memastikan akurasi capaian pembelajaran. ❖ Memanfaatkan kerja sama dengan evaluator eksternal dalam penilaian PkM guna meningkatkan kredibilitas akademik dan riset mahasiswa. ❖ Mengintegrasikan program penguatan infrastruktur akademik dan teknologi dalam perencanaan strategis IPDN untuk menghadapi tantangan digitalisasi. ❖ Mengadaptasi sistem pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam konferensi serta publikasi ilmiah internasional.
--	--	--

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Tabel 47. Sasaran Strategis IPDN

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi	❖ Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing global dalam sektor pemerintahan dan kebijakan publik. ❖ Mengembangkan model pendidikan kepomongprajaan yang inovatif dan berbasis teknologi guna menjawab tantangan pemerintahan digital dan perubahan sosial-ekonomi.	❖ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di IPDN dengan standar internasional. ❖ Terciptanya ekosistem akademik dan riset yang berkontribusi terhadap kebijakan pemerintahan global. ❖ Terwujudnya lulusan IPDN yang memiliki kompetensi internasional,	Pendidikan: ❖ Digitalisasi sistem pembelajaran berbasis interaktif dan saintifik. ❖ Integrasi metode <i>Student-Centered Learning</i>, <i>Case Method</i>, dan <i>Project-Based Learning</i>. ❖ Evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala. ❖ Penguatan kerja sama dengan industri dan pemerintah. ❖ Optimalisasi asesmen berbasis kompetensi.

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
	❖ Menjadi pusat riset dan kebijakan pemerintahan yang memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem administrasi publik, baik nasional maupun internasional.	dengan kemampuan kepemimpinan, analisis kebijakan, serta penguasaan teknologi pemerintahan berbasis digital.	❖ Studi kelayakan dan pembukaan Program Magister pada semua fakultas IPDN mulai tahun 2026 ❖ Penyusunan kurikulum magister berbasis riset dan roadmap tematik nasional ❖ Penguatan SDM pascasarjana dengan target $\geq 60\%$ dosen bergelar doktor/fakultas ❖ Akreditasi dan internasionalisasi program magister melalui FIBAA/AQAS ❖ Pembentukan graduate research cluster dan jejaring kolaboratif global berbasis tema governance unggulan Penelitian: ❖ Hibah riset untuk publikasi internasional. ❖ Penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan industri. ❖ Digitalisasi dan integrasi sistem penelitian dengan jurnal akademik nasional. ❖ Optimalisasi sistem pendampingan penelitian bagi mahasiswa. ❖ Peningkatan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan.

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
			Pengabdian kepada Masyarakat: ❖ Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis riset. ❖ Optimalisasi sistem pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa. ❖ Pengembangan model PkM berkelanjutan dengan evaluasi dampak secara berkala. ❖ Penyediaan dana dan fasilitas riset untuk mendukung penerapan teknologi berbasis akademik. ❖ Penguatan jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan. Luaran dan Capaian Tridharma: ❖ Integrasi penelitian dalam kurikulum dan tugas akhir. ❖ Publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. ❖ Penguatan jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintahan. ❖ Peningkatan program intensif bahasa asing dan teknologi digital. ❖ Hibah riset dan insentif publikasi bagi mahasiswa dan dosen.

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
Wakil Rektor Bidang Administrasi	❖ Mewujudkan institusi pendidikan kepomongprajaan yang memiliki reputasi global, dengan kurikulum, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran yang setara dengan lembaga pendidikan kelas dunia.	❖ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di IPDN dengan standar internasional.	Keuangan, Sarana, dan Prasarana: ❖ Digitalisasi sistem keuangan dan manajemen aset akademik. ❖ Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi anggaran. ❖ Ekspansi kerja sama dengan institusi dan industri dalam pendanaan penelitian. ❖ Penyediaan dana dan fasilitas riset untuk mendukung penerapan teknologi berbasis akademik. ❖ Penguatan sistem audit keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	❖ Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing global dalam sektor pemerintahan dan kebijakan publik.	❖ Terwujudnya lulusan IPDN yang memiliki kompetensi internasional, dengan kemampuan kepemimpinan, ❖ analisis kebijakan, serta penguasaan teknologi pemerintahan berbasis digital.	Mahasiswa: ❖ Penguatan program pengembangan <i>soft skills</i> dan <i>tracer study</i> berbasis digital. ❖ Optimalisasi sistem digital untuk layanan akademik dan non-akademik. ❖ Peningkatan keterlibatan alumni dalam evaluasi pendidikan. ❖ Penguatan sistem <i>tracer study</i> untuk memonitor perkembangan karir alumni. ❖ Peningkatan kerja sama dengan universitas luar negeri untuk <i>joint degree</i> dan kredit earning.

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian	❖ Mewujudkan institusi pendidikan kepomongprajaan yang memiliki reputasi global, dengan kurikulum, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran yang setara dengan lembaga pendidikan kelas dunia.	❖ Peningkatan jejaring global dengan berbagai institusi internasional guna memperluas akses dan kesempatan akademik serta profesional bagi peserta didik dan tenaga pendidik.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama: ❖ Adaptasi kebijakan akademik terhadap perubahan regulasi nasional dan internasional. ❖ Penguatan kerja sama dengan institusi pemerintahan dan akademik internasional. ❖ Digitalisasi sistem tata kelola untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit kerja. ❖ Optimalisasi mekanisme evaluasi berbasis teknologi. ❖ Penyempurnaan sistem tata kelola berbasis teknologi digital. Sumber Daya Manusia: ❖ Optimalisasi program sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan. ❖ Peningkatan program beasiswa dan insentif akademik bagi dosen. ❖ Digitalisasi sistem pembelajaran dan administrasi SDM. ❖ Perluasan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional guna meningkatkan peluang penelitian dan publikasi ilmiah. ❖ Penguatan program pengabdian kepada

Bidang	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi Utama Berdasarkan Kriteria
			masyarakat sebagai bagian dari peningkatan keterlibatan dosen dalam sektor publik.

[illegible]

[illegible]

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		Strategis, (4) Program dan Kegiatan, dan (5) Indikator Kinerja.								
15.	IKKST /TP/2	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	0,09%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Setiap pimpinan/ Kepala Biro/ Lembaga/ Direktur/ Fakultas/Unit
16.	IKKST /TP/3	Persentase unit kerja memiliki sertifikat ISO sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga nasional atau internasional bereputasi.	0,09%	25%	N/A	1%	5%	10%	15%	LP3MI
17.	IKT/TP/4	Persentase akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi / Prodi yang sudah memiliki lulusan harus memperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.	0,09%	100%	92%	92%	92%	92%	100%	LP3MI/UPM/G KM/Fakultas/ Prodi
18.	IKKST /TP/5	Ketersediaan bukti yang sah terhadap pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan	0,09%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Warek 2, Biro 2, Bagian Keuangan

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
		di perguruan tinggi / Wajar Tanpa Persyaratan.									
19.	IKKST /TP/6	Persentase program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) / Prodi yang sudah memiliki lulusan harus memperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.	0,09%	100%	92%	92%	92%	92%	100%	LP3MI/UPM/G KM/Fakultas/ Prodi	
20.	IKKST /TP/7	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	0,09%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Warek 4, Karo 4, Bagian kerjasama, LP3MI	
21.	IKKST /TP/8	Ketersediaan dokumen hasil analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek; (1) capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi,	0,09%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Warek 1, Biro 1, Bagian Perencanaan	

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.								
22.	IKKST /TP/9	Ketersediaan dokumen efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi aspek: (1) keberadaan dokumen formal standar mutu, (2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, (3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan (4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	0,09%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	LP3MI
23.	IKKST /TP/10	Persentase Dosen dengan Nilai Student Feedback Questionnaire (SFQ) $\geq 80\%$	0,09%	80%	70%	71%	73%	75%	80%	Fakultas/ UPM/GKM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Standar Pengelolaan Pembelajaran									
24.	IKKS /TK/1	Persentase penyelenggaraan program pembelajaran yang sesuai standar isi,standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	0,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direktur/Dekan
25.	IKKS /TK/2	Persentase prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	0,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UPM/GKM
26.	IKKS /TK/3	Persentase jumlah prodi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.	0,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UPM/GKM
27.	IKKS /TK/4	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran	0,24%	> 80%	95%	96%	97%	98%	99%	UPM/GKM
28.	IKKST /TK/1	Persentase tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran	0,24%	> 80%	95%	96%	97%	98%	99%	UPM/GKM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		penelitian secara berkala untuk menjamin mutu dan ketercapaian hasil riset.								
34.	IKKST /TK/4	Lembaga Penelitian memfasilitasi diseminasi dan evaluasi tahunan penelitian untuk menilai kinerja, publikasi, dan dampak hasil riset IPDN.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit
Standar Pengelolaan PkM										
35.	IKKS /TK/8	LPM telah memiliki pedoman PkM.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM
36.	IKKS /TK/9	LPM memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM
37.	IKKS /TK/10	LPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM
38.	IKKST /TK/5	IPDN melakukan evaluasi kinerja terhadap LPM setahun sekali.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LP3MI
Standar Kerjasama										
39.	IKKS /KS/1	Peningkatan jumlah Implementasi MoU kerjasama Internasional per tahun.	0,33%	5	5	6	6	7	8	Warek 4/ Biro 4/Bagian Kerjasama
40.	IKKS /KS/2	Pengembangan jumlah Kerjasama Tridharma PT	0,33%	50%	40%	45%	46%	47%	49%	Warek 4/

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
		lingkup Nasional per tahun.								Biro 4/Bagian Kerjasama	
41.	IKKST /KS/1	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan media massa lokal dan nasional per tahun.	0,33%	4	5	6	6	7	8	Warek 4/ Biro 4/Bagian Kerjasama	
42.	IKKST /KS/2	Peningkatan Implementasi MoU kerjasama Internasional.	0,33%	5	5	6	6	7	8	Warek 4/ Biro 4/Bagian Kerjasama	
43.	IKKST /KS/3	Adanya pedoman kerjasama dan mekanisme monev pertahun.	0,33%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Warek 4/ Biro 4/Bagian Kerjasama	
	Standar Daya Saing Internasional										
44.	IKKS /DSI/1	IPDN mengembangkan kelas internasional berciri khas <i>local wisdom</i> kepamongprajaan melalui kurikulum berbasis nilai budaya Nusantara dan tata pemerintahan adaptif global.	0,06%	0,05	N/A					Pascasarjana	
45.	IKKS /DSI/2	Setiap mahasiswa kelas internasional memiliki kemampuan bahasa Inggris (TOEFL ≥ 525) atau setara dengan standar internasional.	0,06%	525	N/A					Pascasarjana/ LPDSI	

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
46.	IKKS /DSI/3	Terdapat pedoman resmi alih program bagi mahasiswa kelas internasional dengan IPK < 3,00 dua semester berturut-turut ke program reguler.	0,06%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pascasarjana	
47.	IKKS /DSI/4	Jumlah kerjasama dengan institusi asing.	0,06%	Minimal 50 kerja sama	50 kerja sama	50 kerja sama	50 kerja sama	50 kerja sama	50 kerja sama	Warek 4/ Biro 4/Bagian Kerja sama	
48.	IKKS /DSI/5	Kaprodi dan Dekan, dan berkewajiban mencari mitra.	0,06%	Minimal 3 Perguruan tinggi asing	3 Perguruan tinggi asing	3 Perguruan tinggi asing	3 Perguruan tinggi asing	3 Perguruan tinggi asing	3 Perguruan tinggi asing	Dekan/Kaprodi	
49.	IKKS /DSI/6	Jumlah mahasiswa asing dari populasi mahasiswa.	0,06%	5%	N/A					Pascasarjana	
50.	IKKS /DSI/7	Jumlah mahasiswa inbound dari perguruan tinggi luar negeri yang mengikuti program akademik/pertukaran di IPDN setiap tahun.	0,06%	2%						Kepala LPDSI, Dekan, Direktur	
51.	IKKS /DSI/8	Jumlah mahasiswa outbound dari jumlah mahasiswa.	0,06%	2%						Kepala LPDSI, Dekan, Direktur	
52.	IKKS /DSI/9	Jumlah negara mahasiswa asing.	0,06%	3						Biro 4 Bagian Kerjasama, Fakultas	

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
59.	IKKS /DSI/16	Jumlah dosen yang menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional.	0,06%	minimal 2 (dua)	2	2	2	2	2	Dekan, Direktur, Kaprodi
60.	IKKS /DSI/17	IPDN memperoleh dan mempertahankan akreditasi/sertifikasi internasional pada program studi dari lembaga bereputasi dunia (AUN-QA, FIBAA, AQAS, ABET, dll.).	0,06%	1	1	1	1	1	1	LP3MI
61.	IKKST /DSI/1	IPDN melaksanakan program <i>joint degree/double degree</i> dengan universitas mitra internasional yang termasuk dalam Top 1200 QS/THE Ranking.	0,06%	0,40%						Rektor
62.	IKKST /DSI/2	Persentase matakuliah per program studi diajarkan dalam bahasa Internasional.	0,06%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dekan, Direktur, Kaprodi
63.	IKKST /DSI/3	Pembelajaran menggunakan referensi bahasa asing.	0,06%	minimal 50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Dekan, Direktur, Kaprodi
64.	IKKST /DSI/4	IPDN menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas	0,06%	top 1200 dunia						Rektor

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
		Internasional bersama institusi luar negeri bereputasi melalui <i>joint class, credit transfer, atau exchange program.</i>									
65.	IKKST /DSI/5	Muatan kurikulum berisi kajian lokal, nasional, dan global.	0,06%	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Dekan, Direktur, Kaprodi	
66.	IKKST /DSI/6	Pemanfaatan <i>platform</i> pembelajaran digital bilingual (<i>Learning Management System internasional</i>) dalam kelas internasional.	0,06%	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Dekan, Direktur, Kaprodi	
67.	IKKST /DSI/7	Pelaksanaan kegiatan akademik kolaboratif internasional (<i>joint seminar, research forum, visiting lecture</i>) minimal dua kali per tahun.	0,06%	minimal satu semester	Satu/ semester	Satu/ semester	Satu/ semester	Satu/ semester	Satu/ semester	Dekan, Direktur, Kaprodi	
68.	IKKST /DSI/8	Ada pedoman credit transfer untuk mata kuliah yang telah ditempuh di IPDN atau di Mitra.	0,06%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Direktur Pascasarjana	
69.	IKKST /DSI/9	Ada kebijakan dan pedoman untuk pelayanan	0,06%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Akademik	

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
		nasional atau regional per prodi per tahun.		Internasional: 5.	Internasional: 5.	Internasional: 5.	Internasional: 5.	Internasional: 5.	Internasional: 5.		
77.	IKKS /MHS/2	Kepuasan mahasiswa atas layanan dalam bidang (1) pengajaran (2) bimbingan dan konseling, (3) minat dan bakat, (4) pembinaan <i>soft skills</i> , (5) beasiswa, dan (6) kesehatan.	1,00%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	LP3MI, UPM, GKM (laporan disusun oleh unit terkait: 2,3,4 (konseling); 5 (LPDSI); 6 (KSA))	
78.	IKKS /MHS/3	Rasio jumlah pendaftar dan lulus seleksi <i>Passing grade</i> .	1,00%	25	52,3%.	51%.	50%.	45%.	40%.	Biro 3, Bagian Keprajaan	
79.	IKKS /MHS/4	Persentase jumlah mahasiswa baru yang registrasi dan lulus seleksi dibandingkan dengan kuota nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	1,00%	03:01	52,3%.	51%.	50%.	45%.	40%.	Biro 3, Bagian Keprajaan	
80.	IKKS /MHS/5	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap total mahasiswa IPDN (target minimal 0,5%) melalui program kelas	1,00%	0,50%	N/A	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	Direktur, Dekan	

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		internasional, <i>short course</i> , atau <i>joint class</i> .								
81.	IKKS /MHS/6	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa aktif (<i>student body</i>) dibandingkan dengan tahun akademik sebelumnya, berdasarkan data resmi registrasi IPDN.	1,00%	10%	3%	3%	3%	3%	3%	Biro 3
82.	IKKS /MHS/7	Tingkat pelaksanaan dan efektivitas <i>tracer study</i> lulusan IPDN, mencakup proporsi responden, waktu pelacakan, dan pemanfaatan hasilnya.	1,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LP3MI (Instrumen), Biro 3, Prodi
83.	IKKS /MHS/8	Pelaksanaan survei pengguna lulusan (<i>user study</i>) terhadap instansi pusat dan daerah pengguna alumni IPDN.	1,00%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	LP3MI (Instrumen), Biro 3, Prodi
84.	IKKST /MHS/1	Persentase mahasiswa yang melaksanakan transfer <i>credit/credit earning/dual degree/Joint degree</i> di luar negeri terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun.	1,00%	4	4	4	4	4	4	Fakultas, Kerjasama, LPDSI

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
85.	IKKST /MHS/2	Pengembangan Sistem Informasi lulusan.	1,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPDSI, Biro 3
	Kriteria 4: Sumber Daya Manusia										
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan										
86.	IKKS /SDM/1	Rasio dosen dan mahasiswa.	0,33%	01:30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian, Keprajaan, Fakultas, Prodi, Pascasarjana, Akademik
87.	IKKS /SDM/2	Persentase dosen dengan gelar doktor terhadap jumlah dosen program studi.	0,33%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Kepegawaian, Warek 2, Karo 2, Fakultas
88.	IKKS /SDM/3	Persentase dosen bersertifikat profesi Pendidik (serdos).	0,33%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Warek 1, Biro 1, Akademik
89.	IKKS /SDM/4	Persentase pembimbing utama yang menghasilkan karya ilmiah dalam 5 tahun terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.	0,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Lemlit, LPM
90.	IKKS /SDM/5	Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional/internasional.	0,33%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Bagian Perencanaan, LP3MI

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
91.	IKKS /SDM/6	Persentase dosen mampu menggunakan media pembelajaran.	0,33%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	LPDSI, Fakultas
92.	IKKS /SDM/7	Persentase dosen bersertifikat kompetensi yang relevan.	0,33%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Fakultas, Kepegawaian
93.	IKKS /SDM/8	Jumlah dosen dengan jabfung Guru Besar.	0,33%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Akademik, Fakultas
94.	IKKS /SDM/9	Jumlah dosen dengan jabfung Lektor Kepala.	0,33%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Akademik, Fakultas
95.	IKKS /SDM/10	Persentase dosen menjalankan tugas pokok, tambahan, dan penunjang.	0,33%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Fakultas
96.	IKKS /SDM/11	Persentase jumlah prodi minimal memiliki 6 dosen tetap.	0,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Fakultas
97.	IKKST /SDM/1	Persentase tenaga kependidikan pendidikan minimal S1.	0,33%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Kepegawaian
98.	IKKST /SDM/2	Persentase jumlah prodi memiliki laboran.	0,33%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Warek 1, Biro 1, LPDSI, Kepagawaian, Fakultas
99.	IKKST /SDM/3	Jumlah pustakawan tingkat fakultas yang terlatih dengan sertifikat.	0,33%	1	1	1	1	1	1	Kepala Unit Perpustakaan,

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
										Dekan, Kepegawaian
100.	IKKST /SDM/4	Persentase tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai pekerjaan.	0,33%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Bagian Kepegawaian, Dekan Direktur
	Standar Peneliti									
101.	IKKS /SDM/12	Persentase dosen melakukan penelitian setiap tahun.	2,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Lemlit
102.	IKKST /SDM/5	Persentase dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun.	2,50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Fakultas, Lemlit
	Standar Pelaksana PkM									
103.	IKKS /SDM/13	Persentase dosen melakukan PkM setiap tahun.	2,50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Fakultas, LPM
104.	IKKST /SDM/6	Persentase dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana PkM setiap tahun.	2,50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Fakultas, LPM
	Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana									
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran									
105.	IKKS /KSP/1	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat	0,21%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Bagian Umum

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		(kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).								
112.	IKKS /KSP/8	Persentase ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.	0,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum, Biro 2
113.	IKKS /KSP/9	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari jumlah mahasiswa per tahun.	0,21%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Perpustakaan
114.	IKKST /KSP/1	Persentase gedung dengan cakupan layanan internet/wifi (standarisasi fasilitas di dalam dan luar gedung).	0,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum, Biro 2

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
115.	IKKST /KSP/2	Persentase sistem manajemen pemanfaatan ruang.	0,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum, Biro 2
116.	IKKST /KSP/3	Persentase ketersediaan tempat sampah di setiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi.	0,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
	Standar Pembiayaan Pembelajaran										
117.	IKKS /KSP/10	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ praja pertahun.	0,31%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Bagian Keuangan, Fakultas, Direktur
118.	IKKS /KSP/11	Persentase UPPS/Fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IPDN dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.	0,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Direktur
119.	IKKS /KSP/12	IPDN menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap awal tahun akademik.	0,31%	1	1	1	1	1	1	1	Warek 1, Biro 1, Bagian Akademik dan Perencanaan

[illegible]

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
127.	IKKST /KSP/7	Persentase laboratorium riset (fisik maupun non-fisik) yang digunakan secara aktif untuk menunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, sesuai bidang keilmuan dan prioritas riset IPDN.	0,83%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian									
128.	IKKS /KSP/17	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari APBN untuk penelitian.	1,25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Warek 1, Lemlit
129.	IKKST /KSP/8	Persentase serapan alokasi dana Penelitian IPDN.	1,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Lemlit
	Standar Sarana dan Prasarana PkM									
130.	IKKS /KSP/18	Persentase Prodi memiliki laboratorium untuk PkM.	1,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Prodi, LPM
131.	IKKST /KSP/9	Setiap fakultas minimal memiliki 1 (satu) Inkubator Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance Innovation Hub</i>) sebagai wadah pengembangan inovasi kebijakan, pelayanan publik, dan teknologi sosial yang	1,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, Prodi, LPM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
		melibatkan dosen dan mahasiswa.									
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM											
132.	IKKS /KSP/19	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari APBN untuk PkM.	0,83%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Fakultas, LPM	
133.	IKKST /KSP/10	Persentase serapan alokasi dana PkM IPDN.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fakultas, LPM	
134.	IKKST /KSP/11	Tersedianya alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan intelektual.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, LP3MI	
Kriteria 6: Pendidikan											
Standar Isi Pembelajaran											
135.	IKKS /PND/1	Persentase jumlah prodi dengan kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) yang telah ditinjau setiap tahun.	0,74%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Warek 1, Akademik, Fakultas, Direktur	
136.	IKKS /PND/2	Persentase jumlah prodi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Akademik, Fakultas, Direktur	

[illegible]

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		dan partisipatif <i>case study</i> dan <i>project based learning</i> yang dilaksanakan secara <i>Blended Learning</i> .								
142.	IKKST /PND/3	Persentase mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran Pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>Project Based Learning</i> .	0,74%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Vokasi= 50%; S1=35%; S2= 50%; S3= 50%	Akademik, Fakultas
143.	IKKST /PND/4	Persentase program studi yang mengembangkan dan menginventarisasi perangkat pembelajaran digital (RPS, modul, bahan ajar, media interaktif) secara terintegrasi dengan sistem informasi akademik (SIAP/EdLink) IPDN.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Prodi, LPDSI
Standar Proses Pembelajaran										
144.	IKKS /PND/6	Persentase program studi memiliki kurikulum yang memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi, Akademik

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.								
145.	IKKS /PND/7	Prodi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi, Akademik
146.	IKKS /PND/8	Persentase prodi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi
147.	IKKS /PND/9	Persentase proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.								
148.	IKKS /PND/10	Persentase rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi, Akademik
149.	IKKS /PND/11	Persentase penelitian/PkM yang terintegrasi ke dalam pembelajaran.	0,74%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dekan, Direktur, Kaprodi
150.	IKKST /PND/5	Persentase jumlah dosen mengembangkan RPS.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi
151.	IKKST /PND/6	Persentase RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI.	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi, Akademik
152.	IKKST /PND/7	Persentase materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pengembangan	0,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi, Akademik

[illegible]

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
162.	IKKS /PNL/2	Persentase dosen melakukan penelitian pengembangan/terapan.	0,83%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Lemlit, Direktur, Fakultas
163.	IKKS /PNL/3	Persentase penelitian dosen IPDN yang memiliki kedalaman substansi dan keluasan dampak, serta berorientasi pada luaran penelitian sesuai ketentuan nasional dan institusional (publikasi ilmiah, HKI, buku ajar, kebijakan publik, TTG, atau inovasi pemerintahan).	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit, Direktur, Fakultas
164.	IKKST /PNL/1	Persentase materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit, Direktur, Fakultas
Standar Proses Penelitian										
165.	IKKS /PNL/4	Jumlah SKS kegiatan penelitian mahasiswa program sarjana (Skripsi Kepamongprajaan / Penelitian Terapan) yang menunjukkan orientasi	1,11%	4-6 SKS	4-6 SKS	4-6 SKS	4-6 SKS	4-6 SKS	4-6 SKS	Warek 1, Akademik

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		riset dan integrasi dengan CPL IPDN.								
166.	IKKS /PNL/5	Jumlah SKS penelitian dalam kurikulum program magister IPDN, yang diwujudkan dalam penyusunan tesis berbasis riset terapan atau penelitian kebijakan publik, sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan (CPL).	1,11%	6 SKS	6 SKS	6 SKS	6 SKS	6 SKS	6 SKS	Warek 1, Akademik
167.	IKKST /PNL/2	Persentase proses penelitian mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	1,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Warek 1, Akademik, Dekan, Direktorat, Kaprodi
	Standar Penilaian Penelitian									
168.	IKKS /PNL/6	Persentase skripsi dan tesis mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktorat, Kaprodi
169.	IKKS /PNL/7	Persentase penelitian dosen telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit, Fakultas, Direktorat, Prodi

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029		
170.	IKKST /PNL/3	Persentase hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit, Perpustakaan, Fakultas, Direktur, Prodi
171.	IKKST /PNL/4	Persentase penilaian penelitian dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.	0,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lemlit, Fakultas, Direktur, Prodi
	Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat										
	Standar Isi PkM										
172.	IKKS /PKM/1	Persentase kegiatan PkM dosen yang berbasis hasil penelitian dosen (baik penelitian internal, hibah eksternal, atau riset terapan IPDN).	0,83%	≥ 40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	LPM, Lemlit, Fakultas
173.	IKKS /PKM/2	Persentase isi PkM dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.	0,83%	≥ 40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	LPM
174.	IKKST /PKM/1	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	0,83%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
175.	IKKST /PKM/2	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat	0,83%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		pemberdayaan yang menghasilkan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan masyarakat sasaran.								
	Standar Proses PkM									
176.	IKKS /PKM/3	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.	0,42%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
177.	IKKS /PKM/4	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.	0,42%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
178.	IKKS /PKM/5	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.	0,42%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
179.	IKKS /PKM/6	Persentase proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa	0,42%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		pemberdayaan masyarakat.								
180.	IKKS /PKM/7	Persentase kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	0,42%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
181.	IKKS /PKM/8	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
182.	IKKST /PKM/2	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program KKN atau Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) berbobot 4 SKS, berorientasi pada pemberdayaan dan inovasi pemerintahan daerah.	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
183.	IKKST /PKM/3	Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		terarah, terukur, dan terprogram.								
	Standar Penilaian PkM									
184.	IKKS /PKM/9	Persentase hasil penilaian PkM memperhatikan standar hasil, isi dan proses PkM.	1,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
185.	IKKST /PKM/4	Persentase kriteria penilaian PkM berdasarkan pada: tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan mengatasi masalah sosial.	1,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas, Kanit Penelitian dan PKM
	Kriteria 9: Luaran Tri Dharma									
	Standar Kompetensi Lulusan									
186.	IKKS /LTD/1	Persentase kompetensi lulusan sudah dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan.	0,19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi
187.	IKKS /LTD/2	Persentase rumusan capaian pembelajaran sudah mengacu pada jenjang kualifikasi pada KKNI.	0,19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
188.	IKKS /LTD/3	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi.	0,19%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dekan, Direktur, Kaprosdi
189.	IKKS /LTD/4	Rata-rata IPK lulusan Sarjana Terapan; S2/S3>=3.50.	0,19%	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	D3/S1> =3.25 ; S2/S3> =3.50;	Dekan, Direktur, Kaprosdi
190.	IKKS /LTD/5	Rerata masa tunggu lulusan waktu kerja pertama.	0,19%	< 6 bulan	< 6 bulan	< 6 bulan	< 6 bulan	< 6 bulan	< 6 bulan	Dekan, Direktur, Kaprosdi
191.	IKKS /LTD/6	Persentase kepuasan pengguna lulusan atas: (1) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (2) Kemampuan berbahasa asing, (3) Penggunaan teknologi informasi.	0,19%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Warek 1, Akademik, Dekan, Direktur, Kaprosdi
192.	IKKS /LTD/7	Persentase kepuasan pengguna lulusan atas: Etika, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.	0,19%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Warek 1, Akademik, Dekan, Direktur, Kaprosdi
193.	IKKST /LTD/1	Persentase lulusan dengan minimal TOEFL: D4=450, S2/S3=500.	0,19%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	LPDSI (Lab Bahasa)
194.	IKKST /LTD/2	Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi yang dihasilkan per	0,19%	S1=1 nasional bereputasi;	S1=1 nasional bereputasi;	S1=1 nasional bereputasi;	S1=1 nasional bereputasi;	S1=1 nasional bereputasi;	S1=1 nasional bereputasi;	Dekan, Direktur, Kaprosdi

[illegible]

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		dihasilkan dosen IPDN dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemerintah daerah.								
200.	IKKS /LTD/13	Jumlah buku ber-ISBN dan book chapter hasil penelitian dosen IPDN yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional atau internasional, mencerminkan kontribusi keilmuan bidang kepamongprajaan, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan.	0,17%	5	5	5	5	5	5	Dekan, Direktur, Kaprodi
201.	IKKST /LTD/3	Jumlah hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan/tahun untuk semua prodi.	0,17%	≥ 5 buku	5	5	5	5	5	Akademik, Fakultas
202.	IKKST /LTD/4	Jumlah pemakalah internasional tiap tahun untuk semua prodi.	0,17%	≥ 2 pemakalah	2	2	2	2	2	Dekan, Direktur, Kaprodi
203.	IKKST /LTD/5	Jumlah pemakalah regional tiap tahun untuk semua prodi.	0,17%	≥ 10 pemakalah	10	10	10	10	10	Dekan, Direktur, Kaprodi

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
204.	IKKST /LTD/6	Persentase hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	0,17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dekan, Direktur, Kaprodi
	Standar Hasil PkM									
205.	IKKS /LTD/14	Persentase hasil PkM menerapkan TTG.	0,15%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas
206.	IKKS /LTD/15	Persentase hasil PkM menerapkan model/prototipe.	0,15%	≥ 20%	20%	20%	20%	20%	20%	LPM, Fakultas
207.	IKKS /LTD/16	Persentase hasil PkM menerapkan desain.	0,15%	≥ 10%	10%	10%	10%	10%	10%	LPM, Fakultas
208.	IKKS /LTD/17	Persentase hasil PkM menerapkan rekayasa sosial.	0,15%	≥ 10%	10%	10%	10%	10%	10%	LPM, Fakultas
209.	IKKS /LTD/18	Persentase hasil PkM menjadi buku ajar.	0,15%	≥ 25%	25%	25%	25%	25%	25%	LPM, Fakultas
210.	IKKS /LTD/19	Persentase hasil PkM dipublikasikan di jurnal nasional.	0,15%	≥ 20%	20%	20%	20%	20%	20%	LPM, Fakultas
211.	IKKS /LTD/20	Persentase hasil PkM dipatenkan.	0,15%	≥ 10%	10%	10%	10%	10%	10%	LP3MI, Fakultas
212.	IKKS /LTD/21	Persentase hasil PkM diwujudkan dalam bentuk paten sederhana.	0,15%	≥ 10%	10%	10%	10%	10%	10%	LP3MI, Fakultas
213.	IKKS /LTD/22	Persentase hasil PkM diusulkan hak cipta.	0,15%	≥ 20%	20%	20%	20%	20%	20%	LP3MI, Fakultas

No.	Kode	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Standar	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	
214.	IKKST /LTD/7	Persentase PkM diterapkan sebagai desain produk industri.	0,15%	≥ 10%	10%	10%	10%	10%	10%	LPM, Fakultas
215.	IKKST /LTD/8	Persentase hasil PkM didiseminasikan sebagai pemakalah/pembicara forum ilmiah nasional.	0,15%	≥ 30%	30%	30%	30%	30%	30%	LPM, Fakultas
		Total	100,00 %							

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	BASELINE 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKP	Persentase lulusan dengan predikat cumlaude	Persen (%)	D-IV (22,61%) S-2 (6,1%) S-3 (1,67%) Program Profesi Kepamong prajaan (28,81%)	D-IV (23%) S-2 (6%) S-3 (6%) Program Profesi Kepamong prajaan (29%)	D-IV (24%) S-2 (7%) S-3 (7%) Program Profesi Kepamong prajaan (30%)	D-IV (25%) S-2 (8%) S-3 (8%) Program Profesi Kepamong prajaan (31%)	D-IV (26%) S-2 (9%) S-3 (9%) Program Profesi Kepamong prajaan (32%)	D-IV (27%) S-2 (10%) S-3 (10%) Program Profesi Kepamong prajaan (33%)
IKP	Jumlah publikasi hasil penelitian IPDN dalam jurnal terakreditasi dan bereputasi	Publikasi	29	20	21	22	23	24
IKP	Jumlah pengabdian masyarakat yang diimplementasikan	Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	4	17	18	19	20	21

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan IPDN, sasaran-sasaran program dan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, total rencana anggaran IPDN Tahun 2025-2029 sebesar Rp.4.527.366.710.000,- (empat triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran program, dan target kinerja IPDN periode 2025-2029 yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

Tabel 51. Rencana Anggaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Tahun 2025-2029 Per Program (dalam juta rupiah)

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Dukungan Manajemen	618.255,61	818.059,76	999.201,80	1.030.178,30	1.061.671,24	4.527.366,71

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	IKP 1: Persentase lulusan dengan predikat cumlaude			D-IV (23%) S-2 (6%) S-3 (6%) Program Profesi Kepamong prajaan (29%)	D-IV (24%) S-2 (7%) S-3 (7%) Program Profesi Kepamong prajaan (30%)	D-IV (25%) S-2 (8%) S-3 (8%) Program Profesi Kepamong prajaan (31%)	D-IV (26%) S-2 (9%) S-3 (9%) Program Profesi Kepamong prajaan (32%)	D-IV (27%) S-2 (10%) S-3 (10%) Program Profesi Kepamong prajaan (33%)					
	2	IKP 2: Jumlah publikasi hasil penelitian IPDN dalam jurnal terakreditasi dan bereputasi			20	21	22	23	24					
	3	IKP 3 Jumlah pengabdian masyarakat yang di implementasik an			17	18	19	20	21					
6088	Kegiatan: Layanan									752,09	1.767,17	1.821,98	1.878,55	1.936,88

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Legislasi dan Litigasi IPDN													
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan legislasi dan litigasi lingkup IPDN												
		1	IKK 1: Jumlah regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kemendagri (PROSUNDAGRI)		2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi					
		AAG.S01	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	120,00	447,65	185,88	191,66	197,62

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		AAH.001	Rincian Output: Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	3 Peraturan	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-
		AAH.002	Rincian Output: Peraturan Rektor IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	4 Peraturan	-	-	-	-	175,77	-	-	-	-
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup IPDN		100	100	100	100	100					
		EBA.957	Rincian Output: Layanan hukum	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	-	-	-	-	293,35	-	-	-	-
		AAH.003	Rincian Output: Peraturan Lainnya Terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	-	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	-	425,00	438,18	451,80	465,85

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EBA.001	Rincian Output: Penyelenggaraan Layanan Hukum Lingkup IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	301,37	557,9	575,22	593,07
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian penanganan sengketa hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan		100	100	100	100	100					
		EBA.969	Rincian Output: Layanan bantuan hukum	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	2 Layanan	-	-	-	-	42,98	-	-	-	-
		EBA.002	Rincian Output: Fasilitasi Penyelenggaraan Perkara Lingkup IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	-	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	-	593,15	640,02	659,87	680,34
6089	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan,									518.989,16	684.835,55	811.864,24	837.016,50	862.504,64

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	BMN, dan Umum IPDN													
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup IPDN												
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					
		ABO.001	Rincian Output: Penyusunan Grand Design pengembangan Smart Campus IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Kajian	1 Kajian	-	-	-	650,00	300,00	-	-	-
		AEA.001	Rincian Output: Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup IPDN	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab.	34 Kegiatan	-	-	-	-	2.577,28	-	-	-	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura										
		EBD.952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	-	-	-	-	405,00	-	-	-	-
		EBD.001	Rincian Output: Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	3.170,61	3.268,93	3.370,30	3.030,98

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Kegiatan Lingkup IPDN	3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura										
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan BMN lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		EBA.962	Rincian Output: Layanan umum	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7.266,08	10.020,82	10.068,90	10.381,07	10.702,92

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					
		EBA.994	Rincian Output: Layanan perkantoran	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	502.530,34	595.741,00	614.209,04	633.249,59	652.880,39

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Papua Kab. Jayapura										
		4	IKK 4: Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					
		EBB.951	Rincian Output: Layanan sarana internal	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab.	4567 Unit	9615 Unit	10268 Unit	10823 Unit	11378 Unit	2.688,91	11.019,68	97.479,82	100.501,74	103.617,34

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBB.971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 4. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 5. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 6. Provinsi Papua Kab. Jayapura	1 Paket	134 Paket	57 Paket	65 Paket	72 Paket	1.000,00	64.075,44	86.329,55	89.005,80	91.765,01
		5	IKK 5: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBD.955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	1.871,56	508,00	508,00	508,00	508,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBD.002	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	3.016,04	3.125,33	3.238,00	3.354,17
6090	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan									1.101,84	1.900,22	1.959,18	2.019,97	2.082,65

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Informasi Publik IPDN													
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Lingkup IPDN												
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					
		EBA.S01	Rincian Output: Layanan kehumasan dan informasi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	371,97	458,00	472,21	486,86	501,96
		EBA.959	Rincian Output: Layanan protokoler	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	269,09	423,72	436,86	450,41	464,38

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	IKK 2: Presentase penyelesaian data/informasi lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBA.963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	460,79	1.018,50	1.050,11	1.082,70	1.116,31
6091	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN									11.088,07	21.135,53	23.142,30	23.860,04	24.599,99

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia lingkup IPDN												
		1	IKK 1: Persentase pemenuhan dokumen pendukung akreditasi		100%	100%	100%	100%	100%					
		ADB.001	Rincian Output: Akreditasi institusi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	990,57	919,59	948,10	977,50	1.007,81
		ADB.002	Rincian Output: Akreditasi program studi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	7 Produk	8 Produk	10 Produk	11 Produk	13 Produk	548,39	1.056,80	1.203,58	1.240,90	1.279,37

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	IKK 2: Jumlah kerjasama/kesep akatan yang dilaksanakan oleh IPDN		15 Kesepakat an	16 Kesepakat an	17 Kesepakat an	18 Kesepakat an	19 Kesepakat an					
		AEC.001	Rincian Output: Kerjasama dalam negeri	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi	14 Kesepakat an	15 Kesepakat an	16 Kesepakat an	17 Kesepakat an	18 Kesepakat an	517,93	786,83	811,27	836,47	862,43

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Papua Kab. Jayapura										
		AEC.002	Rincian Output: Kerjasama Luar Negeri	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	554,17	3.748,56	3.864,77	3.984,58	4.108,11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBA.960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	620,20	569,67	587,38	605,63	624,44
		EBD.965	Rincian Output: Layanan audit internal	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.856,53	1.328,94	1.370,14	1.412,62	1.456,42

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBC.S01	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	3.887,99	6.031,65	7.055,93	7.274,75	7.500,34

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBC.001	Rincian Output: Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	2.849,08	3.337,45	3.440,95	3.547,65

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5	IKK 5: Presentase penyelesaian rencana mitgasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup IPDN		40%	45%	50%	55%	60%					
		EBD.003	Rincian Output: Layanan manajemen risiko lingkup IPDN	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	198,99	289,44	298,45	307,73	317,32

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Papua Kab. Jayapura										
		6	IKK 6: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBD.001	Rincian Output: Layanan monitoring program kegiatan dan anggaran pendidikan IPDN	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	1.707,82	1.432,75	1.477,21	1.523,04	1.570,28

[illegible]

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	IKK 1: Persentase lulusan program pascasarjana (S2 dan S3) dengan Predikat Cumlaude		6%	7%	8%	9%	10%					
		DBA.001	Rincian Output: Layanan pendidikan program pascasarjana	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	8.640,88	11.998,37	12.144,55	12.521,05	12.909,21
		2	IKK 2: Persentase lulusan program vokasi (D-IV) dengan Predikat Cumlaude		23%	24%	25%	26%	27%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBC.001	Rincian Output: Layanan penerimaan praja IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1061 Orang	1410 Orang	1410 Orang	1410 Orang	1410 Orang	16.867,65	20.305,00	20.934,47	21.583,45	22.252,56

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EBC.968	Rincian Output: Layanan pendidikan kedinasan	1. Provinsi Sumbar Kab. Agam 2. Provinsi Jabar Kab. Sumedang 3. Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah 4. Provinsi Kalbar Kab. Mempawah 5. Provinsi Sulut Kab. Minahasa 6. Provinsi Sulsel Kab. Gowa 7. Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	51.552,85	61.316,62	111.911,23	115.380,92	118.958,19
		3	IKK 3: Jumlah hasil penelitian yang dipublikasi		70 Publikasi	75 Publikasi	80 Publikasi	85 Publikasi	90 Publikasi					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ABL.001	Rincian Output: Monitoring dan rencana aksi penelitian dan pengabdian masyarakat	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	-	6 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan	-	545,00	561,91	579,34	597,31
		ABL.S01	Rincian Output: Publikasi bereputasi nasional hasil riset dan inovasi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	20 Publikasi Nasional	21 Publikasi Nasional	22 Publikasi Nasional	23 Publikasi Nasional	24 Publikasi Nasional	4.471,07	5.520,00	5.691,12	5.867,55	6.049,45
		ABL.S03	Rincian Output: Naskah kebijakan aktual strategis	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	3 Kajian	5 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	112,88	500,00	515,52	531,51	548,00
		4	IKK 4: Jumlah pengabdian masyarakat		17 PkM	18 PkM	19 PkM	20 PkM	21 PkM					
		ABL.005	Rincian Output: Pengabdian masyarakat	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	17 Rekomend asi Kebijakan	18 Rekomend asi Kebijakan	19 Rekomend asi Kebijakan	20 Rekomen dasi Kebijakan	21 Rekomend asi Kebijakan	2.644,98	3.156,51	3.254,37	3.355,27	3.459,30

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5	IKK 5: Persentase lulusan program pendidikan profesi kepomongprajaan dengan Predikat Cumlaude		29%	30%	31%	32%	33%					
		DBA.002	Rincian Output: Layanan pendidikan program profesi kepomongprajaan	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	2.034,15	2.063,75	2.275,60	2.346,15	2.418,89

BAB V

MONITORING

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) standar mutu di IPDN merupakan bagian integral dari SPMI yang bertujuan untuk memastikan pencapaian standar akademik dan tata kelola kelembagaan. Evaluasi ini dilakukan setiap tahun akademik guna mengukur efektivitas implementasi standar mutu dalam berbagai unit kerja di IPDN. Lebih dari sekadar proses administratif, Monev menjadi alat strategis bagi pimpinan program studi untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat, efisien, dan berbasis data.

Salah satu komponen utama dalam Monev adalah Audit Mutu Internal, yang berfokus pada pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan standar mutu dengan praktik operasional di berbagai level program studi. Audit ini mengevaluasi bagaimana kebijakan akademik, sistem pembelajaran, kompetensi lulusan, serta efisiensi tata kelola kelembagaan telah diterapkan sesuai dengan visi dan sasaran strategis IPDN. Selain audit internal, terdapat Audit Mutu Eksternal, yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi standar mutu di IPDN sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan Monev di IPDN sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, dukungan kebijakan, serta kesadaran *stakeholder* dalam menjalankan standar mutu secara konsisten. Kesiapan kelembagaan mencakup pembentukan unit atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit mutu internal dan pengembangan sistem evaluasi berbasis teknologi. Di sisi lain, dukungan kebijakan melibatkan penyusunan regulasi yang memastikan keberlanjutan standar mutu serta keterlibatan seluruh pihak dalam implementasi dan pemantauan standar akademik secara berkala.



Gambar 14. Tahapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Tahapan pelaksanaan Monev standar mutu di IPDN terdiri dari lima langkah utama, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjamin akurasi dan efektivitas evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan jadwal audit mutu internal yang dilakukan secara sistematis, serta sosialisasi kepada seluruh pihak yang akan terlibat, baik auditor maupun auditee. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh mengenai prosedur evaluasi, standar yang dinilai, serta metode audit yang akan diterapkan.

Pada tahap perencanaan, IPDN membentuk tim auditor berdasarkan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang akademik dan administrasi yang akan dievaluasi. Auditor yang ditunjuk kemudian menerima surat tugas resmi, yang menetapkan tanggung jawab mereka dalam proses audit, termasuk tugas khusus untuk mengevaluasi aspek spesifik dari standar mutu. Penugasan yang tepat dalam tahap ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan audit.

Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi relevan terkait pencapaian standar mutu di unit kerja atau program studi. Auditor melakukan evaluasi terhadap data sekunder dalam sistem informasi akademik, mencakup laporan capaian pembelajaran, efektivitas tata kelola, serta rekam jejak kinerja kelembagaan. Selain itu, visitasi lapangan dilakukan untuk mengecek kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual, termasuk wawancara dengan tenaga pendidik serta observasi langsung dalam proses akademik.

Tahap penilaian berfungsi untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan guna menentukan nilai atau skor yang menunjukkan tingkat pencapaian standar mutu. Nilai yang diperoleh kemudian dirangking berdasarkan indikator standar yang telah ditetapkan, sehingga program studi dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan standar mutu serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai.

Langkah terakhir dalam Monev adalah tahap pelaporan, yang mencakup pembuatan berita acara audit, penyusunan laporan audit mutu, serta rekomendasi strategis bagi pimpinan program studi. Laporan audit berisi analisis komprehensif mengenai hasil evaluasi, temuan utama, serta saran perbaikan untuk memastikan peningkatan kualitas akademik dan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan. Dengan adanya laporan ini, pimpinan

dapat merancang kebijakan strategis guna memastikan standar mutu IPDN tetap berada di tingkat optimal.

Pelaksanaan audit standar mutu di IPDN juga dilengkapi dengan evaluasi berkala yang dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal dan Eksternal. Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas standar mutu berdasarkan perubahan kebijakan pendidikan nasional, perkembangan teknologi, serta tuntutan kompetensi di bidang pemerintahan. Dengan pendekatan yang adaptif, IPDN dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan dan tata kelola selalu relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern.

Sebagai bagian dari visi jangka panjang menuju Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kelas Dunia 2045, pelaksanaan Monev menjadi fondasi penting dalam memastikan pencapaian target akademik dan kelembagaan di IPDN. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, keterlibatan *stakeholder*, serta kesiapan kelembagaan yang optimal, IPDN berkomitmen untuk menjalankan evaluasi standar mutu yang transparan dan akurat, sehingga seluruh kegiatan akademik dan operasional selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui sistem Monev yang terstruktur, IPDN dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan, efektivitas tata kelola, serta daya saing akademik di tingkat nasional dan internasional. Dengan pendekatan berbasis digitalisasi dan inovasi, IPDN memastikan bahwa seluruh tahapan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai strategi perbaikan berkelanjutan yang mendukung pencapaian visi besar IPDN di tahun 2045.

BAB VI

PENUTUP

Renstra IPDN Periode 2025-2029 merupakan fondasi strategis bagi pengembangan institusi menuju “Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kelas Dunia 2045”. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan misi transformasi kelembagaan secara berkelanjutan. Penyusunannya tidak hanya mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga merangkul tantangan global dan kebutuhan pemerintahan modern, sehingga IPDN dapat terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan publik yang berkembang pesat.

Pendekatan sistematis dan evaluatif dalam Renstra ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pengembangan selaras dengan visi jangka panjang IPDN. Evaluasi berkala dilakukan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal, termasuk perkembangan teknologi, tuntutan kompetensi kepomongprajaan, serta kebutuhan pengelolaan pemerintahan berbasis digital. Dukungan kebijakan yang kuat, keterlibatan *stakeholder*, dan kesiapan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaannya.

Transformasi kelembagaan yang diusung dalam Renstra ini mencakup penguatan tata kelola institusi, optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi global, serta peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan digitalisasi. Tata pamong yang transparan dan efisien akan menjadi pilar utama dalam membangun reputasi akademik IPDN di tingkat internasional, sekaligus menyiapkan lulusan yang adaptif dan unggul dalam berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, Renstra ini mendorong perluasan jejaring kerjasama dengan berbagai institusi global, guna meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi sivitas akademika.

Selain aspek akademik dan tata kelola, penguatan infrastruktur dan sarana pendidikan juga menjadi prioritas utama dalam Renstra ini. IPDN berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pendidikan berbasis teknologi, termasuk pengembangan laboratorium kebijakan, platform pembelajaran digital, serta pusat riset yang mampu menghasilkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan adanya digitalisasi yang terstruktur, IPDN dapat lebih efisien dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi para calon kader pemerintahan.

Dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi masa depan, Renstra IPDN Periode 2025-2029 akan menjadi pijakan utama dalam mengantarkan IPDN ke tingkat internasional. Implementasi yang efektif dari dokumen ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan, strategi, dan program kerja yang dijalankan benar-benar mendukung pencapaian *milestone* jangka panjang universitas. Dengan semangat inovasi dan komitmen seluruh sivitas akademika, IPDN siap menuju standar kelas dunia, mencetak kader pemerintahan berkualitas, dan berkontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan global.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat



Dr. Agus Toyib, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808271990031003

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

HALILUL KHAIRI